

# Treasury

Indonesia



## Ekosistem Fiskal untuk Kebangkitan UMKM

# Daftar Isi

## WAWANCARA...16

**Wamenkeu:** Sinergi Kemenkeu Satu untuk Pemberdayaan UMKM Harus *Beyond Our Duties*

**Sahli Menkeu Bidang Pengawasan Pajak:** Dukungan Duntuk UMKM lewat Kebijakan Perpajakan

**Direktur SMI:** Berbagai Kemudahan Diterapkan Demi Bantu UMKM Bangkit dari Keterpurukan

**Direktur SITP:** SIKP Mobile Upaya Mudahkan Debitur KUR Makin Berdaya

**The Korea SMEs & Startups Agency,** Berbagi Pengalaman dalam Pengelolaan Dukungan Pemerintah untuk UMKM

## DINAMIKA ....26

**KUR:** Bantu UMKM Bangkit, Topang Ekonomi Tumbuh

**Rumah UMi Dukung Geliat Ekonomi Maluku Utara**

Cakrawala .....	6
Rekam Peristiwa .....	8
Pelita .....	46
Persona .....	47
English Lounge .....	49
Gapura .....	50
Resensi Buku .....	55
Lensa .....	58
Community .....	61
Catatan ringan .....	62

## LIPUTAN UTAMA ...10



**Satukan Sinergi, Bahu-Membahu Dorong UMKM Bangkit dari Dampak Pandemi**

**Ekosistem Fiskal Sebagai Pengungkit Kebangkitan UMKM**

## OPINI .....30

Penyempurnaan Kerangka Kerja Uji Dampak Pembiayaan UMi melalui Kerja Sama dengan Melbourne Microfinance Initiative (MMI)

Urgensi Debitur UMi Onboarding pada Ekosistem Super APP (Super App untuk Onboarding Ekosistem Ultra Mikro)

Skema Subsidi Resi Gudang: Strategis Tanpa Perlu Redesign

## GAPURA ....50

**KPPN MALANG :** Apresiasi Mitra Kerja, Bangkitkan UMKM Bangsa

**KPPN MAKASSAR I:** Luncurkan Program Rumah UMi, Dukung Pemulihan Ekonomi

**PENANGGUNG JAWAB:** Sekretaris Ditjen Perbendaharaan  
**REDAKTUR:** Kepala Bagian Umum, Kepala Subbagian Kehumasan, Layanan Informasi, dan Protokoler, Kepala Subbagian Publikasi Cetak Bagian Manajemen Publikasi Biro KLI, Leila Rizki Niwanda  
**PENYUNTING/EDITOR PELAKSANA:** Dinar Rafikhalif, Mahardika Argha Mariska, Sugeng Wistriono, M. Bahrul Ulum, Rachmat Prasetyo Utomo, Dwi Apriany  
**DESAIN GRAFIS:** M. Andika Amin Suhada  
**FOTOGRAFER:** Agung Ari Wibowo, Resha Aditya Pratama  
**KONTRIBUTOR TULISAN/PENULIS:** Didyk Choeroel, Syaiful, Adnan Wimbyarto, Donny Maha Putra, Lalu Fahany Yazikri, Rizky Novrianto, Taufik Damhuri, Bachrul Ulum, Hanafi Firdaus, Sigid Mulyadi, Yanuar Imbiyono, Indra Yusak Ardianto, Putut Yoga Prabowo, Sugeng Wistriono, Leila Rizki Niwanda, Dinar Rafikhalif, Suparjito, Sintong Arfiyansyah, Wahyu Hadi Cahyono, Normalita Safitri, Rachmat Prasetyo Utomo, Galuh Resi Gumintang, Eko Bintoro Jati, Jiilaan Ronaa Aanisah, Ivanderaihan Subagiyono, Novryan Noor Hanifan Muttaqien, Pringadi Abdi Surya, Amela Erliana Crhistine, Dendi Andrian, Febby Johannes Wenji, Melina Br. Hutabarat, Beatrice Mega Maria Pakpahan, Ariefka Adi Darmawan Kargi, Andika Rohman Prasetya  
**SEKRETARIAT:** Imam Nur Arifin, Firman Imam Santoso, Nuning Dewi Murni, Safira Rakhmadani

Majalah Treasury Indonesia menerima kiriman tulisan/naskah yang dimuat pada terbitan berikutnya (rubrik dinamika/opini). Disediakan apresiasi bagi tulisan/naskah yang dimuat. Naskah dapat dikirimkan langsung maupun via email ke alamat Redaksi Majalah Treasury Indonesia: Gedung Prijadi Praptosuhardjo II, Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta Pusat 10710 Telp.(021) 3449230 Ext.52117/52118 Fax. (021) 3811911 Kotak Pos 1173. Email: [redaksi.treasury@gmail.com](mailto:redaksi.treasury@gmail.com) Website: [www.djpb.kemenkeu.go.id](http://www.djpb.kemenkeu.go.id). Kritik dan saran dapat disampaikan via email ke alamat Redaksi tersebut di atas.

**DITJEN  
 PERBENDAHARAAN  
 KEMENTERIAN  
 KEUANGAN  
 MENDUKUNG  
 PRESIDENSI  
 #G20INDONESIA**



RECOVER TOGETHER,  
 RECOVER STRONGER

# The Treasurer



Para pembaca yang budiman,

Tahun 2022 merupakan masa transisi dari pandemi menuju endemi. Pada triwulan pertama tahun 2022, kondisi Covid-19 secara global telah menunjukkan perbaikan yang signifikan dengan terus menurunnya jumlah kasus. Kinerja perekonomian Indonesia pada triwulan I tahun 2022 berada pada angka 5,1%, diperkuat dengan daya beli masyarakat yang terus membaik dan makin kuatnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga.

Namun, pertumbuhan ekonomi global sedikit melambat akibat permasalahan geopolitik dengan adanya perang Rusia-Ukraina. Hal ini apabila tidak diantisipasi dengan cepat dan proporsional tentunya akan berimplikasi pada kenaikan inflasi, yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Kondisi kesehatan dan global yang tidak menentu membuat perekonomian nasional masih memerlukan dukungan yang cukup besar. APBN berperan penting dalam menahan dampak pandemi Covid-19 dan menjadi instrumen *counter cyclical* atas melemahnya ekonomi. Pada masa pandemi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu sektor yang terimbas cukup besar, salah satunya sebagai dampak dari adanya kebijakan pembatasan pergerakan masyarakat. Padahal, berdasarkan data BPS, UMKM memberikan kontribusi besar dalam perekonomian nasional.

Dukungan pemerintah kepada UMKM agar dapat bangkit dan makin berkembang diberikan melalui berbagai skema, di antaranya bantuan pemerintah, subsidi bunga/subsidi margin, dukungan ekspor, dan insentif perpajakan. Berbagai dukungan inilah yang perlu dikoordinasikan dengan baik agar tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi benar-benar memberikan manfaat yang menyeluruh kepada UMKM di Indonesia. Menteri Keuangan dalam Leaders' Offsite Meeting (LOM) 2022 pun telah memberikan arahan untuk mengoptimalkan sinergi pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh unit-unit Kementerian Keuangan.

Majalah Treasury Indonesia Volume 2 tahun 2022 hadir mengulas berbagai dukungan pemerintah untuk UMKM dengan menggunakan APBN sebagai instrumennya, termasuk melalui peran DJPb. Sejumlah sajian khas lainnya dari redaksi juga dapat dinikmati oleh pembaca.

UMKM merupakan pilar penting dalam menciptakan kemandirian ekonomi rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Saya sangat berharap, kita semua terus mampu bersinergi menciptakan ekosistem yang komprehensif antara pemangku kepentingan dari Pemerintah, Penyalur, Penjamin, Pemda, BPKP, OJK, dan Bank Indonesia, untuk membantu UMKM agar dapat *survive* dan terus berkembang. Insan Perbendaharaan pun dapat turut serta mendorong pemberdayaan UMKM di daerah sebagai bagian dari komitmen Kementerian Keuangan melalui DJPb untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

*Good is not enough when better is expected.* Menghasilkan sesuatu yang baik merupakan hal yang sudah menjadi kebiasaan kita, tetapi Insan Perbendaharaan perlu *men-deliver output* yang lebih baik.

Salam Treasury,

Dirjen Perbendaharaan Hadiyanto



SCAN ME

Majalah Treasury Indonesia merupakan majalah resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Memberikan informasi terkini seputar pengelolaan keuangan negara dan informasi perbendaharaan didukung oleh narasumber penting dan kredibel di bidangnya

Majalah Treasury Indonesia saat ini juga dapat dibaca dan diunduh secara online melalui website resmi [djp.kemenkeu.go.id](http://djp.kemenkeu.go.id)

# MK Corner



## Perlu Koordinasi dan Sinergi Berbagai Program Pemerintah Kuatkan UMKM

Pandemi begitu memengaruhi kegiatan produksi, perdagangan, hingga sosial. Para pelaku UMKM dengan berbagai jenis usahanya memiliki cerita yang konsisten sama, yaitu mereka begitu ulet.

Orang-orang yang tidak pernah mengenal kata menyerah dalam kamus mereka. Setiap kali ada masalah justru dilihat dari sisi positifnya, yaitu menjadi kesempatan. Itulah yang disebut resiliensi atau daya tahan. Mereka memiliki ide, melihat ada pasar, merasa bisa membuat sesuatu dan itu dikerjakan, tidak hanya ada di dalam pikiran.

Untuk memulai menjalankan ide ini mereka salah satunya bisa meminjam dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Itu anggaran yang berasal dari APBN, uang rakyat, uang kita. Negara menyediakan dana ini karena ada dari masyarakat kita yang tidak bisa langsung pergi ke bank untuk meminjam demi melaksanakan idenya. Bank tidak mau menerima karena risikonya besar, dan jaminannya apa?

Itulah yang menggambarkan semangat dari UMKM kita, yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Pelaku UMKM walaupun terkendala faktor ekonomi, tetapi keinginan untuk berkarya sangat kuat. Para pelaku UMKM, Anda tidak sendirian. Pemerintah berusaha hadir untuk mendukung dan membantu. Mungkin tidak sempurna, tetapi kita berikhtiar. Usaha mikro meski mungkin belum membayar pajak karena omzetnya masih di bawah yang diwajibkan, tetapi mendapatkan manfaat pajak, yaitu akses permodalan tadi.

Negara membentuk Badan Layanan Umum (BLU) PIP yang tiap tahun ditambah anggarannya sampai mencapai Rp10 triliun. Itu uang negara, dari kita juga yang mengumpulkan serupiah demi serupiah dari uang

pajak. Ada UMKM yang setelah lunas lalu meningkat kebutuhannya, bukan lagi pinjaman tetapi perlu bantuan ekspor dan impor bahan baku. Ini dibantu oleh fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dari Ditjen Bea Cukai.

Ada juga program Kredit Usaha Rakyat (KUR), dengan suku bunga yang diturunkan sangat rendah. Bank mau menurunkan bunganya karena pemerintah memberikan subsidi. Pada masa pandemi pemerintah juga meluncurkan program Bantuan Produktif untuk Pelaku Usaha Mikro (BPUM). Keringanan tarif listrik pun diberikan.

Dari hasil survei TNP2K, pinjaman oleh UMKM dipakai untuk membeli bahan baku, mengembangkan usaha, membayar sewa alat, kadang-kadang bahkan untuk membayar utang mereka dari tempat lain dan ada juga yang untuk membayar pekerja. Berarti paling tidak, program ini meringankan beban sebagian dari masyarakat kita.

Diperlukan koordinasi dan sinergi dari berbagai instrumen pemerintah sehingga ke depan kita akan bisa melihat hasil yang makin baik, dan makin banyak usaha-usaha kecil yang bisa dibantu oleh pemerintah sehingga menghasilkan para pemenang, para UMKM yang bahkan bisa menembus pasar dunia. Ke depan, kita akan bekerja sama secara lebih erat lagi sehingga mampu mengangkat ekonomi Indonesia secara berkeadilan, dan menghasilkan penguatan bagi UMKM.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam kegiatan Festival UMI di Bandung

*new DJPb  
in Team*

# Harum Ekspor Kopi Dalam Negeri

Tak sulit menemukan secangkir kopi yang nikmat di sudut-sudut jalanan Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Mulai yang limaribuan hingga puluhan ribu, kopi jadi menu utama berbagai kalangan untuk sekedar menemani berbincang santai di pagi hari hingga disajikan di meja-meja jamuan resmi kenegaraan. Besarnya transaksi kopi membuat banyak orang melirik membuka banyak jenis usaha baik perkebunan maupun pengolahan kopi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor kopi Indonesia mencapai 809,16 juta dolar AS atau setara dengan 11,64 triliun rupiah (kurs Rp14.379,5/ dolar AS) pada 2020.



Jumlah yang sangat besar ini tentunya dapat dimanfaatkan pengusaha-pengusaha lokal untuk membuka usaha baru maupun menambah kapasitas produksi kopi di masa mendatang, terlebih saat ini pemerintah melalui KUR dan pembiayaan UMi mendukung sepenuhnya pemberdayaan UMKM agar berbagai peluang yang ada seperti kopi ini lebih tumbuh secara ekonomi.

Lokasi foto: Malabar Jawa Barat & UMKM Omah Kopi Ngemplak Boyolali

# REKAM PERISTIWA

## MARET

14 Maret

### Kemenkeu Dukung Pembiayaan Proyek Energi Baru Terbarukan PLTA Pumped Storage Terbesar di Asia Tenggara

Kemenkeu melalui Ditjen Perbendaharaan dan PT Perusahaan Listrik Negara mendatangi Perjanjian Penerusan Pinjaman Luar Negeri/*Subsidiary Loan Agreement* (PPLN/SLA) dalam rangka Pembiayaan *Development of Pumped Storage Hydropower in The Java-Bali System Project*.



15 Maret

### Penandatanganan Kontrak Kinerja BP Tapera, Upaya Pastikan Pengelolaan Pembiayaan Perumahan Rakyat Berjalan Optimal

Dalam kegiatan penandatanganan Kontrak Kinerja Pengelolaan Investasi Pemerintah (Dana FLPP) dengan Komisioner BP Tapera, Adi Setianto, Dirjen Perbendaharaan, Hadiyanto, berpesan bahwa BP Tapera perlu berinovasi bagaimana mengakselerasi pengelolaan tanpa terlalu bergantung pada APBN. Iuran wajib harus dijalankan secara masif dan efektif serta lebih terlihat manfaatnya.



31 Maret

### Sinergi Pemberdayaan UMKM melalui Perjanjian Kerja Sama SIKP KUR dan PKP SSRG

Dalam acara *Soft Launching* SIKP *Mobile* serta Penyerahan Naskah Perjanjian Kerja Sama Sistem Informasi Kredit Program Kredit Usaha Rakyat dan Perjanjian Kerja Sama Pembiayaan Skema Subsidi Resi Gudang (SSRG), Direktur Jenderal Perbendaharaan, Hadiyanto, menyampaikan bahwa Komitmen Pemerintah untuk mendukung UMKM diejawantahkan dalam pembahasan topik pemberdayaan UMKM dalam Forum G20 Tahun 2022.

## APRIL

06 April

### Standardisasi SDM Pengelola Keuangan APBN Melalui Pengembangan Karier dan Kompetensi Jafung Perbendaharaan

Direktur Jenderal Perbendaharaan, Hadiyanto, pada acara *Kemenkeu Corpu Talk* menyampaikan bahwa Kemenkeu telah membangun standardisasi dan penilaian kompetensi, pemeliharaan kompetensi, kemudian mengembangkan SDM berkompeten tersebut dalam suatu profesi pengembangan karir melalui Jabatan Fungsional di Bidang Perbendaharaan.

13 April

### Serahkan Penghargaan K/L Berkinerja Pelaksana Anggaran Terbaik, Menkeu Ingatkan Pentingnya Penguatan Pengelolaan APBN

Dalam Rakor Pelaksanaan PA, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan bahwa APBN tidak hanya melindungi masyarakat dari ancaman Covid-19, tetapi juga dari penurunan kegiatan ekonomi yang akan berakibat pada penurunan kesejahteraan masyarakat.

## MEI

18 Mei

### DJPb Tingkatkan Kolaborasi Kehumasan melalui Creativity Bootcamp

*Creativity bootcamp* diselenggarakan dalam rangka mengkonsolidasikan institusi Kanver DJPb dalam menyampaikan informasi terkait kebijakan pengelolaan keuangan negara kepada masyarakat luas melalui komunikasi yang efektif dan tepat sasaran.

## JUNI



7 Juni

### Kemenkeu Satu Dukung Program Pemberdayaan UKM Sektor Kelapa Sawit

Direktur PPK BLU, Agung Yulianta, dalam kegiatan Pameran dan *Talkshow* Sinergi Pemberdayaan UKM Kemenkeu Satu Sektor Kelapa Sawit menyampaikan bahwa Kemenkeu melalui program Kemenkeu Satu terus berkomitmen untuk mendukung program pemberdayaan UKM secara nasional dan komprehensif.

08 Juni

### Perkuat Sinergi dengan Polri, DJPb Berikan Penghargaan RS Bhayangkara dan Raih Wing Dokpol,

Sebagai wujud apresiasi atas kinerja keuangan yang baik sepanjang tahun 2021, Dirjen Perbendaharaan, Hadiyanto, memberikan penghargaan kepada tiga RS Bhayangkara RS Bhayangkara yang memperoleh penghargaan tersebut ialah RS Bhayangkara Tingkat II Kediri (peringkat 1), RS Bhayangkara Tingkat III Tulungagung (peringkat 2), dan RS Bhayangkara Tingkat II Semarang (peringkat 3).



14 Juni

### LKPP Tahun 2021 WTP, Wujud Pelaksanaan Pengelolaan APBN dengan Baik

BPK memberikan opini WTP atas LKPP Tahun 2021 dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Opini WTP atas LKPP tahun 2021 tersebut didasarkan pada opini WTP atas 83 LKKL dan 1 LKBUN yang berpengaruh signifikan terhadap LKPP 2021.



25 Maret

### Pertajam Peran RCE, DJPb Siapkan SDM Terampil Data Analitis

Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, Didyk Chiroel, dalam closing remarks Grand Final DDAC 2022 menyampaikan bahwa Kompetisi DJPb *Data Analytics Competition* (DDAC) menunjukkan hasil yang mengembirakan yang bisa menunjukkan bahwa DJPb sudah dapat mengikuti transformasi maupun tidak lanjut arahan pimpinan.



30 Maret

### BLU Berperan sebagai Shock Absorber untuk Recovery dari Dampak Pandemi

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam Rapat Koordinasi Badan Layanan Umum (BLU) menjelaskan bahwa APBN, termasuk BLU di dalamnya, diharapkan hadir menjadi instrumen yang mampu berperan sebagai *shock absorber* agar melindungi masyarakat dan perekonomian.

### Penyerahan LKPP Tahun 2021 (Unaudited) kepada BPK, Wujud Komitmen Pemerintah Jaga Akuntabilitas Keuangan Negara

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mewakili Pemerintah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021 (*Unaudited*) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Kantor Pusat BPK.



## Satukan Sinergi, Bahu-Membahu Dorong UMKM Bangkit dari Dampak Pandemi

UMKM memiliki peran yang besar pada perekonomian Indonesia, dengan kontribusi 97% tenaga kerja dan 61,9% kontribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, UMKM masih menghadapi tantangan untuk mengembangkan dan meningkatkan usahanya. Apalagi setelah terdampak oleh pandemi Covid-19. Oleh karenanya, pemerintah menjalankan sejumlah program untuk memberdayakan UMKM, misalnya. Diharapkan, tindakan ini selain dapat mempercepat pemulihan ekonomi juga dapat menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat, yang belakangan ini juga sedang mengalami guncangan karena dampak risiko global dan gejala geopolitik.

### Stimulus Ekonomi untuk UMKM Mumpuni

Stimulus ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah di Indonesia dalam menghadapi dan mengendalikan efek pandemi Covid-19 terhitung efektif jika dibandingkan dengan negara lain. Pada tahun 2021, Indeks PDB riil Indonesia telah mencapai kondisi pra-pandemi di level 101,5, sedangkan negara tetangga yaitu Malaysia berada di level 96,4, Filipina di level 95,5 dan Thailand masih di level 94,4.

Pada tahun 2020, pemerintah dituntut bekerja cepat untuk menangani dampak Covid-19, dengan mengambil kebijakan *extraordinary* dalam penanganan Covid-19, perlindungan sosial, hingga perlindungan dunia usaha. Tahun 2020,

Pemerintah mengalokasikan penanganan pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) sebesar Rp695,6 triliun.

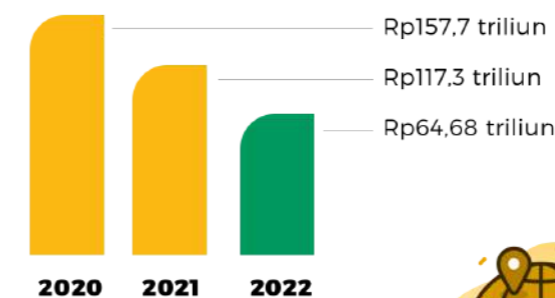
Untuk tahun 2021, kebijakan fiskal untuk PC-PEN diproyeksikan sebagai *game changer* dengan kebijakan cenderung ke arah *surviving and facilitating recovery*, dengan tetap berfokus pada penanganan Covid-19, program vaksinasi, perlindungan sosial, dan pemulihan dunia usaha. Alokasi APBN PC-PEN tahun 2021 adalah sebesar Rp744,7 triliun dengan realisasi mencapai Rp773,2 triliun. Adapun tahun 2022, dengan kondisi perekonomian yang terus membaik, kebijakan fiskal untuk PC-PEN diarahkan untuk *job-stimulating recovery* dengan tetap melanjutkan penanganan Covid-19, vaksinasi, perlindungan sosial, dan penguatan dunia usaha.

### Program PC-PEN untuk UMKM yang Resilien

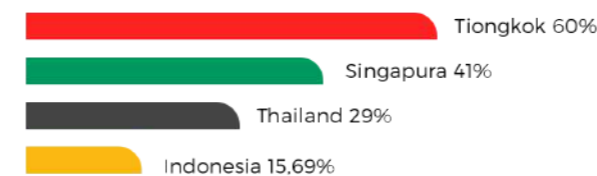
Dukungan Pemerintah untuk UMKM sebagai bagian dari program PC-PEN mencapai Rp157,7 triliun pada tahun 2020, Rp117,3 triliun pada tahun 2021, dan Rp64,68 triliun pada tahun 2022. Berkat stimulus pada dunia usaha tersebut, kondisi UMKM yang sempat mengalami penurunan pada awal pandemi pada tahun 2020 dengan kontribusi pada PDB 37,3% dan serapan tenaga kerja 73%, dapat cepat meningkat kembali di tahun 2021 hingga kontribusinya pada PDB menjadi 61,9% dengan serapan tenaga kerja mencapai sebesar 97%.

Berkat stimulus pada dunia usaha tersebut, kondisi UMKM yang sempat mengalami penurunan pada awal pandemi pada tahun 2020 dengan kontribusi pada PDB 37,3% dan serapan tenaga kerja 73%, dapat cepat meningkat kembali di tahun 2021 hingga kontribusinya pada PDB menjadi 61,9% dengan serapan tenaga kerja mencapai sebesar 97%.

### Alokasi Program PC PEN untuk UMKM



### Kontribusi Ekspor UMKM



Berdasarkan data BPS, UMKM memberikan kontribusi besar dalam perekonomian nasional. Namun UMKM masih menghadapi kendala untuk mengembangkan usahanya menjadi lebih maju, antara lain kesulitan dalam mengakses pembiayaan. Karenanya, pemerintah menjalankan berbagai kebijakan seperti subsidi bunga, penempatan dana pemerintah pada bank umum mitra untuk mendukung perluasan kredit modal kerja dan restrukturisasi kredit UMKM, penjaminan kredit modal kerja UMKM, Banpres Produktif untuk Usaha Mikro (BPUM), Bantuan Tunai untuk Pedagang Kaki Lima dan Warung (BT-PKLW), dan insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah. Terdapat pula program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang menyentuh langsung ke UMKM.

KUR merupakan salah satu dukungan nyata Pemerintah kepada UMKM. Dukungan tersebut berupa fasilitas pembiayaan perbankan dengan komponen subsidi bunga/margin di dalamnya. Penyaluran KUR tahun 2022 terus meningkat. Sampai saat ini, *outstanding* KUR mencapai Rp1.042 triliun dengan total sebanyak 34 juta debitur, dan

total subsidi bunga yang telah direalisasikan sejak tahun 2015 mencapai Rp76 triliun.

Jumlah yang sangat besar tersebut memperlihatkan besarnya dukungan Pemerintah pada UMKM. Dukungan pemerintah tersebut juga disokong oleh 46 Penyalur KUR dan 12 Penjamin KUR yang ke depannya perlu makin mempererat sinergi dalam menjaga ketepatan sasaran, agar subsidi dapat dinikmati langsung oleh UMKM dan memberikan dampak langsung bagi usahanya.

Adapun Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) merupakan dana bergulir yang dikelola oleh BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebagai *bridging* bagi usaha mikro penerima bantuan sosial untuk bisa naik kelas dan kemudian dapat mengakses pembiayaan perbankan. Sejak tahun 2017 hingga Juni 2022, Pembiayaan UMi telah disalurkan sebesar Rp20,79 triliun kepada 6,1 juta debitur. Capaian penyaluran tersebut telah melebihi target awal yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024, yaitu sebanyak 4,9 juta pelaku usaha pada akhir tahun 2024.

Pembiayaan UMi mampu meningkatkan nilai keekonomian usaha ultra mikro yang mendapatkannya. Berdasarkan survei dan kaji uji dampak aspek kesejahteraan, pada tahun 2021 terjadi kenaikan nilai keekonomian debitur UMi dari 49,85 poin di 2020 menjadi 52,64 poin di 2021. Pengukuran dampak keekonomian debitur UMi tersebut dilakukan secara rutin oleh DJPb melalui survei yang didukung seluruh kantor vertikal.

Rancang Program Taklukkan Tantangan ke Depan UMKM khususnya usaha mikro juga masih mengalami kesulitan untuk masuk ke pasar global. Berdasarkan data Kemenkop UKM, kontribusi ekspor UMKM baru sebesar 15,69%, masih cukup jauh jika dibandingkan negara tetangga seperti Singapura 41%, Thailand 29%, dan Tiengkong 60%. Padahal pemerintah telah menargetkan agar kontribusi UMKM ekspor dapat mencapai sebesar 17% pada tahun 2024.

Dalam mendorong eksistensi UMKM di pasar global, pemerintah juga telah meluncurkan program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) untuk peningkatan jumlah UMKM/Industri Kecil dan Menengah (termasuk Pelaku Ekonomi Kreatif) yang masuk dalam ekosistem digital, peningkatan daya beli masyarakat, perluasan pasar, akses permodalan, pelatihan, pendataan, dan percepatan siklus ekonomi lokal melalui belanja produk lokal.

Pemberdayaan UMKM dibangun untuk tidak hanya memberikan pembiayaan, tetapi juga membangun ekosistem pemberdayaan UMKM yang komprehensif dari kemudahan berusaha, pelatihan, dan pendampingan berkelanjutan, serta pembentukan pasar yang makin luas dan berkesinambungan. Untuk membangun UMKM, perlu sinergi semua pihak dari pemerintah, swasta, dan diperkuat dengan semangat dari UMKM itu sendiri yang akan saling melengkapi. Dalam pelaksanaannya, tentu akan muncul tantangan-tantangan baru dalam menyelaraskan langkah dan berkolaborasi memajukan UMKM. Namun, lewat kerja keras yang dilakukan, melalui sinergi tersebut, diharapkan tercipta ekosistem yang saling mendukung untuk kemajuan UMKM yang nantinya akan mendorong kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Teks: LF Yazikiri (Dit. SMI), Leila Rizki Niwanda

new DJPb in Team



# Ekosistem Fiskal sebagai Pengungkit Kebangkitan UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu pihak yang terkena imbas parah turbulensi ekonomi akibat pandemi Covid-19. Padahal, UMKM memiliki peran yang besar terhadap perekonomian Indonesia. Sebanyak 99,9% jenis usaha di Indonesia merupakan UMKM yang mampu menyerap 97% tenaga kerja dan berkontribusi 57% terhadap PDB (Kemenkop UKM, 2021). Sejalan dengan bangkitnya ekonomi Indonesia, kebangkitan UMKM masih menyisakan permasalahan kesulitan naik kelas, produktivitas rendah, rendahnya partisipasi dalam rantai pasokan dunia, keterbatasan akses digital, serta keterbatasan layanan finansial. Kementerian Keuangan memiliki potensi kuat dalam membangun ekosistem yang mendorong kebangkitan UMKM serta peran penting DJPb dalam ekosistem tersebut.

## Turbulensi yang Menyeret UMKM

Pandemi Covid-19 telah memukul perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Berbeda dengan krisis sebelumnya, pada krisis saat ini UMKM ikut terseret dalam turbulensi ekonomi yang menyebabkan penurunan permintaan agregat secara signifikan (Ssenyonga, 2021). World Bank dan Bappenas (2020) melaporkan pada bulan Oktober 2020 75% usaha mengalami penurunan omzet selama pandemi, 43% responden melakukan penurunan biaya tenaga kerja, dan 22% kesulitan membayar pinjaman.

Sektor UMKM mendominasi usaha di Indonesia. Data dari Kemenkop UKM menunjukkan dari sekitar 64 juta jumlah usaha di Indonesia, 99,9% di antaranya berbentuk UMKM dan 98,6% berbentuk mikro. UMKM menjadi penyumbang PDB nasional sebesar 60,34%, serta menyerap 97% total tenaga kerja nasional. Dengan porsi yang sedemikian besar, kejatuhan UMKM akan meningkatkan kemiskinan serta memperlebar jurang ketimpangan antara masyarakat miskin dan menengah/kaya.

Pemerintah menyadari perlunya kebijakan APBN untuk meringankan beban UMKM. Berbagai stimulus digulirkan untuk UMKM sebagai bagian dari Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). Dana yang digulirkan melalui anggaran untuk dukungan UMKM masing-masing sebesar Rp112,44 triliun pada tahun 2020 dan Rp184,83 triliun pada tahun 2021. Jumlah tersebut terbagi ke dalam beberapa skema yaitu Subsidi Bunga,

Penempatan Dana untuk Restrukturisasi Kredit, Belanja Imbal jasa Penjaminan (IJP), Penjaminan untuk Modal Kerja (*Stop Loss*), PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah (DTP), Pembiayaan Investasi kepada Koperasi melalui LPDP, Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM), serta Cadangan UMKM 2021.

## Usaha untuk Bangkit

Seiring dengan penurunan angka penularan Covid-19 dan dibukanya kembali aktivitas masyarakat, ekonomi mengalami perbaikan dan pemulihan. Namun, perkembangan ekonomi tidak serta merta berkoneksi pada perkembangan UMKM (Cahyadin, 2017). UMKM masih menghadapi sejumlah permasalahan klasik untuk bangkit. Berbagai permasalahan menghantui UMKM seperti kesulitan naik kelas, berkatut pada produktivitas rendah, kesulitan partisipasi dalam rantai pasokan dunia, keterbatasan akses digital, dan layanan finansial.

Namun, pandemi Covid-19 telah merubah lingkungan UMKM secara signifikan. Digitalisasi di Indonesia berkembang menjadi sangat cepat. Kemp (2022) melalui DataReportal melaporkan pada Januari 2022 pengguna internet di Indonesia mencapai 204,7 juta orang atau 73,7% dari total penduduk. 191,4 juta di antaranya merupakan pengguna media sosial aktif.

Bank Indonesia (2022) mencatat nilai transaksi uang elektronik pada 2021 meningkat 66,65% dalam setahun dan mencapai Rp34,6 triliun. Nilai transaksi *digital banking* juga bereskalasi 62,82% menjadi Rp4.314,3 triliun. Sementara, nominal transaksi QRIS meningkat 260% dengan volume transaksi melompat 326% dalam setahun. Tentunya perkembangan digitalisasi tersebut merupakan sebuah peluang besar untuk merubah mekanisme kerja UMKM agar dapat ikut serta dalam ekonomi berbasis digital yang makin membesar.

UMKM memerlukan bantuan Pemerintah untuk memanfaatkan perkembangan tersebut. Pemerintah memang memegang peranan penting dalam perkembangan UMKM, terutama masalah jaringan pemasaran dan akses pembiayaan (Agus et al, 2015). Filipina, misalnya, memiliki *micro, small, and medium-sized enterprises (MSME) Development Plan* yang terdiri atas penguatan lingkungan bisnis, akses

pembiayaan, akses ke pasar, program pengembangan *brand equity*, penguatan klaster industri, dan mentor entrepreneur. Singapura memiliki Spring Singapore yang mengembangkan ratusan program dan puluhan skema pengembangan *startup*. Korea Selatan memiliki KOSME yang berhasil mengantarkan puluhan perusahaan berskala UMKM menjadi perusahaan internasional.

Indonesia juga memiliki berbagai program terkait UMKM. Pemerintah memiliki berbagai program terkait UMKM seperti Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Kredit Usaha Rakyat (KUR), Pembiayaan Ultra Mikro, dan berbagai program lainnya. Namun, Rokhim (2022) mencatat kurang dari 25% UMKM di Indonesia yang menerima fasilitas program Pemerintah.

## Ekosistem Fiskal

Sektor privat mengenal konsep ekosistem bisnis di mana berbagai perusahaan bekerja secara kooperatif dan kompetitif untuk mendukung produk baru, memuaskan pelanggan, dan menciptakan inovasi di segmen target. Mobil M&M dari India menjadi sebuah contoh bagaimana setiap perusahaan yang terlibat dalam ekosistem produksi mobil saling bekerja sama dan pada akhirnya mampu menciptakan mobil *sport utility vehicles (SUV)* sekelas produk Eropa dengan harga yang jauh lebih murah.

Perkembangan dunia digital yang masif menjadikan ekosistem bisnis sebagai jalan keluar untuk bertahan dan memenangkan pelanggan (Gileva et al, 2021). Bayangkan jika model ekosistem bisnis seperti itu dapat diadaptasi dalam pemberdayaan UMKM. Setiap unit dalam ekosistem tersebut mampu bekerja secara kooperatif sesuai dengan bidang tugasnya untuk memberdayakan UMKM.

Kemenkeu mungkin mempunyai ekosistem yang lengkap untuk mendorong kebangkitan UMKM. Rentang tugas yang sangat lebar dapat dimanfaatkan jika seluruhnya bekerja dalam sebuah ekosistem dengan satu target utama. Sebagai pemegang kebijakan fiskal, Kemenkeu memiliki peran dalam mengalokasikan kebijakan anggaran belanja dan penerimaan

negara (APBN) untuk mendorong pengembangan UMKM. Sebagai penyedia layanan publik, Kemenkeu memberikan layanan untuk lebih dari 32 juta UMKM baik secara langsung maupun tidak langsung melalui unit eselon I dan *Special Mission Vehicle (SMV)*, terdiri atas BLU dan BUMN) Kemenkeu.

Namun demikian, layanan Kemenkeu kepada UMKM masih cenderung bersifat *scattered*. Setiap unit Kemenkeu memberikan layanan kepada UMKM berdasarkan tugas dan perannya masing-masing tanpa terintegrasi satu dengan lainnya. Menariknya, hampir semua unit Kemenkeu memiliki program khusus yang diperuntukkan untuk UMKM, meskipun tidak ada tugas fungsi yang secara khusus melayani sektor tersebut. Apabila program-program tersebut disinergikan, mungkin dapat dihasilkan daya ungkit (*leverage*) yang lebih optimal untuk mendorong kebangkitan UMKM.

Sebuah terobosan saat ini sedang diupayakan untuk menyatukan program-program tersebut menjadi sebuah ekosistem fiskal yang mendukung pemberdayaan UMKM yaitu Program Kemenkeu Satu. Program ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas UMKM binaan Kemenkeu. Dalam program tersebut, setiap Unit Eselon I, BUMN Kemenkeu,



dan BLU Kemenkeu terlibat dalam ekosistem ini. Secara ringkas ekosistem dalam program tersebut diilustrasikan pada gambar diatas. Gambar di atas menjelaskan bahwa target utama ekosistem

terletak pada tengah lingkaran yaitu UMKM Binaan Kemenkeu. Lingkaran yang menyelimuti inti adalah program unit Kemenkeu yang berinteraksi secara langsung. Dua lingkaran yang lebih luar menggambarkan klasifikasi tanggung jawab setiap unit pada ekosistem. Adapun logo di luar lingkaran merupakan unit-unit yang terlibat dalam Program Kemenkeu Satu.

Setiap unit yang terlibat mengambil porsi masing-masing sesuai dengan kedekatan *core business*. Secara umum, terdapat enam klasifikasi tanggung jawab yang terdiri atas unit pelatihan, unit pendampingan komunal, unit pembiayaan, unit bantuan sarpras, unit pemasaran dalam negeri, dan unit pemasaran luar negeri. Enam klasifikasi tersebut berinteraksi langsung melakukan pemberdayaan UMKM yang menjadi binaan Kemenkeu.

**Peran dalam mendorong kebangkitan UMKM tidak hanya dapat dijalankan dalam kebijakan-kebijakan formal. Kantor vertikal DJPb beserta pegawainya memiliki ruang untuk berinisiasi dan berinovasi membangun UMKM di wilayahnya.**

Suatu unit dimungkinkan untuk masuk pada lebih dari satu klasifikasi tanggung jawab. DJPb, misalnya, diklasifikasikan sebagai Unit Pembiayaan melalui regulasi skema kredit program serta peran sebagai pengelola Sistem Informasi Kredit Program (SIKP). Selain itu, DJPb juga diklasifikasikan sebagai Unit Pemasaran Dalam Negeri melalui sistem aplikasi pembayaran digital DigiPay serta Unit Pendampingan Komunal lewat rencana implementasi kegiatan Pemberdayaan UMKM.

Dalam suatu ekosistem, komunikasi dan informasi merupakan kunci kesuksesan karena setiap pihak harus bergerak dengan irama yang harmonis. Oleh karenanya, Kemenkeu sedang mengupayakan pembentukan *single database* UMKM dengan pemanfaatan teknologi informasi dan *data analytics*. Sebagai jalur komunikasi, saat ini juga dilakukan pembentukan *satgas/task force* pemberdayaan UMKM baik di pusat maupun daerah yang melibatkan seluruh unit Eselon I maupun SMV yang berada di bawah Kemenkeu. Pemberdayaan tersebut juga membuka kemungkinan keterlibatan kalangan profesional baik dari swasta, akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), maupun pihak lainnya.

**Peran Penting DJPb**

DJPb memegang peran yang sangat penting dalam Program Kemenkeu Satu. DJPb memiliki kantor vertikal yang tersebar di seluruh Indonesia serta menjadi

pembina bagi tiga BLU Pengelola Dana, yaitu Pusat Investasi Pemerintah (PIP), Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Dari sisi infrastruktur teknologi, DJPb memiliki DigiPay yang merupakan sistem pembayaran digital menggunakan Kartu Kredit Pemerintah dan/atau *cash management system (CMS) virtual account*. DJPb juga berperan sebagai pengelola SIKP yang menyimpan data lebih dari 30 juta UMKM serta berfungsi untuk menghubungkan Penyalur, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), kantor vertikal DJPb, dan pemerintah daerah. Saat ini SIKP yang semula berbasis web sedang terus ditingkatkan dan dikembangkan kemampuan maupun keamanannya untuk menyambungkan pengguna dan calon pengguna dengan pihak-pihak lain melalui aplikasi SIKP Mobile yang dapat diakses melalui *smartphone*.

Selain itu, salah satu unit eselon II DJPb yaitu Direktorat Sistem Manajemen Investasi (SMI) memiliki tugas fungsi dalam penyusunan regulasi terkait kredit program, terutama pembiayaan Ultra Mikro (UMi), proses bisnis SIKP, serta Skema Subsidi Resi Gudang (SSRG). Direktorat SMI juga merupakan penyusun regulasi terkait Pemberian Pinjaman dan supervisi teknis BLU Pengelola Dana (PIP, BPDLH, dan BPDPKS). Dengan modal tersebut, DJPb memiliki potensi besar untuk memperkuat ekosistem fiskal dalam mendorong kebangkitan UMKM di seluruh Indonesia.

Peran dalam mendorong kebangkitan UMKM tidak hanya dapat dijalankan dalam kebijakan-kebijakan formal. Kantor vertikal DJPb beserta pegawainya memiliki ruang untuk berinisiasi dan berinovasi membangun UMKM di wilayahnya. Pelibatan UMKM sebagai penyedia barang dan jasa di Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah, pengembangan Rumah UMi oleh Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara, serta pendampingan pengrajin batik di Kanwil DJPb Provinsi Yogyakarta memberikan bukti bahwa kepedulian terhadap UMKM sebenarnya sudah berkembang di kalangan insan perbendaharaan.

Bagaimana pun, pemberdayaan UMKM masih menyisakan pekerjaan rumah yang besar untuk dikembangkan bersama. Ide seperti *crowdfunding* UMKM atau kerja sama dengan melibatkan *startup* mungkin perlu dipikirkan dan diimplementasikan pada masa mendatang. Bagaimana Ekosistem Fiskal mampu bekerja sebagai daya ungkit kebangkitan UMKM di Indonesia, tentu menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Dengan demikian, *tagline* "Kemenkeu Satu, UMK Maju", tidak hanya menjadi slogan dan retorika semata.

*Teks: Donny Maha Putra (Setjen Kemenkeu), LF Yazikiri (Dit. SMI)*

# Langkah Pemerintah Dukung UMKM



**Permasalahan yang dihadapi**

Produksi terhambat [18.83%]	Distribusi terhambat [20.01%]
Akses Permodalan [19.39%]	Penjualan/permintaan menurun [22.9%]
Kesulitan bahan baku [18.87%]	

SUMBER: KEMENKOP UKM, 2021

**Kebijakan yang diharapkan UMKM:**

- 90% UMKM membutuhkan pembiayaan untuk mulai usaha
- 91.8% UMKM membutuhkan pinjaman tanpa bunga/atau tanpa agunan
- 89.5% UMKM membutuhkan bantuan tunai langsung atau hibah

**Pada pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 yang pertama pada bulan Februari, para Menkeu dan Gubernur Bank Sentral akan menegaskan kembali komitmennya untuk mengedepankan agenda inklusi keuangan, dan mengharapkan G20 untuk mengembangkan kerangka kerja untuk mengoptimalkan manfaat digitalisasi, dengan tujuan meningkatkan produktivitas, dan mendorong ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif bagi perempuan, pemuda, dan UMKM.**

**Skema Pembiayaan Bagi UMKM**

- Program UMI (Ultra Micro Credit),** pembiayaan yang menyasar usaha mikro pada level terbawah yang belum dapat difasilitasi oleh perbankan, dengan memberikan fasilitas pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan non-bank.
- Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar dan Mekaar Syariah,** yaitu program pinjaman kelompok bagi perempuan miskin yang melakukan usaha mikro.

**Inklusi digital untuk UMKM**

- Edukasi & Literasi Keuangan
- Dukungan untuk UMKM Perempuan
- Layanan Keuangan Digital untuk Perempuan





## Wamenkeu: Sinergi Kemenkeu Satu untuk Pemberdayaan UMKM Harus *Beyond Our Duties*

UMKM memperoleh informasi. Terdapat juga fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor (KITE) untuk Industri Kecil dan Menengah (IKM). Adapun BKF membantu UMKM dengan menyusun kebijakan untuk mempermudah UMKM mengembangkan usahanya dan mengakses layanan keuangan.

DJPb selama beberapa tahun terakhir juga mengelola alokasi Pembiayaan UMi melalui PIP untuk usaha ultra mikro yang belum *bankable*, selain subsidi KUR yang menolong UMKM agar dapat mengambil kredit di bank dengan jaminan pemerintah. Dari segi pemasaran, DJKN menyelenggarakan Lelang UMKM melalui platform yang dimilikinya sehingga produk UMKM bisa menjangkau pembeli dari berbagai daerah. DJKN menyediakan pula program keringanan penyelesaian utang untuk debitur yang terdampak pandemi.

Unit-unit vertikal Kemenkeu di daerah juga sudah menerapkan program dukungan UMKM. Apalagi dengan kedekatan lokasi, pendampingan dan bantuan dapat dilakukan secara lebih intens dan sesuai kebutuhan.

Dengan adanya beragam program tadi, kita perlu membuat sinergi antar-unit agar UMKM benar-benar merasa terbantu. Kita tidak cukup lagi mengerjakan program dengan tata kelola yang baik. Perlu ada *connection* antarprogram, supaya tidak terkesan berjalan sendiri-sendiri.

Dalam kegiatan di Magelang beberapa waktu yang lalu misalnya, saya menyerahkan secara simbolis akad pembiayaan UMi kepada para debitur. Dalam acara yang sama, para penerima pembiayaan UMi ini juga mendapatkan kartu NPWP. Jadi para debitur UMi sekaligus didaftarkan sebagai Wajib Pajak. Menurut saya, ini program yang bagus sekali.

Debitur diingatkan bahwa dengan menerima pembiayaan UMi, artinya ia mendapatkan bantuan yang berasal dari pajak, dari uang rakyat yang telah dikumpulkan. Dengan modal yang telah diberikan, penerimanya bisa bekerja, menghasilkan *output*, dan menciptakan pendapatan. Lewat pemberian NPWP, di edukasi bahwa debitur yang sudah memenuhi ketentuan nantinya juga akan membayar pajak. Kelak, uang pajaknya akan kita pakai lagi untuk membantu pelaku usaha yang lain.

Kegiatan seperti tadi adalah contoh sinergi yang luar biasa. Di Kemenkeu banyak program untuk UMKM yang bisa disinergikan. Seharusnya kita memang berpikir seperti itu, memadukan program-program dukungan UMKM yang ada. Jangan hanya puas dengan acara-acara seremonial untuk program masing-masing. Nuansa yang muncul pasti berbeda,

jika dibandingkan antara kita melakukannya bersama-sama dengan melakukannya secara terpisah.

Sinergi juga dapat diwujudkan dalam bentuk berbagai dukungan agar UMKM mampu melakukan ekspor. Contohnya, UMKM yang mendapatkan pembiayaan ekspor dari LPEI lalu dibantu DJBC agar juga mendapatkan kemudahan untuk ekspor.

Bentuk sinergi inilah yang kita pikirkan bersama-sama. Apabila sudah didapatkan bentuk yang tepat, ini akan dijadikan sesuatu yang sifatnya nasional, dan dapat dirumuskan juga kebijakannya. Program Sinergi Pemberdayaan UMKM Kemenkeu Satu ini saya harap membuat teman-teman unit Eselon I melakukan orkestrasi dan bekerja bersama. Mudah-mudahan dapat menjadi terobosan baru dalam kita membuat platform untuk UMKM dari Kemenkeu.

### Apa tantangan terbesar dalam mengimplementasikan program tersebut?

Kita sering cepat merasa pekerjaan sudah selesai ketika dananya disalurkan. Dengan telah dianggarkannya alokasi subsidi KUR, dananya sudah dicairkan, SP2D-nya sudah diterbitkan, lalu menganggap tugas kita sudah tuntas.



Menguatkan sinergi memang bukan pekerjaan yang mudah. Kerja sama ini memerlukan orang-orang yang bekerja dengan disiplin dan tekun, dengan cara bekerja yang baru. Jadi, kita tidak berhenti karena subsidi KUR sudah disalurkan, pinjaman untuk UMKM tidak macet, atau angsuran pembiayaan UMi-nya telah dikembalikan.

Program-program ini memang sudah menyentuh UMKM, tetapi yang kita lakukan harus lebih dari itu. Secara khusus, sudah ada tim yang saya minta bekerja, dimulai dari menginventarisasi apa saja program dukungan UMKM yang sudah dilakukan oleh unit-unit Eselon I, siapa saja yang telah dibantu, dan mereka sudah mendapatkan bantuan apa saja.

Kita ingin ada sinergi antar-unit di Kemenkeu yang betul-betul mendorong UMKM untuk tumbuh dan berkembang. Kita akan membantu UMKM sampai dapat meningkatkan omzetnya. Dari masih berupa usaha mikro, harapan kita bisa naik kelas menjadi usaha kecil. Dari level yang awalnya mendapatkan pembiayaan UMi, kita dorong supaya bisa mengajukan KUR. Dengan omzet yang makin besar, UMKM kita edukasi untuk memahami kewajiban dalam hal perpajakan. Makin banyak dan berkualitas produksinya, kita bantu hubungkan ke pasar internasional. Pekerjaan ini memang tidak akan terjadi dalam enam bulan. Namun, sudah seharusnya Kemenkeu memikirkan hal-hal ini, sehingga tidak sekadar menjalankan program. Menjalankan program itu adalah suatu level, dan kita betul-betul bekerja memajukan UMKM itu harus ada di level berikutnya.

### Apakah diperlukan unit baru dalam menjalankan program tersebut?

Cara berpikir birokrasi seringkali memang begini. Setiap ada ide baru, pasti ada yang bertanya, unit mana yang bertanggung jawab? Siapa yang mengerjakannya? Seakan-

akan ide seperti ini bukan pekerjaan bersama, melainkan pekerjaan unit. Bukan ini yang saya maksudkan. Kita tidak perlu membuat unit baru, tetapi kita perlu membuat cara bekerja yang baru. Memang dibutuhkan orang-orang yang *dedicated*, untuk berdiskusi, berpikir, dan memutuskan. Ini sesungguhnya adalah pekerjaan yang selama ini kita sudah lakukan. Sekarang tinggal bagaimana kita lakukan pekerjaan tersebut dengan cara yang lebih baik. Dengan cara yang baru ini, kita akan punya *output* menciptakan UMKM yang memanfaatkan program-program pemerintah sampai berhasil naik kelas.

Saya ingin sinergi ini benar-benar dibuat sebagai kerja bersama. Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Menkeu dalam *Leaders' Offsite Meeting*, kita perlu mengerjakan program sampai ujungnya. Ini bisa berarti implementasi program sampai dengan tahap pelaporan dan pertanggungjawaban. Namun, harapannya sinergi ini bukan sekadar mengerjakan program reguler, melainkan benar-benar menyentuh UMKM.

*Mindset*-nya bukan kita ubah, tetapi kita tambah. Jadi kita tidak sekadar menjalankan program, tetapi menciptakan UMKM yang benar-benar naik kelas. Contohnya, di Palembang, teman-teman kantor vertikal berinisiatif *meeting* jarak jauh dengan atase di luar negeri untuk diskusi mengenai keperluan di sana. Mereka menggali, apa saja kesempatan pasar yang bisa dipenuhi oleh UMKM dari sini.

Unit seperti PIP misalnya, memang tidak bertugas mengedukasi apalagi memastikan agar debiturnya membayar pajak. Namun, PIP bisa mengedukasi debitur tentang pajak, baik dilakukan sendiri atau bersinergi dengan DJP. PIP juga dapat mengajari UMKM cara ikut lelang. Debitur UMi pun nantinya diharapkan bisa di-*promote* untuk mengajukan KUR, dan PIP dapat mengajari debitur bagaimana caranya *apply* ke bank.

Kualitas hasil pekerjaan kita akan berbeda kalau sekadar berpikir sudah selesai dengan pencatatan yang rapi dan sudah dipertanggungjawabkan, dibandingkan dengan memikirkan apa lagi yang bisa dibantu. Jadi, tergantung kita mau bekerja sampai level mana. Jangan karena belum pernah ada bentuk sinergi seperti ini, lalu berpikir bahwa memang tidak perlu ada. Seharusnya kita menerobos cara berpikir yang seperti itu. Kalau sekadar mengerjakan tugas sampai selesai, itu sudah kewajiban kita, sudah minimalis sekali. Namun, kalau kita berhasil bersinergi, itu *beyond our duties*. Inilah yang akan membantu UMKM naik kelas. Itu yang kita maksud dengan Sinergi Pemberdayaan UMKM Kemenkeu Satu.

### Seperti apa harapan Bapak ke depannya untuk program tersebut?

Saya berharap teman-teman di berbagai unit mulai bekerja, menggali program apa saja yang bisa disinergikan. Dengan begitu, kita menciptakan program baru, sesuatu yang lebih besar, dan menciptakan sinergi. Kita juga berharap teman-teman di DJPb yang menjalankan berbagai program penguatan permodalan UMKM bisa menjadi salah satu *center point*, sehingga aktivitas-aktivitas sinergi yang sudah kita mulai bisa diperkuat terus.

**M**engingat peran UMKM yang sangat besar dalam perekonomian, pemerintah menyusun program-program agar sektor ini kian berkembang. Kemenkeu pun mengimplementasikan berbagai kebijakan bagi UMKM. Aneka program ini tentunya akan memberikan dampak yang lebih besar jika dilaksanakan secara sinergis. Oleh karenanya, program Sinergi Pemberdayaan UMKM Kemenkeu Satu pun dicanangkan. Seperti apa kerangka besar dan visi dari program ini? Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara berkenan menerima tim Redaksi Majalah Treasury Indonesia di tengah kesibukan untuk menjawab pertanyaan tersebut.

### Seperti apa konsep program Sinergi Pemberdayaan UMKM Kemenkeu Satu ini?

Dalam APBN, telah dialokasikan anggaran untuk berbagai program yang merupakan wujud dukungan terhadap UMKM. Anggaran ini tidak terbatas untuk Kementerian Koperasi dan UKM, tetapi juga diberikan kepada kementerian lain, misalnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kementerian Keuangan pun memperoleh alokasi untuk membantu UMKM.

Setiap unit di Kemenkeu memiliki program untuk UMKM. DJP membantu dengan menerapkan PPh Final untuk UMKM, sehingga tidak dikenai PPh 25% dari laba, melainkan cukup 0,5% dari omzet. Dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, bahkan jika UMKM omzetnya masih sampai dengan Rp500 juta setahun, maka tidak perlu membayar pajak. Apabila KPP didatangi oleh UMKM untuk minta dibantu menyusun pembukuan sederhana, mereka juga siap.

DJBC mempunyai program untuk UMKM yang akan melakukan ekspor. Ada program Klinik Ekspor untuk edukasi dan asistensi, ada juga *call center* agar memudahkan

## Sahli Menkeu Bidang Pengawasan Pajak: Dukungan untuk UMKM lewat Kebijakan Perpajakan

**D**ukungan pemerintah untuk UMKM diberikan melalui berbagai cara. Salah satunya adalah dari sisi perpajakan. Seperti apa kebijakan di bidang perpajakan dirancang agar sektor UMKM terbantu? Untuk mendapatkan jawabannya, redaksi Majalah Treasury Indonesia mewawancarai Nufansa Wira Sakti, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak.

Pada tahun 2021, DPR telah mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). UU HPP disebut dapat menjadi solusi ketimpangan

karena aspek utama asas keadilan. Mengapa peraturan pajak perlu diharmonisasikan serta bagaimana klausul-klausul UU HPP mengejawantahkan asas keadilan?

Dalam latar belakang adanya UU HPP ini, diketahui dalam mewujudkan masyarakat adil yang berkeadilan, makmur dan sejahtera yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 perlu dilakukan secara terus menerus penataan hak dan kewajiban warga negara dan penduduk Indonesia, termasuk di dalamnya perpajakan sebagai perwujudan kewajiban kenegaraan. UU HPP adalah salah satu wujud penataan keberlanjutan dari reformasi sistem administrasi perpajakan di Indonesia.

Asas keadilan yang terlihat nyata dalam UU HPP ini yaitu dengan melakukan perubahan pada rentang Penghasilan Kena Pajak, lapisan tarif terendah serta penambahan satu lapisan tarif tertinggi PPh untuk wajib pajak orang pribadi (WP OP), dan pemberian batasan peredaran bruto tidak kena pajak senilai Rp500 juta setahun untuk WP OP UMKM. Kebijakan ini sebagai bentuk manifestasi perlindungan, keberpihakan, dan rasa keadilan terhadap kepentingan masyarakat secara luas, sesuai dengan beban pajak dan fungsi pajak dalam distribusi pendapatan yang lebih berkeadilan.

Salah satu tujuan UU HPP adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sementara, kita ketahui bersama 99% usaha di Indonesia berbentuk UMKM. Artinya meningkatkan pertumbuhan ekonomi tentu juga harus memperhatikan perkembangan UMKM. Apakah dalam UU HPP ada perlakuan tertentu pada pelaku UMKM?

Sebagai salah satu dukungan kepada pengusaha OP UMKM untuk mewujudkan asas keadilan, kesederhanaan, efisiensi, kepastian hukum, kemanfaatan, serta kepentingan nasional, maka terhadap mereka diwujudkan batas omzet tidak kena pajak. Batasan peredaran bruto tidak dikenai pajak tersebut senilai Rp500 juta setahun, sehingga dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp500 juta setahun belum dikenai kewajiban membayar PPh.

Sebagian besar UMKM masih berbentuk usaha informal, walaupun terkadang penghasilannya di atas ambang minimal kena pajak. Sebenarnya apakah ada strategi untuk meminimalkan penghindaran pajak oleh UMKM?

Strategi yang dilakukan, terutama terhadap pengawasan perpajakan UMKM, dilakukan melalui reformasi terhadap regulasi, organisasi, teknologi informasi, sumber daya manusia, serta proses bisnis dalam sistem administrasi perpajakan yang salah satunya terfokus kepada pengawasan perpajakan UMKM.

Selain itu DJP juga membentuk Satuan Tugas Pengawasan Potensi Perpajakan UMKM baik Digital maupun Non-Digital. Satuan Tugas ini melakukan pemetaan terhadap potensi-potensi yang ada dengan membentuk *database* nasional dengan kriteria tertentu yang dilanjutkan dengan program-program berskala nasional melalui edukasi dan penegakan hukum.

Menurut salah satu studi Universitas Indonesia terkait implementasi program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN) pada UMKM, pelaku UMKM sering tertinggal informasi terkait kebijakan Pemerintah. Pada akhirnya orang-orang ditargetkan sebagai penerima manfaat malah belum tersentuh. Kira-kira langkah apa yang perlu diambil untuk meminimalkan misinformasi terutama terkait UU HPP pada UMKM?

DJP dalam menghadapi kesenjangan pengetahuan perpajakan tersebut melakukan langkah-langkah strategi komunikasi yang berjenjang dan terukur. Pertama-tama, dilakukan melalui fungsi kehumasan dengan melaksanakan penyiaran informasi mengenai UU HPP baik secara daring maupun luring serta secara langsung dan tidak langsung melalui seluruh media yang ada. Tentunya dengan memperhatikan anggaran yang dimiliki.

Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan pelaksanaan edukasi UU HPP pada UMKM terutama oleh Jafung Penyuluh Pajak yang dimiliki oleh DJP dengan berbagai metode yang ada agar UMKM dapat lebih memahami serta memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya.

Apabila pembaca MTI tertarik untuk mengetahui lebih lanjut terkait UU HPP, apakah ada saluran yang bisa dihubungi?

Kami memiliki beberapa kanal yang bisa dimanfaatkan oleh para pembaca MTI untuk mengetahui lebih lanjut terkait UU HPP. Melalui daring, bisa diakses website kami di [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id). Di sana tersedia materi-materi terkait UU HPP serta dapat berkomunikasi langsung melalui menu "chat Pajak online" yang tersedia.

Informasi juga bisa didapatkan sosial media seperti Facebook, Twitter, Instagram serta kanal YouTube DitjenpajakRI yang kami miliki. Kami juga memiliki *contact center* yang bisa diakses melalui nomor telepon 1500200. Pada akhirnya, jika para pembaca MTI ingin berkonsultasi langsung juga dapat menghubungi kantor pajak yang terdekat yang kami miliki, tentunya melalui mekanisme protokol kesehatan yang berlaku.

Teks: Galuh Resi Gumintang (Direktorat SMI)



DIREKTORAT JENDERAL  
BEA DAN CUKAI



[linktr.ee/bravobeacukai](https://linktr.ee/bravobeacukai)



## Direktur SMI: Berbagai Kemudahan Diterapkan Demi Bantu UMKM Bangkit dari Keterpurukan

Beberapa di antara fungsi DJPb adalah menyusun regulasi, mengelola pemberian pinjaman, investasi pemerintah, maupun kredit program, yang dijalankan oleh Direktorat Sistem Manajemen Investasi (SMI). Bagaimana fungsi ini diimplementasikan untuk mendukung UMKM? Simak selengkapnya dalam wawancara bersama Syafridi, Direktur SMI.

dan evaluasi pelaksanaan program tersebut. SIKP tidak hanya digunakan oleh Kementerian Keuangan, tetapi juga oleh Kementerian/Lembaga, Pemda, dan Lembaga Penjamin.

**Selama masa Pandemi Covid-19 sejak tahun 2020, UMKM merupakan pihak yang paling terdampak. Apa sajakah dukungan-dukungan bagi UMKM selama masa Pandemi yang telah dilakukan oleh Direktorat SMI?**

Salah satu program pendukung PEN, yaitu program subsidi bunga/subsidi margin dalam kerangka pemulihan ekonomi nasional yang merupakan bagian dari kluster dukungan bagi UMKM, dilaksanakan oleh Direktorat SMI, Kementerian BUMN, dan Kementerian Koperasi dan UKM.

Subsidi bunga/subsidi margin dalam rangka PEN diberikan kepada UMKM, tujuannya meringankan beban UMKM dengan keringanan pembayaran bunga. Sebagaimana kita ketahui saat pandemi Covid-19, dengan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), UMKM kesulitan mendapatkan penghasilan karena adanya pembatasan mobilitas masyarakat. Hal ini tentu menyulitkan UMKM yang memiliki pinjaman untuk membayar kembali pinjamannya, dan dikhawatirkan akan timbul *non-performing loan* (NPL) atau tingkat kredit macet yang tinggi. Hal ini selanjutnya dapat menyulitkan UMKM tersebut ketika akan meminjam kembali. OJK merespon dengan memberikan relaksasi kepada UMKM, diberikan restrukturisasi, dan Pemerintah dengan program PEN memberikan fasilitas dengan subsidi bunga/subsidi margin.

Selama tahun 2020, subsidi bunga berhasil disalurkan kepada lebih dari 8 juta debitur pada 874 lembaga penyalur dengan total realisasi anggaran sebesar Rp3,35 triliun. Program subsidi bunga ini kembali dilanjutkan di tahun 2021, dan telah berhasil disalurkan Rp5,02 triliun serta menjangkau lebih dari 7,2 juta debitur.

Melalui program subsidi bunga ini, diharapkan para pelaku UMKM dapat terbantu bebannya dari sisi pembayaran beban bunga yang harus dibayarkan oleh pelaku UMKM dan dapat menekan NPL kreditnya.

**Bagaimana perjalanan penyaluran pembiayaan kepada UMKM selama masa pandemi, khususnya dalam**

**mendukung pemulihan ekonomi nasional? Apa saja tantangan yang ditemui dan apa solusinya?**

Penyaluran kredit selama pandemi memang sedikit mengalami kendala, karena pihak Penyalur Kredit baik pihak perbankan pada penyaluran KUR, maupun pihak LKBB pada penyaluran Pembiayaan UMi, menjadi lebih hati-hati dalam menyalurkan kredit untuk mencegah naiknya tingkat NPL. Namun, dibantu dengan sinergi berbagai program yang ditujukan bagi UMKM selama periode pandemi, kami masih melihat adanya tren peningkatan jumlah KUR maupun Pembiayaan UMi yang disalurkan selama pandemi.

Hal ini menunjukkan tingkat resiliensi atau daya tahan UMKM yang memang sudah terbukti berhasil melalui berbagai krisis yang menerpa Indonesia. Meskipun krisis akibat pandemi ini lebih terasa apabila dibandingkan dengan krisis-krisis sebelumnya, tetapi UMKM Indonesia memang sudah terbukti tangguh dalam menghadapi krisis-krisis yang datang. Dengan adanya kemudahan-kemudahan yang diberikan seperti subsidi bunga dan restrukturisasi pinjaman, program seperti KUR dan Pembiayaan UMi masih menjadi pilihan bagi UMKM untuk *bounce back* dari kondisi keterpurukan menuju pemberdayaan diri dan keluarga melalui kegiatan usaha produktif.

**Program pembiayaan yang dikelola Direktorat SMI menasar UMKM. Apa yang sebenarnya ingin dicapai dari program-program tersebut?**

Melalui program seperti KUR dan Pembiayaan UMi, yang disasar oleh pemerintah adalah peningkatan daya saing UMKM di Indonesia melalui penyediaan akses permodalan untuk pengembangan usaha. Program KUR memberikan akses dukungan permodalan yang disalurkan oleh perbankan, beberapa perusahaan pembiayaan, dan koperasi, dengan suku bunga yang terjangkau yaitu sebesar 6%. Melalui program KUR juga, pemerintah memberikan imbal jasa penjaminan yang membuat debitur KUR pada skema mikro, tidak wajib menyediakan agunan tambahan untuk mendapatkan pinjaman.

Sedangkan pada program Pembiayaan UMi, Pemerintah ingin memberikan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM yang selama ini tidak terjangkau oleh program-program yang telah ada sebelumnya. Pembiayaan UMi juga menjadi jembatan bagi warga masyarakat yang sebelumnya menerima program bantuan sosial dan ingin belajar memulai usaha kecil-kecilan dengan plafon pembiayaan sampai dengan Rp20 juta serta dengan proses yang mudah dan cepat. Pembiayaan UMi diharapkan akan dapat membangkitkan kelompok masyarakat prasejahtera untuk mulai memberdayakan diri dan keluarganya melalui usaha produktif yang disertai dengan adanya program pendampingan yang wajib dilakukan oleh Penyalur Pembiayaan UMi. Hal ini bertujuan agar Debitur Pembiayaan UMi mulai belajar untuk menumbuhkembangkan usahanya dan diharapkan akan dapat naik kelas baik usahanya maupun kesejahteraannya, hingga dapat mengakses program pembiayaan yang lebih tinggi seperti KUR maupun kredit komersial.

**Seperti apa rencana Direktorat SMI ke depannya untuk makin mewujudkan kehadiran pemerintah dalam meningkatkan daya saing UMKM?**

Direktorat SMI sebagai instansi kantor pusat akan melakukan sinergi pemberdayaan UMKM dengan penyalur KUR dan BLU PIP. Program pemberdayaan UMKM nantinya akan dilaksanakan

juga bersama dengan instansi vertikal DJPb di seluruh Indonesia. Tujuan dari program pemberdayaan UMKM adalah pemberdayaan untuk debitur KUR agar dapat meningkatkan usaha dan naik kelas. Kami juga menasar UMKM yang belum mendapatkan KUR untuk mengikuti program pemberdayaan UMKM dengan melakukan sosialisasi dan pendampingan tentang keuangan dengan tujuan mendorong inklusi keuangan.

Berkolaborasi dengan BLU PIP, akan dilakukan juga pelatihan dan pemberdayaan bagi debitur Pembiayaan UMi, penyalur potensial, dan pengembangan rumah UMi. Tujuannya adalah untuk mendorong peningkatan usaha debitur UMi, mendukung UMi naik kelas, dan mengembangkan ekosistem UMKM di wilayah.

Saat ini, kami sedang menyiapkan petunjuk teknis yang akan menjadi panduan bagi instansi vertikal DJPb, khususnya pada Kanwil DJPb untuk melakukan berbagai program yang mengarah pada peningkatan daya saing UMKM, mulai dari pelaksanaan kegiatan pendampingan sampai dengan kurasi calon penyalur potensial untuk dapat memperluas jangkauan program pembiayaan UMi.

Melalui sinergi nasional ini, besar harapan kami bahwa keberadaan Kementerian Keuangan melalui instansi vertikal DJPb di daerah akan semakin terasa dalam pemberian dukungan bagi UMKM.

**Apa harapan Bapak terkait program Kemenkeu Satu untuk UMKM yang saat ini dibangun di Kementerian Keuangan?**

Kemenkeu Satu yang saat ini sedang digagas di tingkat Kementerian Keuangan tentu akan memberikan suatu harapan baru bagi sinergi kegiatan-kegiatan yang selama ini dikelola oleh masing-masing eselon I. Ada program seperti *Business Development Services* (BDS) milik Ditjen Pajak, Klinik Ekspor milik Ditjen Bea dan Cukai, sampai dengan *marketplace* lelang *online* milik DJKN. DJPb sendiri juga tak mau kalah. Kita punya program Pembiayaan seperti Pembiayaan UMi dan KUR, sampai dengan *marketplace* belanja Pemerintah Digipay yang dikelola oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara (PKN).

Melalui Kemenkeu Satu, program-program ini bisa diklasifikasikan menjadi Program yang berorientasi pada penyediaan aspek permodalan melalui Pembiayaan UMi dan KUR, penyediaan pendampingan melalui program BDS dan klinik ekspor, sampai dengan penyediaan akses pemasaran melalui lelang *online* dan Digipay. Sinergi ini diharapkan akan dapat diterapkan hingga ke level daerah oleh instansi vertikal masing-masing. Sebagai contoh yang sudah pernah kita terapkan adalah sinergi antara Kanwil DJPb dan KPKNL di lingkup Provinsi Maluku Utara untuk pengadaan Rumah UMi. Program-program yang mengedepankan sinergi seperti inilah yang kami harapkan akan dapat semakin banyak ke depannya dengan adanya program Kemenkeu Satu. Pada muaranya, program ini diharapkan akan dapat mendukung peningkatan daya saing UMKM di Indonesia sebagai tulang punggung perekonomian.

*Teks: Normalita Safitri (Direktorat SMI)*



## Direktur SITP: SIKP Mobile Upaya Mudahkan Debitur KUR Makin Berdaya

Untuk menjaga efektivitas penyaluran kredit program serta untuk meyakinkan agar subsidi yang diberikan tepat sasaran dan tidak tumpang tindih, Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara mengembangkan sistem informasi terintegrasi yang disebut Sistem Informasi Kredit Program (SIKP). Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi ketika penatausahaan penyaluran KUR yang masih dilakukan secara manual. Sesuai dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan, DJPb selaku penyelenggara SIKP berinovasi untuk mendukung pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan mudah dan murah yang difasilitasi oleh pemerintah. Salah satu inovasi tersebut adalah SIKP Mobile. Apa latar belakang pengembangan SIKP Mobile dan apa manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaan aplikasi tersebut? Simak jawabannya dalam wawancara dengan Saiful Islam, Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan (SITP).

**Pada tanggal 31 Maret 2022, Dirjen Perbendaharaan telah melakukan soft launching SIKP Mobile. Apa perbedaan SIKP Mobile dengan SIKP versi sebelumnya?**

SIKP Mobile merupakan aplikasi yang ditujukan bagi penerima manfaat kredit program atau para debitur. Berbeda dengan aplikasi SIKP yang berfokus pada pengelolaan proses bisnis terkait KUR yang sasaran penggunaannya merupakan Penyalur dan Pemerintah, SIKP Mobile dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan sistem yang lebih *debitur oriented*.

Dengan adanya SIKP Mobile, debitur dapat memperoleh informasi terkait program pemerintah dalam pemberdayaan UMKM, melakukan perekaman data penerimaan/pengeluaran pada fitur Pembukuan sehingga debitur skala mikro memiliki catatan keuangan sederhana, mengetahui nilai subsidi yang diterima dari pemerintah melalui program KUR, serta melihat rincian informasi riwayat akad pinjaman dan transaksi angsuran hingga pelunasan bagi yang sudah menjadi debitur KUR. Aplikasi ini juga mempermudah proses pemenuhan modal usaha karena menyediakan informasi bank atau lembaga keuangan penyalur KUR dengan lokasi terdekat.

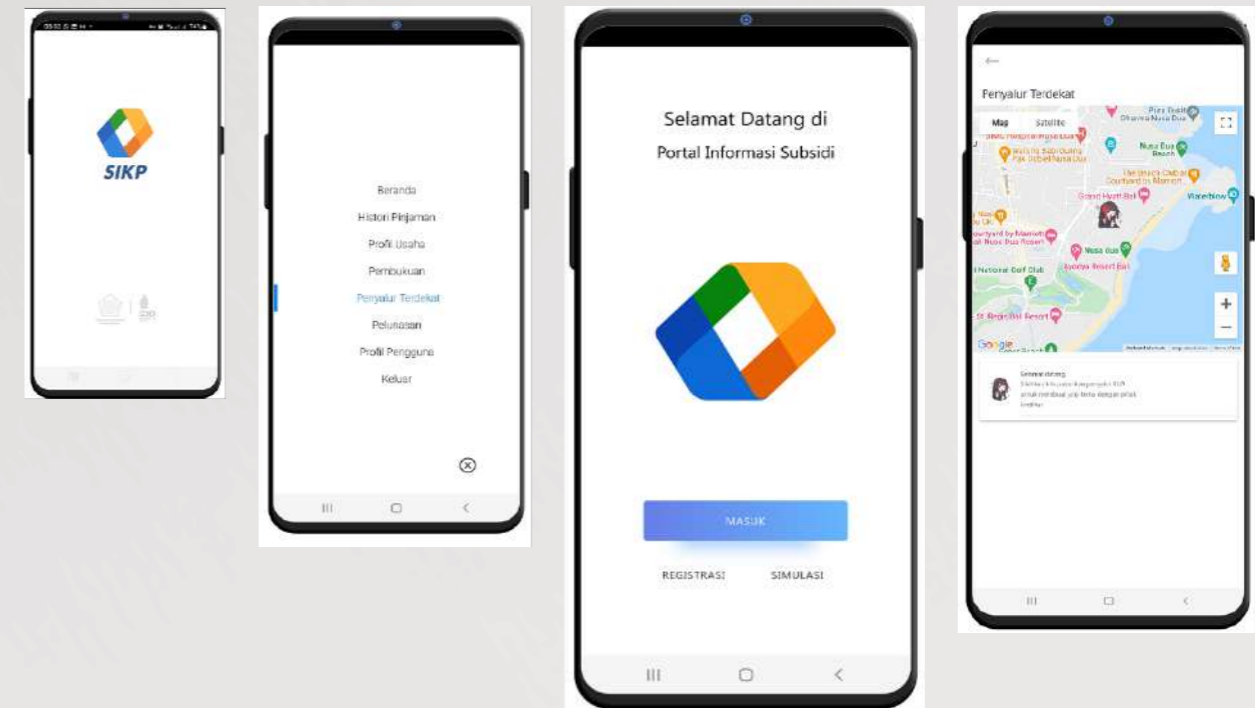
**Fitur-fitur apa yang dibangun di SIKP Mobile dan bagaimana debitur dapat memanfaatkannya?**

Fitur-fitur yang tersaji pada SIKP Mobile antara lain:

- **Beranda:** menyajikan rekapitulasi informasi pinjaman, baki debit, dan subsidi yang diterima oleh pengguna. Di menu ini tersedia laman simulasi, di mana pengguna dapat melakukan simulasi kredit yang akan menghitung perkiraan cicilan/angsuran bulanan serta estimasi nilai subsidi yang akan diperoleh masyarakat jika menggunakan skema KUR tertentu. Selain itu terdapat informasi "Tidak Membutuhkan Agunan Tambahan" untuk skema KUR Mikro.
- **Histori Pinjaman:** menyajikan informasi riwayat akad pengguna beserta angsurannya
- **Profil Usaha:** menyajikan informasi usaha pengguna yang dibiayai melalui kredit program
- **Pembukuan:** merupakan fitur pencatatan sederhana mengenai pendapatan dan pengeluaran usaha pengguna, berisi halaman yang dapat digunakan untuk mencatat arus kas masuk – keluar dan dapat digunakan untuk melihat berapa nilai penerimaan dan pengeluaran serta nilai omzet usaha.
- **Penyalur Terdekat:** menampilkan lokasi cabang penyalur terdekat yang menyediakan layanan pengajuan KUR.
- **Pelunasan:** menyajikan informasi terkait pelaporan pelunasan akad oleh pengguna
- **Profil Pengguna:** menyajikan informasi data pengguna yang terdaftar dalam SIKP Mobile

**Apa manfaat yang didapatkan oleh penyalur ketika menggunakan SIKP Mobile?**

Manfaat yang didapatkan oleh penyalur dengan adanya SIKP Mobile antara lain yaitu tersedianya fitur laman informasi penyalur yang berisi halaman



informasi Lokasi Penyalur KUR terdekat dengan pengguna. Fitur ini memanfaatkan Google Maps API serta dapat digunakan untuk mengatur jadwal temu dengan *Account Officer* (AO) bank atau lembaga penyalur. Selain itu, juga tersedia Laman Simulasi yang dapat digunakan pengguna maupun *non-registered user* untuk mencoba melakukan simulasi kredit. Fitur ini menjadi media publikasi layanan kredit yang mereka miliki.

**Melalui pengembangan SIKP Mobile yang berorientasi pada debitur dan calon debitur, kira-kira apa keuntungannya bagi pemerintah?**

Melalui SIKP Mobile, Pemerintah dapat melakukan monitoring perkembangan usaha debitur dan menyajikan informasi nilai subsidi yang diterima oleh debitur KUR. Informasi dari SIKP Mobile juga dapat digunakan sebagai basis *Data Analytics behaviour* debitur KUR maupun Pembiayaan UMi. Selain itu, SIKP Mobile dapat menjadi sarana publikasi pemerintah dalam program pemberdayaan UMKM.

**Dari fitur-fitur SIKP Mobile, kami membayangkan akan ada banyak data yang dikumpulkan. Kira-kira bagaimana pemanfaatan data tersebut?**

Dengan informasi yang disajikan oleh SIKP Mobile, pemerintah bisa mengetahui perkembangan usaha UMKM sehingga efektivitas penyaluran KUR dan ketepatan sarannya dapat diukur untuk dianalisis lebih lanjut. Informasi tersebut dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pemerintah pada program peningkatan pemberdayaan UMKM.

**Saat ini banyak sekali dibangun *superapp* seperti *e-wallet*, *digital banking*, *marketplace*, dan lain-lain. Apakah SIKP Mobile juga akan menjadi *superapp*? Jika ya, apakah ada kemungkinan SIKP Mobile juga mengintegrasikan layanan dengan pihak lain?**

Pengembangan SIKP Mobile untuk saat ini berfokus pada kredit program bagi UMKM dan UMi, walaupun di kemudian hari tidak menutup kemungkinan untuk melakukan integrasi sistem dengan pihak lain sebagai penunjang program KUR.

**Jika pembaca MTI ingin memanfaatkan SIKP Mobile, bagaimana caranya dan apa saja persyaratan yang dibutuhkan?**

Setelah *soft launching* pada tanggal 31 Maret 2022, implementasi SIKP Mobile akan dilakukan pada tahun 2022. Pengguna nantinya dapat mengunduh SIKP Mobile melalui App Store (iOS) dan Play Store (Android).

Teks: Hanafi Firdaus (Dit. SITP) dan Indra Yusak Ardianto (KPPN Nunukan)



## The Korea SMEs & Startups Agency, Berbagi Pengalaman dalam Pengelolaan Dukungan Pemerintah untuk UMKM

**K**orea Selatan merupakan contoh sebuah negara yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonominya dalam beberapa dekade terakhir sehingga mampu tumbuh dari sebuah negara *recipient* (penerima bantuan dari negara lain) menjadi sebuah negara donor (pemberi bantuan).

Salah satu resep pertumbuhan ekonomi Korea Selatan yaitu mendorong perkembangan UMKM menjadi perusahaan-perusahaan berskala internasional yang dimulai sejak tahun 1970-an. Salah satu instansi yang didirikan untuk pembiayaan UMKM yaitu Korea SMEs and Startups Agency (KOSME). KOSME merupakan sebuah instansi kuasi pemerintah Korea yang didirikan pada tahun 1979 dan memiliki tugas dan fungsi pembiayaan kepada UMKM dan perusahaan Startup di Korea.

Sebagai sebuah BLU di Korea, KOSME tergolong sangat maju dengan jumlah pegawai lebih dari 1000 orang dan cabang sebanyak 33 di seluruh Korea serta puluhan kantor cabang di luar Korea.

Pengalaman pembiayaan dan pemberdayaan UMKM yang dimiliki KOSME sangat layak untuk dipelajari dan di-*benchmark* oleh DJPb, khususnya untuk memberdayakan UMKM di Indonesia sehingga mampu tumbuh menjadi perusahaan kelas dunia nantinya.

Dalam upaya pengembangan UMKM di Indonesia, telah dilaksanakan pembicaraan pendahuluan mengenai rencana kerja sama antara DJPb dan KOSME. Salah satu pejabat tinggi KOSME yaitu Mr. Kim Moon Hwan, Vice President of KOSME pun telah berkunjung ke Direktorat SMI pada Selasa, 12 April 2022 untuk membahas mengenai rencana kerja sama ini. Di sela-sela kunjungan tersebut, kontributor MTI dari Direktorat SMI berkesempatan mewawancarai Mr. Kim Moon Hwan.

**Mr. Kim Moon Hwan, kami ingin mengetahui lebih lanjut mengenai KOSME. Apakah dapat dijelaskan secara singkat?**

The Korea SMEs & Startups Agency (KOSME) adalah organisasi nonprofit yang didanai oleh pemerintah pada tahun 1979, untuk menjalankan kebijakan dan program pemerintah untuk pertumbuhan dan perkembangan UMKM di Korea.

Untuk mencapai tujuannya, KOSME menjalankan program keuangan dan nonkeuangan. Melalui program keuangan, KOSME menyediakan pembiayaan bagi UMKM untuk meningkatkan kinerja operasional usahanya, mengembangkan produk baru, dan meningkatkan struktur bisnis mereka. Sedangkan program non-keuangan meliputi program bimbingan termasuk konsultasi, pelatihan, pemasaran, dan program kerja sama global. KOSME mendukung UMKM di Korea untuk meningkatkan daya saing global mereka.

**Ada banyak lembaga yang melakukan fungsi yang sama di Korea, seperti Bank atau Lembaga Keuangan Lainnya. Apa yang membedakan pelayanan KOSME dibandingkan dengan lembaga lainnya?**

KOSME berfokus pada peningkatan dukungan bagi UMKM dan perusahaan *Startups* melalui dukungan yang sesuai dengan tahapan bisnis dalam siklus pertumbuhan perusahaan mereka, termasuk pada fase *startup*, fase pertumbuhan, dan fase pertumbuhan kembali perusahaan-perusahaan tersebut.

KOSME berfokus memilih dan mendukung UMKM yang memiliki prospek untuk tumbuh menjadi perusahaan *blue chip* di masa mendatang, tetapi gagal mendapatkan pembiayaan usaha dari sektor keuangan swasta.

**Apakah KOSME juga beroperasi di negara lain?**

KOSME sudah mengoperasikan 20 KBDCs (Korea Business Development Center), 4 KSCs (K-Startups Center), dan 2 KDS (Korea Desk) di luar negeri. KBDC berfungsi mendukung perluasan ekspor UMKM dan program dukungan lokal yang memfasilitasi perluasan pasar dalam negeri di Korea. KSC berfungsi untuk keberhasilan globalisasi UMKM dan perusahaan *Startups* Korea di pusat inovasi dan kolaborasi internasional bersama dengan berbagai Venture Capital dan perusahaan inovator global di pasar luar negeri.

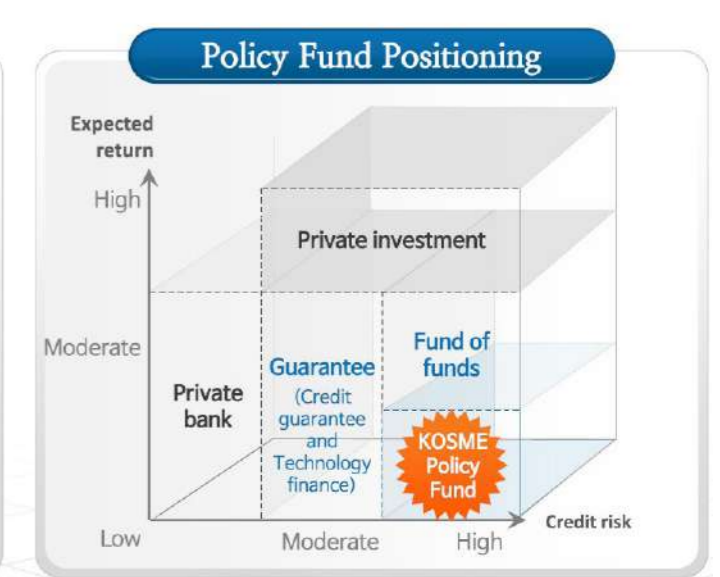
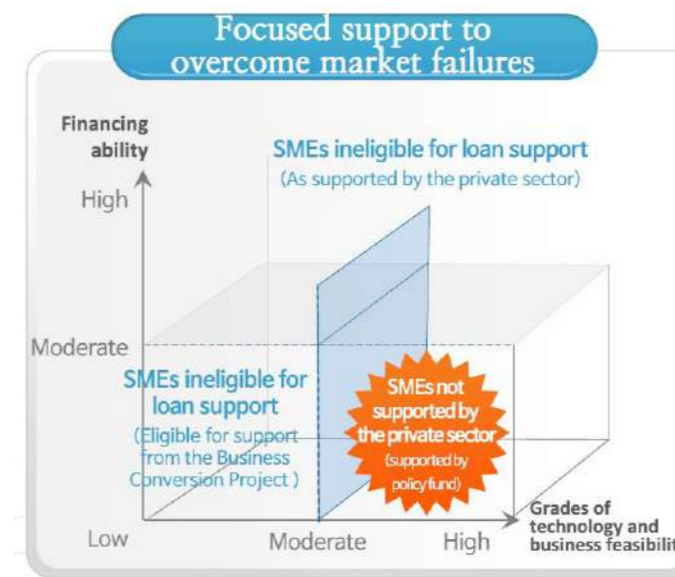
**Apakah ada kemungkinan bagi Indonesia untuk mendirikan lembaga yang fungsinya sama dengan KOSME? Apa saja pertimbangannya?**

Untuk mendukung perkembangan UMKM di Indonesia secara efektif, Indonesia juga membutuhkan organisasi

keuangan di kawasan ASEAN. Dapatkah dijelaskan lebih lanjut mengenai Integrasi Keuangan dari sudut pandang KOSME?

KOSME telah mengembangkan program dukungan keuangan, pengetahuan dan pengalaman untuk UMKM di Korea selama lebih dari 40 tahun. Jika diperlukan, kami dapat berbagi dengan negara-negara anggota ASEAN dan mentransfernya juga.

**Beberapa tahun yang lalu, KOSME memutuskan untuk menghentikan layanan Kredit Mikro. Apa pertimbangannya? Seperti yang diketahui, DJPb memiliki program untuk mendukung UMKM di Indonesia melalui Kredit Mikro (Pembiayaan UMi). Sebenarnya KOSME tidak berhenti memberikan dukungan kepada Usaha Mikro, tetapi kami mentransfer dukungan tersebut ke Lembaga yang baru didirikan yaitu The Small**



pendukung yang komprehensif seperti KOSME di Korea. Beberapa pertimbangan utama bagi Indonesia untuk mendirikan institusi seperti KOSME antara lain integrasi program pemberdayaan UMKM yang tersebar di berbagai institusi di Indonesia, pembentukan *Big Data*, pencegahan tumpang tindih program dukungan terutama dari sektor swasta, dan banyak hal lainnya.

**KOSME dengan beberapa institusi Korea saat ini telah bergabung ke dalam Financial Cooperation Centre, Republic of Korea (ROK) Mission to ASEAN. Apa tujuan utama didirikannya institusi ini?**

The ASEAN-ROK Financial Cooperation Centre (FCC) merupakan institusi yang berkomitmen untuk mendukung perkembangan keuangan dan pertumbuhan ekonomi di ASEAN melalui kerja sama yang erat di sektor keuangan dan meningkatkan kerja sama ekonomi melalui promosi investasi dan perdagangan.

**Salah satu peran FCC adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang menantang untuk mendorong integrasi keuangan melalui analisis dan diagnosis pada sektor**

Business Market Promotion Corporation (SBMPC). Dengan demikian KOSME berfokus pada program dukungan untuk UMKM dan perusahaan *Startups*, sedangkan SBMPC dapat berfokus pada pengembangan usaha kecil secara efisien.

**Bentuk kerja sama apa yang paling potensial antara DJPb dan KOSME untuk ke depannya?**

KOSME dan DJPb memiliki kebijakan dana sendiri untuk mendukung UMKM. Namun, perbedaan utamanya adalah KOSME memberikan pembiayaan langsung kepada UMKM, sedangkan DJPb memberikannya secara tidak langsung yaitu melalui agen penyalur. Jadi, bentuk kerja sama yang paling potensial antara DJPb dengan KOSME adalah sistem evaluasi yang andal dan beragam sesuai dengan jenis, ukuran, periode usaha berdasarkan akumulasi data UMKM, serta pengalaman langsung.

(Wawancara dilaksanakan dalam bahasa Inggris)  
Teks: Putut Yoga Prabowo, Direktorat SMI



# KUR: Bantu UMKM Bangkit, Topang Ekonomi Tumbuh

Oleh: Syaiful, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan

UMKM memberikan sumbangsih 61,97% bagi perekonomian nasional. Tingginya angka tersebut menunjukkan betapa sentral peran UMKM bagi perekonomian nasional. Penyerapan tenaga kerja dari sektor ini mencapai 97% pada tahun 2020. Mendekati sempurna, UMKM dapat dikatakan hampir “menyapu bersih” daya serap tenaga kerja nasional. Perkembangan yang pesat ini tidak terlepas dari peran pemerintah melalui Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang sudah dimulai sejak tahun 2007.

KUR adalah salah satu program pemerintah untuk meningkatkan akses pembiayaan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Guncangan ekonomi yang terjadi saat pandemi Covid-19 yang meluluhlantahkan berbagai sektor perekonomian tidak menyurutkan komitmen pemerintah untuk terus menjaga ketahanan dan kontinuitas UMKM. Bahkan di tengah lonjakan pengeluaran di berbagai bidang dan lesunya penerimaan negara, pemerintah justru menambah bantuan kepada sektor ini melalui tambahan subsidi bunga KUR pada tahun 2020.

Tidak berhenti sampai di situ, bantuan tambahan subsidi bunga KUR tersebut dilanjutkan pada tahun 2021 bahkan hingga tahun 2022 ini. Bunga pinjaman yang sebelumnya 6% pada tahun 2019 disubsidi menjadi 0% pada tahun 2020, kemudian menjadi 3% pada tahun 2021 dan 2022. Pemberian subsidi bunga KUR juga diharapkan lebih memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM untuk menjangkau permodalan dan memberi efek domino bagi pengembangan usahanya. Tentunya dengan bunga yang ringan akan mengurangi tingkat ketergantungan pelaku usaha terhadap pembiayaan tidak resmi seperti pinjaman ilegal (rentenir dan pinjaman online yang tidak terdaftar di OJK) yang bunganya acapkali memberatkan para pelaku usaha.

## Realisasi Penyaluran KUR Nasional dan Sulawesi Selatan

Total penyaluran KUR nasional pada triwulan I tahun 2022 mencapai Rp92,8 triliun. Sulawesi Selatan menjadi satu dari lima provinsi penyalur terbesar setelah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Sumatera Utara. Bahkan pada tahun 2021 lalu, Provinsi Sulawesi Selatan menempati urutan keempat sebagai penyalur KUR secara nasional. Pada periode Triwulan I Tahun 2022 ini, jumlah penyaluran KUR melalui bank dan lembaga penyalur lainnya adalah sebesar Rp4,46 triliun. Angka ini meningkat 42,37% dibanding triwulan I tahun 2021 lalu.

Secara keseluruhan, terdapat 103.070 UMKM di Sulsel yang menerima manfaat dari program ini dengan rata-rata besaran kredit sebesar Rp238 juta untuk KUR Kecil, Rp38 juta untuk KUR Mikro, dan Rp9 juta untuk KUR Super Mikro. Sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan menjadi sektor terbesar yang menerima penyaluran KUR di Sulsel dengan persentase mencapai 41,81% diikuti

## Survei yang dilakukan terhadap UMKM di Sulsel menunjukkan bahwa 75% responden merasa sangat puas atas program KUR. Kepuasan tersebut didasari oleh tingkat suku bunga yang tidak memberatkan.

sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 37,02%. Adapun sektor lain yang menjadi bagian dari penerima KUR adalah industri pengolahan, jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, jasa pendidikan, konstruksi, penyediaan akomodasi dan makanan minuman, perikanan, pertambangan dan penggalian, real estate, usaha persewaan, jasa perusahaan dan transportasi, serta pergudangan dan komunikasi.

## Dampak dan Keberhasilan Penyaluran KUR di Sulawesi Selatan

Pertumbuhan UMKM di Sulsel cukup pesat. Pada tahun 2019 jumlahnya mencapai 940 ribu unit usaha, kemudian tumbuh menjadi 1,2 juta unit usaha tahun 2020, dan menjadi 1,5 juta unit usaha tahun 2021. Angka tersebut akan terus meningkat seiring peningkatan jumlah penyaluran KUR dari tahun ke tahun. Hal ini merupakan bukti keberhasilan program KUR dalam meningkatkan aktivitas usaha. Pada sektor perekonomian, pertumbuhan ekonomi Sulsel mengalami rebound pada triwulan I 2022 sebesar 4,27% setelah sempat mengalami kontraksi sebesar -0,71% pada tahun 2020.

Survei yang dilakukan terhadap UMKM di Sulsel menunjukkan bahwa 75% responden merasa sangat puas atas program KUR. Kepuasan tersebut didasari oleh tingkat suku bunga yang tidak memberatkan. Tidak hanya itu, beberapa debitur bahkan ingin mencoba usaha baru apabila masih mendapat bantuan pinjaman. Program KUR yang dapat terus dilanjutkan, jangka waktu pinjaman

### Strengths

- Dukungan pemerintah melalui regulasi yang supportive
- Bonus demografi untuk mendukung UKM
- Jumlah UKM di Sulsel yang relatif banyak
- Pangsa pasar domestic yang besar

### Opportunities

- Potensi ekonomi digital yang besar
- Potensi pemasaran melalui e-commerce
- Fin Tech sebagai alternatif pembiayaan UKM di Sulsel

### SWOT

### Weakness

- Infrastruktur Infokom belum merata
- SDM UKM Sulsel dibidang teknologi masih relatif rendah
- Kualitas produk berkualitas ekspor masih rendah
- Daya saing relatif rendah
- Lemahnya database UKM Sulsel

### Threats

- Masuknya produk impor melalui ecommerce global
- Produk mudah ditiru karena rendahnya pemanfaatan hak paten
- Resiko dari penerapan green economy

agar diperpanjang serta penurunan tingkat suku bunga merupakan harapan dari para responden.

Dari segi proses bisnis, penyaluran KUR dapat membuka akses terhadap nasabah baru yang sebelumnya belum bisa dijangkau perbankan sehingga akan memperluas jaringan perbankan. Kepercayaan yang diberikan kepada bank sebagai lembaga penyalur juga akan menjaga iklim kerja sama yang baik antara bank dan pemerintahan. Namun, penyaluran KUR harus dilakukan dengan hati-hati agar mencegah potensi gagal bayar kredit (*non-performing loan*) mengingat nilainya yang cukup signifikan.

Keberhasilan dari program KUR menunjukkan konsistensi pemerintah dalam menjalankan amanah UUD 1945 Pasal 33 ayat 4 yang berbunyi “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.” Program ini adalah bentuk dari prinsip kebersamaan antara pemerintah, pelaku usaha, dan segenap pihak dalam mewujudkan UMKM sebagai bagian dari perekonomian nasional yang berwawasan kemandirian, berkelanjutan, dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**Potensi Peluang dan Tantangan Penyaluran KUR** Namun, keberhasilan penyaluran KUR kepada UMKM tidak terlepas dari permasalahan yang perlu menjadi *concern* pemerintah. Terdapat sepuluh permasalahan klasik UMKM yaitu modal; kurangnya pemahaman dalam meningkatkan skala bisnis; kurangnya inovasi produk; kesulitan dalam mendistribusikan produk; belum maksimal dalam pemasaran online; belum ada branding; belum melakukan program loyalitas pelanggan; pembukuan yang kurang baik; tidak memiliki mentor; dan belum memiliki izin usaha (Anas Iswanto Anwar, 2022). Sinergi dan harmonisasi kontribusi berbagai stakeholders diperlukan guna mengatasi permasalahan tersebut.

**Langkah Strategis Memaksimalkan Penyaluran KUR** Penyaluran kepada Pelaku UMKM diharapkan dapat dilaksanakan secara maksimal mengingat pelaku UMKM sangat terdampak pandemi Covid-19. Perlu langkah strategis dalam mengakselerasi hal tersebut.

Langkah tersebut antara lain: pertama Memperkuat basis data pelaku UMKM melalui peningkatan peran pemda dalam meng-update data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) yang sudah disiapkan oleh Kementerian Keuangan. Kedua, pemda diharapkan mampu merespons penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi, khususnya sektor informal atau UMKM yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja UMKM untuk pemulihan perekonomian di daerah. Berikutnya, meningkatkan peran TPAKD sebagai sarana inklusi keuangan dalam rangka memastikan ketersediaan akses jasa keuangan dengan mudah, murah, dan aman bagi pelaku usaha sekaligus masyarakat. Selain itu, melakukan pendampingan dengan pola hilirisasi pelaku UMKM sehingga mampu mandiri dari segi pembiayaan, branding produk, iklan, pemasaran, bahkan digitalisasi produk UMKM (melalui marketplace maupun Digipay Pemerintah). Selanjutnya, menciptakan kemudahan akses pembiayaan melalui penyaluran UMI oleh Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (BLU PIP) Kementerian Keuangan dengan syarat mudah *by name by address* hanya dengan e-KTP tanpa jaminan/agunan.

Harmonisasi kebijakan diharapkan dapat turut mendukung perkembangan dan akselerasi digitalisasi UMKM di Sulsel, memfasilitasi aktivitas ekspor, serta memberikan bantuan permodalan dalam bentuk program KUR. Kesuksesan KUR pada akhirnya diharapkan dapat menjadi *superpower* bagi UMKM agar terus menjadi pahlawan bagi perekonomian nasional. Sebagai penutup, marilah kita bergandengan tangan mengawasi penyaluran program ini agar tepat sasaran, efisien, dan efektif demi ikut menopang perekonomian nasional.



## Rumah UMi Dukung Geliat Ekonomi Maluku Utara

Oleh: Adnan Wimbyarto, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara

Dilansir dari data Kemenkop-UKM, jumlah unit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai Rp8.573,89 triliun. Dari data jumlah UMKM, ternyata 99,99% di antaranya merupakan usaha mikro. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar yakni sekitar 97% dari daya serap dunia usaha, serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi. Begitu pula halnya di Provinsi Maluku Utara (Malut). Dinas Koperasi dan UKM setempat mencatat, jumlah UMKM di Malut mencapai 105.000 unit usaha. Hanya 1.299 unit usaha yang tergolong usaha menengah, selebihnya merupakan usaha kecil dan mikro.

Banyaknya jumlah UMKM berbanding lurus dengan menyebarnya lapangan pekerjaan di Indonesia, sehingga UMKM memiliki andil besar dalam penyerapan tenaga kerja. Dengan demikian, UMKM menjadi pilar terpenting dalam perekonomian negeri ini. Mengingat peranannya dalam perekonomian, maka UMKM patut didukung agar dapat terus maju dan berkembang. Pergerakan dan aktivitas UMKM pun turut menentukan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah.

Bangkitnya UMKM di tengah maupun setelah hantaman dampak pandemi juga ikut mendorong pemulihan ekonomi nasional. Pulihnya perekonomian memerlukan dukungan dan sinergi dari berbagai pihak. Maka, tak hanya menjalankan tugas dan fungsi *as usual*, instansi vertikal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) khususnya Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara (Kanwil DJPb Malut) menginisiasi sejumlah kegiatan untuk membantu pengembangan UMKM setempat dengan mengembangkan model usaha baru bagi UMKM yakni "Rumah UMi".

### Sinergi Unit-Unit Kemenkeu

Wadah Usaha UMi atau yang dikenal dengan Rumah UMi tersebut telah menjadi ikon kebanggaan milik Kemenkeu di Provinsi Malut yang kini menjadi sebuah destinasi wisata kuliner yang menjajikan beragam makanan dari berbagai daerah di Indonesia. Jika kita berkunjung ke Kota Ternate, Provinsi Malut, tak lengkap rasanya jika belum singgah ke Rumah UMi. Demikian kata-kata promosi yang sering diucapkan oleh Direktur Rumah UMi Fitra Riadian kepada para pengunjung yang baru pertama kali menapakkan kakinya di Kota Ternate.

Berebak keinginan kuat para pimpinan unit instansi vertikal Kemenkeu di Malut untuk memajukan perekonomian

khususnya di Kota Ternate dan sebagai wujud kepedulian terhadap para pelaku UMKM di tengah tantangan pandemi, muncul inisiatif mendirikan sebuah wadah usaha bersama bagi para pelaku usaha kecil agar dapat bertahan dan mengembangkan usahanya. Bermula dengan adanya pandemi Covid-19, unit-unit Kemenkeu yang ada di Provinsi Malut berdiskusi bersama untuk dapat membantu para pelaku UMKM dari tekanan dampak pandemi.

UMi sendiri merupakan akronim dari Ultra Mikro. Karenanya, dilihat dari namanya "Rumah UMi", wadah usaha ini menyasar para pelaku usaha mikro. Sengaja dinamai UMi, sama dengan program UMi dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP), lantaran Rumah UMi bisa berdiri karena mendapat dukungan dana untuk pembuatan lapak dari PIP. PIP merupakan Badan Layanan Umum (BLU), organisasi non-eselon yang bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan. PIP bertugas menyalurkan pinjaman UMi dengan program pendampingan yang ditujukan bagi para pelaku usaha ultra mikro yang belum dapat mengakses pembiayaan perbankan. Maka, selain membantu pelaku usaha dari tekanan pandemi, Rumah UMi ini dibangun untuk memfasilitasi para pelaku usaha Ultra Mikro yang kesulitan mendapatkan tempat usaha dan pinjaman modal.

Dengan dukungan dana dari PIP untuk pembangunan, tempat dari optimalisasi lahan KPKNL Ternate, dan utilisasi oleh Kanwil DJPb Malut, maka dapat dikatakan Rumah UMi merupakan proyek bersama instansi vertikal Kemenkeu Malut yang memfasilitasi dan menempa pengusaha Ultra Mikro menjadi pengusaha yang mandiri dan tangguh. Di Rumah UMi, para pelapak bukan hanya bisa berjualan, melainkan juga dapat memperoleh informasi mengenai produk pinjaman yang mudah, cepat, dan bersahabat. Para pelaku juga akan mendapatkan pendampingan, pelatihan pemasaran, pelatihan keuangan sederhana, dan kiat-kiat bagaimana caranya meningkatkan usahanya.

Pembangunan Rumah UMi dimulai awal bulan November 2020 dengan peletakan batu pertama oleh Walikota Ternate. Rumah UMi resmi berdiri tanggal pada 7 Februari 2021 yang ditandai dengan *soft launching* oleh Kepala Kanwil DJKN Suluttenggamalut. Saat ini Rumah UMi dikelola oleh perwakilan seluruh instansi vertikal Kemenkeu yang ada di Kota Ternate, yaitu Kanwil DJPb Malut, KPPN Ternate, KPKNL Ternate, KPP Ternate, dan KPPBC Ternate. Manajemen Rumah UMi dibentuk melalui Surat Keputusan Kepala Kanwil DJPb Malut tanggal 28 Desember 2020 Nomor KEP-114/WPB.31/2020 tentang Pembentukan Panitia Pengurus *Pilot Project* "Rumah UMi" di Provinsi Malut. Tampak dari struktur

organisasi, para Kepala Kantor dan Kepala Bidang secara *official* menjadi Dewan Pembina Rumah UMi.

Target Usaha Rumah UMi adalah menghasilkan pengusaha yang naik kelas. Naik yang dimaksud adalah dari segi pendapatan yang diperoleh dari usahanya, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan para pelapak. Dalam jangka pendek, setidaknya omzet dari para pelapak yang ada di Rumah UMi meningkat, bisa digunakan untuk pegangan hidup dan dapat membuka usaha di tempat lainnya. Jika semula pelapak belum memiliki tempat usaha, kemudian bergabung dan mendapatkan lapak di Rumah UMi, maka diharapkan omzet mereka akan meningkat.

Peningkatan omzet pelapak di Rumah UMi bukan hal yang musykil dicapai. Beralamat di Jalan Yos Sudarso, Kampung Pisang, Maliaro Kota Ternate, Rumah UMi berada di tempat yang sangat strategis untuk pengembangan usaha. Letak yang berseberangan dengan minimarket, bersebelahan dengan KPKNL Ternate, dan dekat dengan perempatan jalan Maliaro menjadi nilai tambah tersendiri untuk kelangsungan usaha. Tak jauh dari Rumah UMi terdapat kompleks perkantoran dan perbankan yakni Bank Indonesia, KPPN Ternate, KPP Pratama Ternate, Kemenag Ternate, BPKAD Ternate, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Malut.



### Tak Sekadar Dukungan Modal

Sejak Rumah UMi berdiri, tercatat 16 pelaku usaha bergabung dengan Rumah UMi yang semuanya merupakan pengusaha Jasa Penyediaan Makanan Jadi. Pelapak di Rumah UMi dipilih melalui *open recruitment*. Seiring berjalannya waktu, jumlah pelapak di Rumah UMi mengalami penambahan dan pengurangan. Pada awal pembangunan, jumlah petak lapak yang ada di Rumah UMi sebanyak 14 petak. Satu petak digunakan untuk keperluan manajemen dan *entertainment*, sehingga lapak yang dapat dipakai usaha berjumlah 13. Kondisi per 30 April 2022, pelapak aktif berjumlah 12 dan 1 lapak kosong yang direncanakan digunakan oleh Universitas Khairun untuk mendidik dan melatih mahasiswa berwirausaha.

Adapun produk yang dijual oleh para pelapak di Rumah UMi antara lain tahu tuna & nasi ayam bakar, salad buah, sop konro, nasi kuning, lontong sayur, es kelapa muda dan es cinau, dimsum, *ricebowl* tuna, bubur ayam & nasi uduk, ayam geprek dan lalapan, nasi goreng, mie goreng/rebus, *cwie mie* Malang, masakan Padang, pisang lumpur, Kopi Kekinian, pempek, sate Padang, sate Garo, dan bebek RW. Fasilitas yang dimiliki Rumah UMi pun terbilang lengkap mulai dari *sound system*, toilet, hingga mushala. Bahkan di samping kiri Rumah UMi terdapat ATM BRI yang dapat digunakan masyarakat. Maka sangat tepat jika Rumah UMi dapat menjadi tujuan bagi pelancong yang ingin berwisata kuliner di Kota Ternate.



Guna pengembangan usaha di Rumah UMi, para pelapak mendapatkan bekal melalui pembinaan dan pendampingan khusus dari Kanwil DJPb Malut. Pembinaan dan pendampingan yang telah dilakukan terbagi menjadi edukasi dan pemasaran. Topik edukasi antara lain seputar penyaluran pembiayaan UMi bekerja sama dengan Pegadaian Ternate, juga pelatihan pembukuan sederhana (*sales report & cash journal*), pelatihan fotografi produk dengan *smartphone* di KPKNL Ternate, dan pelatihan pendaftaran di *marketplace*.

Pendampingan secara harian dilakukan berupa pemberian motivasi, diskusi mengenai strategi pemasaran, promosi, dan penentuan harga, serta membahas grafik penjualan secara *one-on-one*. Selain itu juga dilakukan rapat-rapat manajemen dengan para pelapak yang membahas masalah umum sehari-hari, seperti penghematan air, jasa keamanan/satpam, kebersihan, kebocoran atap, sekaligus untuk menjaga kekompakan antarpelapak dan antara manajemen dengan pelapak. Terbukti beberapa pelapak telah tercatat di *marketplace* dan bisa melakukan penjualan secara *online*.

Pembinaan pemasaran diberikan berupa pelatihan promosi pada media sosial, juga penerbitan *voucher* promosi kepada para mahasiswa yang melakukan bazaar dan untuk dua sekolah (SMA dan SMK 1 Ternate) saat kegiatan afirmasi STAN. Rumah UMi juga dijadikan tempat penyelenggaraan nonton bareng siaran langsung pertandingan olahraga seperti MotoGP dan sepak bola, kegiatan perpisahan, ulang tahun, arisan, sampai latihan zumba. Unit vertikal Kemenkeu di Malut pun ikut membantu agar usaha yang dirintis para pelapak di Rumah UMi mampu bertahan dan berkembang. Misalnya, dengan cara membantu meningkatkan omzet pelapak melalui order makanan untuk kegiatan seperti rapat atau menjamu tamu, membantu publikasi dan promosi pada media sosial masing-masing instansi, memberikan sumbangan peralatan seperti tempat sampah dan tempat tisu.

Tantangan utama yang dihadapi para pelapak adalah bagaimana agar usahanya dapat berkembang dan stabil. Dari data penjualan, terlihat rata-rata penjualan masih fluktuatif. Meskipun total omzet para pelapak di Rumah UMi mengalami peningkatan, tetapi peningkatan ini belum signifikan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pembinaan dan bimbingan dari manajemen masih terus perlu dilakukan. Kerja sama dengan pihak terkait seperti Dinas Pariwisata dan perguruan tinggi perlu juga segera direalisasikan programnya. Diharapkan, Rumah UMi benar-benar menjadi alternatif model usaha baru bagi pelapak sekaligus dukungan nyata kepada pelaku usaha dari pemerintah khususnya Kemenkeu.



## Penyempurnaan Kerangka Kerja Uji Dampak Pembiayaan UMi melalui Kerja Sama dengan Melbourne Microfinance Initiative (MMI)

Oleh: Rizky Novrianto, Kepala Seksi Analisa, Statistik, dan Penyusunan Laporan Keuangan, Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan

Uji dampak merupakan sesuatu yang krusial dan perlu ada, tetapi selama ini tampak terlupakan dari program-program pemerintah. Keberhasilan suatu program cenderung untuk dihitung dari seberapa mendekatinya dalam persen, jumlah yang direalisasikan dipadankan dengan jumlah yang direncanakan. Jika angka realisasi tersebut bisa makin mendekati angka 100%, tak pelak program tersebut akan dinilai sukses dan bisa saja mendapatkan *standing applause*. Banyak program pemerintah yang belum mengambil langkah *next-level* dengan mengukur dampak yang ditimbulkan di tingkat *end-user*, padahal analisis uji dampak ini merupakan *best-practice* dalam melakukan evaluasi terhadap suatu program, termasuk perbaikan kebijakan ke depannya.

Dengan menggunakan falsafah tersebut, Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) sebagai program pembiayaan yang menyediakan akses bagi pelaku usaha ultra mikro menempatkan uji dampak ini sebagai garda terdepan yang menjadi bagian dari evaluasi terhadap keberhasilan program. Melalui peraturan yang ditetapkan sejak Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 22 tahun 2017 yang kemudian digantikan dengan PMK Nomor 95 tahun 2018 dan terakhir Pembiayaan UMi diatur melalui PMK Nomor 193 tahun 2020, ketentuan terkait dengan Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan UMi merupakan sesuatu yang selalu ada dan mengalami perbaikan.

Untuk dapat mengevaluasi efektivitas program Pembiayaan UMi tersebut melalui suatu uji dampak, pemerintah

perlu mengukur sejauh mana program Pembiayaan UMi memberikan manfaat bagi debitur. Manfaat tersebut tidak hanya dinilai dari perkembangan usaha yang dibiayai, tetapi juga dampak yang dirasakan oleh debitur secara pribadi. Oleh karena itu, DJPb melalui Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 25 tahun 2018 mengatur petunjuk teknis untuk pelaksanaan uji dampak tersebut. Mekanisme Uji Dampak tersebut dilakukan dengan pendekatan pengukuran Nilai Keekonomian Debitur (NKD) yang terdiri dari Nilai Keekonomian Pribadi dan Nilai Keekonomian Usaha. NKD akan menjadi salah satu indikator yang digunakan pemerintah untuk mengukur dampak pelaksanaan Pembiayaan UMi. Indikator yang utamanya untuk mengukur tingkat keekonomian pribadi, dipilih berdasarkan pendekatan *multidimensional poverty index* yang mengukur tingkat kemiskinan dari berbagai faktor.

Pengukuran NKD tersebut dilakukan melalui pelaksanaan survei lapangan melalui pendekatan *baseline* dan *endline*, yang berarti bahwa terhadap debitur yang sama, dilakukan survei sebanyak dua kali yaitu pada saat awal menerima Pembiayaan UMi dan yang kedua adalah satu tahun kemudian atau pada saat pinjamannya telah dilunasi. Perubahan dari kedua nilai inilah yang menjadi nilai yang akan menggambarkan dampak dari program Pembiayaan UMi terhadap *end-user*-nya.

Pada tahun 2020, telah didapatkan hasil uji dampak pertama untuk program Pembiayaan UMi dengan membandingkan nilai *baseline* Semester II tahun 2019 dengan nilai *endline*

Semester II tahun 2019. Terdapat peningkatan positif pada NKD Pembiayaan UMi sebesar 1,17 poin. Hal ini menunjukkan bahwa untuk indikator yang digunakan, Debitur Pembiayaan UMi mengalami peningkatan positif pada saat akhir mendapatkan Pembiayaan UMi, dibandingkan dengan pada saat awal mendapatkan pinjaman.

Namun, berdasarkan kajian lebih lanjut, indikator NKD dalam Pembiayaan UMi memiliki keterbatasan dalam pengukuran seberapa besar dampak yang ditimbulkan dari pembiayaan tersebut. Peningkatan maupun penurunan NKD yang dihasilkan dari uji dampak ini belum dapat dikaitkan langsung dengan program Pembiayaan UMi itu sendiri, hasil tersebut masih bersifat korelasi dan bukan kausasi.

Peningkatan maupun penurunan NKD tersebut bisa jadi dipengaruhi oleh hal-hal eksternal seperti kondisi perekonomian, program-program pemerintah yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat, maupun program-program pemberdayaan UMKM lain yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga nonpemerintah. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengembangan atas kerangka kerja uji dampak yang digunakan, untuk dapat ditingkatkan agar bisa mengisolasi dan meminimalkan bias dalam menguji dampak yang ditimbulkan oleh program pembiayaan UMi serta memastikan tingkat atribusi program Pembiayaan UMi pada skor uji dampak yang dilakukan.

Upaya merevisi kerangka uji dampak Pembiayaan UMi dimulai pada tahun 2020, di mana DJPb, dalam hal ini Direktorat Sistem Manajemen Investasi (SMI) mendapatkan dukungan dari Melbourne Microfinance Initiative (MMI) dalam penyusunan kajian bersama untuk mengevaluasi dan memperoleh rekomendasi terkait metode pengukuran dampak yang saat ini digunakan dalam survei NKD. Kerja sama ini dapat terjalin berkat fasilitas Direktorat SMI.

MMI adalah organisasi pertama dan terbesar yang ada di University of Melbourne. MMI menyediakan layanan konsultasi terkait dengan produk *microfinance* secara sukarela (*pro-bono*). Jenis layanan konsultasi yang diberikan antara lain dalam area pengukuran dampak sosial dan pengembangan produk *microfinance*. Organisasi ini didirikan dengan tujuan membantu organisasi-organisasi menjawab tantangan terkait produk *microfinance*, sehingga memiliki dampak nyata pada peningkatan kehidupan masyarakat yang kurang mampu.

Kerja sama dengan MMI untuk pengembangan kerangka kerja Pembiayaan UMi ini berlangsung sepanjang tahun 2020 dengan hasil *output* kajian bersama dalam bentuk "*Final Deliverable Deck – UMi Financing Evaluation of Current Framework*". Beberapa hal yang menjadi fokus perhatian MMI adalah terkait dengan mekanisme uji dampak itu sendiri, bahwa kerangka kerja uji dampak eksisting masih belum menggunakan *control group* yang lazim digunakan dalam suatu uji dampak.

*Control group* atau kelompok responden pembanding ini penting untuk menjadi indikator nilai standar pada kelompok yang tidak mendapatkan *treatment*, dalam hal ini tidak mendapatkan program Pembiayaan UMi. Uji Dampak itu harus dilakukan terhadap kelompok yang mendapatkan Pembiayaan UMi dan juga terhadap *control group* sehingga dapat dilihat perbedaan perubahan nilai keekonomiannya pada kedua kelompok tersebut untuk kemudian dianalisis lebih lanjut.

Beberapa rekomendasi lain di antaranya terkait dengan penentuan jumlah sampel yang diarahkan kepada *proportional random sampling* yang memperhitungkan proporsi penyebaran Pembiayaan UMi per provinsi, kemudian terkait pembobotan skor NKD yang tidak merata, serta terkait dengan penambahan pengukuran terhadap tingkat inklusivitas keuangan Debitur Pembiayaan UMi yang diharapkan akan dapat naik kelas dan melek finansial.

Kerja sama antara DJPb dan MMI terkait pengukuran uji dampak Pembiayaan UMi tersebut berakhir pada November 2020, dengan ditandai penyampaian laporan dan juga pemaparan hasil kajian bersama oleh perwakilan MMI dalam acara "Workshop dan Pemaparan Uji Dampak Pembiayaan UMi" yang diselenggarakan Direktorat SMI pada tanggal 30 November 2020.

Untuk menindaklanjuti rekomendasi MMI tersebut, Direktorat SMI telah melakukan survei untuk menguji kuesioner dan kerangka kerja yang diusulkan oleh MMI kepada Debitur dan Penyalur Pembiayaan. Survei dilaksanakan terhadap 344 responden di 68 lokasi. Dari survei tersebut didapatkan bahwa responden memiliki persepsi yang baik terkait pengaruh perguliran Pembiayaan UMi terhadap perkembangan usaha, peningkatan terhadap kesejahteraan pribadi, dan peningkatan terhadap kondisi keuangan Debitur, sehingga ketiga indikator dalam NKD (Nilai Keekonomian Pribadi, Nilai Keekonomian Usaha, dan Nilai Keekonomian Inklusif) relevan digunakan sebagai indikator pengukuran dampak Pembiayaan UMi.

Sebagai tindak lanjut atas hasil kajian pelaksanaan kegiatan survei tersebut, Direktorat SMI telah mengkaji kembali kerangka kerja pengukuran uji dampak Pembiayaan UMi dengan melakukan revisi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-25/PB/2018 tentang Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan Ultra Mikro oleh Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Pada tanggal 26 April 2022, revisi atas Perdirjen Perbendaharaan nomor PER-25/PB/2018 telah ditetapkan dalam Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-6/PB/2022 yang mengakomodasi rekomendasi-rekomendasi hasil kajian bersama antara DJPb dengan MMI.

Agar dapat mengimplementasikan kerangka kerja pengukuran dampak Pembiayaan UMi secara lebih komprehensif, pada tahun 2021 Direktorat SMI melanjutkan kerja sama dengan MMI untuk mengkaji dan menyusun modul pelatihan uji dampak sebagai pedoman yang akan digunakan oleh instansi vertikal DJPb dalam pengukuran dampak Pembiayaan UMi. Tidak berhenti di situ, pada tahun 2022 kerja sama dengan MMI dilanjutkan kembali dan bahkan mendapatkan *upgrade*. Topik kajian untuk tahun 2022 terbagi dua yaitu terkait dengan pengembangan kerangka uji dampak untuk program Kredit Usaha Rakyat dan Pengembangan kerangka UMKM Naik Kelas.

Kerja sama yang baik antara Direktorat SMI dan MMI sejauh ini memberikan hasil yang positif bagi program-program terkait UMKM yang dilaksanakan oleh Direktorat SMI dan diharapkan akan semakin berkembang ke depannya untuk membantu pengambilan kebijakan-kebijakan dengan landasan kajian yang memadai.

**Disclaimer:** Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis, tidak merepresentasikan pandangan organisasi.





## Urgensi Debitur UMi Onboarding pada Ekosistem Super APP (Super App untuk Onboarding Ekosistem Ultra Mikro)

Oleh: Taufik Damhuri, Kasi Kredit Program dan Investasi Lainnya III, Direktorat SMI

memancing pelanggan, tak jarang toko tersebut sampai menurunkan harga menjadi sangat murah dibandingkan harga aslinya. Hal inilah yang menyebabkan banyak UMKM mengalami kerugian ataupun kebangkrutan.

Namun, hilangnya konsumen di pasar fisik, bukan berarti hilangnya tingkat *demand* dari konsumen sepenuhnya. Akibat pandemi, pasar fisik mengalami *shifting* menjadi pasar *online* yang mengurangi adanya transaksi fisik antara penjual dan pembeli. Kondisi ini mengakibatkan selama masa pandemi, transaksi *e-commerce* malah meningkat. Pada tahun 2020, Bank Indonesia mencatat peningkatan penjualan *e-commerce* 26%. Jumlah ini terus meningkat hingga 52% pada tahun 2021 sebagaimana terlihat pada laporan e-Conomy SEA 2021 yang disusun oleh Temasek, Google, serta Bain & Company.

Pandemi ini telah memberikan momentum akselerasi digitalisasi UMKM. UMKM perlu segera melakukan transformasi digital melalui *onboarding* produk dan layanannya di platform digital yang sesuai dengan karakteristik usahanya. Hal ini bertujuan untuk dapat mempertahankan bisnisnya dan malah dimungkinkan UMKM tersebut dapat menjangkau pasar yang lebih luas. *Chairman* Indonesia E-Commerce Association (idEA) Bima Laga merasa bahwa keikutsertaan UMKM dalam ekosistem pasar digital (*e-commerce*) akan menguatkan finansial dan daya saing mereka.

Karena kondisi di atas tersebutlah, Pemerintah merasa perlu menjadi akselerator bagi UMKM untuk masuk ke ekosistem

digital, di antaranya dengan menjadi fasilitator dalam basis data yang kuat, peluang untuk pelatihan, promosi, dan akses permodalan. Pada kondisi pra-pandemi, baru 2,7 juta UMKM yang *onboarding marketplace*. Melalui berbagai upaya kolaborasi dari para pelaku UMKM, Kemenkeu, Kemenkop

**Penelitian dari Sea Insights menunjukkan bahwa pendapatan rata-rata UMKM di Indonesia yang mengadopsi e-commerce meningkat lebih dari 160% dengan peningkatan produktivitas mencapai 110%. Pada masa pandemi ini, 45% pelaku usaha muda berjualan lebih aktif di platform e-commerce dan 1 dari 5 adalah pengguna baru e-commerce.**

UMKM, Kementerian BUMN, BI, OJK, pemda, Kemenbudpar/Bekraf seperti Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, dalam kurun waktu dua tahun pemerintah berhasil meningkatkan jumlah tersebut menjadi 17,2 juta pada akhir tahun 2021. Target berikutnya adalah sebanyak 20 juta pelaku UMKM dapat *onboarding* ke *marketplace* pada akhir tahun 2022, lalu meningkat menjadi 24 juta di 2023 dan 30 juta di 2024. Hal tersebut ditegaskan Presiden Joko Widodo, saat peresmian pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Transformasi Digital dan Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM 2022.

Penelitian dari Sea Insights menunjukkan bahwa pendapatan rata-rata UMKM di Indonesia yang mengadopsi *e-commerce* meningkat lebih dari 160% dengan peningkatan produktivitas mencapai 110%. Pada masa pandemi ini, 45% pelaku usaha muda berjualan lebih aktif di platform *e-commerce* dan 1 dari 5 adalah pengguna baru *e-commerce*. Namun, apakah segmen Usaha Ultra Mikro (UMi) sudah mampu *onboarding* dalam *marketplace* dan sudah merasakan peningkatan pendapatan ini, hal tersebut yang masih menjadi pertanyaan besar.

Diketahui, Usaha Ultra Mikro adalah usaha mikro yang dimiliki oleh orang perorangan yang menjalankan usaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meskipun tidak ada definisi yang eksplisit, Usaha Ultra Mikro selalu dipersepsikan sebagai usaha informal, yang dijalankan pengusaha tidak terdidik, bermodal kecil, menjual produk berkualitas rendah, untuk konsumen kelas bawah, dengan produktivitas rendah.

Secara definisi, Usaha Ultra Mikro berada di bawah kategori Usaha Mikro sebagaimana yang didefinisikan dalam PP Nomor 7 Tahun 2021 sebagai usaha dengan modal usaha paling banyak Rp1 miliar dan omset tahunan maksimal

Rp2 miliar. Sementara itu, dalam riset IDEAS, mereka mendefinisikan Usaha Ultra Mikro sebagai usaha di sektor perdagangan dengan kriteria usaha tanpa pegawai, tanpa lokasi usaha, tanpa kendaraan bermotor (motor-mobil), dan bukan merupakan distributor usaha besar.

IDEAS menemukan bahwa Usaha Ultra Mikro adalah pilihan ekonomi yang tak bisa dihindari untuk bertahan hidup untuk penduduk miskin kota, bukan sebuah jenjang karier menuju usaha besar-formal atau alternatif menunggu untuk pekerjaan di sektor formal dengan penghasilan tetap yang lebih tinggi. Melihat kondisi tersebut, tentu teknologi masih merupakan barang yang mewah bagi pelaku Usaha Ultra Mikro. Bahkan hasil survei BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP) menemukan bahwa penggunaan HP masih digunakan secara bersama-sama oleh seluruh anggota keluarga.

PIP adalah satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) di bawah DJPb Kementerian Keuangan yang mendapatkan tugas memberikan layanan dan menjadi koordinator pendanaan di bidang pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Sejak tahun 2017, PIP telah memberikan pelayanan dibidang pembiayaan usaha mikro yang dikenal dengan program Pembiayaan UMi (Ultra Mikro). Sampai dengan akhir Mei 2022 lalu, Pembiayaan Umi telah berhasil menjangkau 5,77 juta debitur dengan total penyaluran Rp19,48 triliun dari total alokasi APBN sebesar Rp10 triliun.

Dalam upaya melakukan transformasi digital para pelaku Usaha Ultra Mikro, BLU PIP telah melakukan berbagai upaya. PIP bekerja sama dengan LinkAja untuk penyaluran pembiayaan UMi secara *cashless* dan bekerja sama dengan Grab untuk membantu Debitur Pembiayaan UMi untuk *onboarding marketplace*. Namun demikian, hingga saat ini hasilnya belum dapat maksimal karena secara karakteristik skala usaha UMi yang terlalu kecil dan bersifat informal. Selain itu banyak usaha debitur UMi yang dilakukan sebagai pekerjaan sampingan.

Memperhatikan kondisi di atas, untuk dapat *onboarding* pada Ekosistem Super App, selain dukungan permodalan, pelaku Usaha Ultra Mikro membutuhkan program pendampingan lain yang dapat memperkuat kapasitas bisnis serta meningkatkan akses informasi. Karena untuk saat ini selain keterbatasan kemampuan dan fasilitas, produk mereka pun belum mampu untuk bersaing di pasar *e-commerce*. Untuk mengatasi hal ini, BLU PIP harus melakukan berbagai pelatihan bagi Debitur Pembiayaan UMi, sembari tetap melakukan berbagai program untuk penguatan ekosistem digital untuk mempermudah Debitur Pembiayaan UMi dalam melakukan transformasi digital.

**Disclaimer:** Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis, tidak merepresentasikan pandangan organisasi.

# Skema Subsidi Resi Gudang: Strategis Tapi Perlu Redesign

Oleh: Bachrul Ulum, Kepala Seksi Kredit Program dan Investasi Lainnya II,  
Direktorat SMI

Istilah Skema Subsidi Resi Gudang (SSRG) mungkin masih asing bagi kita. Bahkan, mungkin ini pertama kalinya pembaca mengenal istilah SSRG? Sederhananya, SSRG adalah fasilitas pembiayaan bersubsidi bagi petani yang disematkan pada Sistem Resi Gudang (SRG) atau fasilitas tunda jual atas produk hasil pertaniannya. Lalu, SRG atau fasilitas tunda jual itu apa? SRG merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi resi gudang. Muara dari proses tersebut adalah resi gudang yang dapat menjadi agunan untuk pengajuan pembiayaan/kredit. Target dari SRG/SSRG ini adalah sektor pertanian dalam arti luas (petani, koperasi, dan UMKM yang berkaitan dengan pertanian).

SRG/SSRG merupakan program yang strategis, karena didesain untuk membantu petani dengan memberikan akses pembiayaan (kredit) bersubsidi dengan agunan resi gudang atas komoditas yang disimpan. Lebih dari itu, diharapkan agar harga komoditas akan membaik pada saat jatuh tempo pinjaman tersebut. Sudah menjadi rahasia umum bahwa petani seringkali mengalami penurunan harga produk pada saat panen. Hal ini dikarenakan naiknya *supply* yang tidak diimbangi dengan kenaikan *demand* yang sepadan. Di sisi lain, petani juga perlu segera menjual produknya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, sekaligus modal untuk menanam kembali.

SSRG ini sebenarnya mirip dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dalam hal ini, Pemerintah hanya menyediakan alokasi dana subsidi yang saja, sedangkan dana pinjamannya bersumber dari Bank Penyalur. Besaran subsidi yang diberikan mengikuti KUR Kecil (5,5%), sedangkan tingkat bunga yang dibebankan kepada penerima SSRG juga 6%. Saat ini baru ada sembilan bank penyalur SSRG, sedangkan lembaga penyalur SRG secara keseluruhan melibatkan lembaga keuangan lainnya (Lembaga Keuangan Bukan Bank - LKBB). Hal utama yang membedakannya dengan KUR adalah target penerimanya dan keharusan adanya komoditas pertanian yang menjadi agunan atas pembiayaan SSRG.

## Penerapan SSRG

Pelaksanaan SSRG diatur dalam Permenkeu Nomor 187/PMK.05/2021 tentang Skema Subsidi Resi Gudang, menyempurnakan peraturan sebelumnya (Permenkeu Nomor 171/PMK.05/2009) yang sudah tidak *up-to-date* dengan kondisi saat ini. Namun, masih ada tantangan lainnya yang perlu dicarikan solusi.

Dari sisi kinerja penyaluran, realisasi SSRG tidak signifikan jika dibandingkan dengan skema subsidi lainnya, terutama KUR. Realisasi SSRG pada tahun 2021 hanya sebesar Rp48,5 miliar dengan realisasi subsidi hanya Rp324 juta, sedangkan realisasi pembiayaan KUR di tahun 2021 adalah sebesar Rp285 triliun dengan realisasi subsidi sebesar Rp26,8 triliun.

## SSRG adalah fasilitas pembiayaan bersubsidi bagi petani yang disematkan pada Sistem Resi Gudang (SRG) atau fasilitas tunda jual atas produk hasil pertaniannya."

Rendahnya penyaluran kredit dan subsidi itu disebabkan oleh banyak hal, baik dari sisi petani sendiri, penyalur, pengelola gudang, hingga lembaga-lembaga yang terkait. Namun, setidaknya ada dua hal yang patut mendapat perhatian khusus, yaitu fokus komoditas yang diresigudangkan dan pengelolaan gudang.

Pertama, dari sisi komoditas. Saat ini terdapat 20 komoditas yang dapat diresigudangkan sebagaimana ditetapkan oleh Kemendag, yaitu gabah, beras, jagung, kopi, kakao, lada, karet, rumput laut, rotan, garam, gambir, teh, kopra, timah, bawang merah, ikan, pala, ayam karkas beku, gula kristal putih, dan kedelai. Berdasarkan realisasi penerbitan resi gudang di tahun 2021, hanya sebagian saja dari komoditas-komoditas itu yang berjalan efektif, sedangkan sebagian lainnya tidak ada penyimpanan yang dilakukan oleh petani. Komoditas yang "tidak laku" itu di antaranya: kakao, karet, rotan, garam, gambir, teh, kopra, pala, gula kristal putih. Ini menunjukkan bahwa banyaknya jenis komoditas yang dapat diresigudangkan tidak berarti akan mendorong petani untuk mau menyimpan produknya di gudang SRG. Selain karena pengaruh pandemi Covid-19, terdapat pula kendala-kendala seperti pengetahuan petani yang kurang, biaya penyimpanan yang cukup besar, syarat kuantitas dan kualitas produk yang disimpan (uji mutu), dan juga lokasi gudang yang jauh.

Kedua, dari sisi gudang. Persoalan gudang juga menjadi hal yang menarik bila berbicara tentang SRG dan SSRG. Pertama, saat ini jumlah gudang SRG yang terdata bisa dibilang cukup banyak, yaitu 227 gudang. Namun, sebarannya masih jauh dari kata cukup untuk meng-cover seluruh wilayah Indonesia.



Dari jumlah itu, 123 gudang dibangun oleh Kemendag, sedangkan 104 lainnya Non-Kemendag yaitu dibangun oleh K/L lain, Pemda, atau swasta. Sayangnya, jumlah resi gudang yang terbit di tahun 2021 hanya sebanyak 623 resi, itu pun hanya diterbitkan oleh 58 gudang. Berdasarkan pendalaman informasi melalui uji petik dan FGD, ternyata memang masih banyak tantangan dari sisi pergudangan ini. Selain karena lokasi yang jauh, terbatasnya kapasitas pengelola gudang menjadi tantangan yang lebih besar.

Sebagian besar pengelola gudang tidak memiliki visi bisnis dan jiwa *entrepreneurship* yang memadai. Sebagai contoh, dalam proses penyimpanan produk di gudang ini terdapat peluang untuk meningkatkan nilainya yaitu dengan pemrosesan, misalnya dari gabah kering diolah menjadi beras siap konsumsi. Selain itu, pengelola gudang juga bisa melihat peluang dari sisi pemasaran, dengan menghubungkan petani selaku pemilik produk dengan *off taker*, supermarket, maupun pasar atau konsumen akhir. Pengelola gudang yang kompeten juga bisa menjadi agen yang memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai SRG/SSRG ini.

Tentunya masih ada tantangan-tantangan lain dalam implementasi SRG/SSRG ini, tetapi permasalahan komoditas dan pengelolaan gudang sudah cukup menjadi cerminan bahwa sistem yang sebenarnya strategis ini sedang "mati suri" dan memerlukan perbaikan yang fundamental, atau bahkan desain ulang. Pengkajian kembali atas komoditas yang dapat diresigudangkan perlu dilakukan agar dapat berjalan lebih baik. Salah

satu referensi yang dapat dijadikan contoh adalah Ghana, di mana SRG-nya hanya berfokus pada empat komoditas saja, yaitu: jagung, padi, kacang tanah, dan kacang. Keuntungan dari jumlah komoditas yang sedikit adalah bahwa sistem ini akan lebih masif digunakan oleh petani dan memungkinkan Pemerintah untuk melakukan stabilisasi bahan pangan secara lebih fokus. Pada saat SRG untuk komoditas tersebut telah berjalan efektif untuk komoditas yang ditargetkan, baru kemudian diperluas cakupannya ke komoditas lain.

Komoditas yang lebih fokus itu juga akan menguntungkan dari sisi pergudangan, di mana gudang-gudang yang ada akan difokuskan penggunaannya untuk komoditas tertentu tersebut. Tentunya, penambahan gudang dan pemerataan sebarannya juga masih diperlukan agar *coverage*-nya lebih luas. Selain itu, swastanisasi juga sangat diperlukan, baik dari segi kepemilikan gudangnya maupun pengelolanya yang lebih profesional. Hal ini akan lebih menguntungkan, terutama agar fungsi edukasi, pemasaran, dan peningkatan nilai produk yang disimpan semuanya berjalan lebih efektif dan efisien. Lebih jauh lagi, bila memungkinkan, maka pemanfaatan kerjasama dengan BUMN seperti Bulog juga perlu dijajaki kemungkinannya. Bahkan, mungkin cara ini akan lebih efektif? Bisa jadi.

**Disclaimer:** Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis, tidak merepresentasikan pandangan organisasi.



## Kisah Hujan Uang dan Pentingnya Inklusi Keuangan bagi UMKM

Oleh: Sintong Arfyansyah, pegawai Direktorat PPK BLU

Pemenang Pertama Lomba Menulis Hari Bakti Perbendaharaan 2022

Alkisah di sebuah negeri fantasi, hiduplah penjual bakso yang sedang putus asa bernama Budi. Jualannya sekarang tak lagi seperti dulu, karena kondisi ekonomi di negeri itu makin lesu. Di tengah rasa frustrasi, dia memohon kepada langit.

“Langit, bisakah kau turunkan hujan dengan uang? Aku ingin kaya tanpa bekerja,” mohon Budi kepada langit ketika perutnya masih kelaparan dan di saku celananya tidak ada lagi uang yang tersisa. Gerobaknya pun masih penuh bakso yang belum terjual sama sekali.

“Baiklah, aku akan turunkan hujan uang.”

Secara ajaib, langit tiba-tiba menjawab keputusan tersebut. Secepat kilat, rintik hujan pun berubah menjadi kertas uang bernominal seratus ribu rupiah. Uang tersebut beterbangan di segala dan berbagai tempat. Masyarakat loncat-loncat kegirangan sehingga berebutan mengambil uang yang melimpah di mana-mana. Ada yang tertumpah hingga menutupi air sungai, ada yang tercecer di jalanan dan menutupi genting rumah, hingga ada yang terenggok berantakan di sela-sela selokan.

Negara itu melimpah akan uang. Budi tersenyum bahagia dan bergegas membawa puluhan miliar rupiah yang ia dapat tanpa bekerja menjual bakso lagi. Dia ingin membeli segala kebutuhan di supermarket. Tetapi apa daya, supermarket itu tutup dan tidak melayani penjualan karena pemiliknya juga sudah kaya akan uang. Dia pun bergegas ke bank untuk menyimpan uang, tetapi bank di seluruh negeri tutup karena kewalahan menyimpan uang yang meluap-luap. Toko-toko kelontong hingga restoran pun tutup, karena khawatir dihabiskan oleh masyarakat dengan uang yang tak terbatas.

Budi pun akhirnya duduk di samping taman kota dengan hampa. Gerobaknya masih penuh sesak akan bakso yang telah basi. Tanah

yang diinjaknya saat ini ternyata masih meninggalkan sisa-sisa hamburan akibat hujan uang. Uang tidak lagi berharga, karena tidak ada lagi orang yang mencarinya.

Dia tertidur dan merasa kecewa. Saat ini uang yang dimilikinya tidak memberikan manfaat apa pun. Meskipun sakunya sekarang penuh akan uang, tetapi perutnya masih keroncongan.

### Hujan Uang bukan solusi

Kisah fiktif di atas adalah refleksi pengendalian kuantitas uang di sebuah negeri. Peningkatan kuantitas uang yang berlebihan akan menyebabkan inflasi atau kenaikan harga barang dan jasa. Seperti kisah Hujan Uang dalam cerita tersebut, uang yang banyak tidak dapat membeli barang-barang di supermarket karena harga barangnya meningkat luar biasa atau hiperinflasi.

Sebetulnya kita tak perlu pergi ke negeri fantasi untuk berimajinasi tentang hujan uang tersebut. Dalam kehidupan nyata, lihatlah bagaimana Zimbabwe mengalami hiperinflasi hingga 800% setiap bulannya hingga mata uangnya tidak lagi berharga. Masyarakat harus rela membawa uang dengan koper yang besar hanya untuk membeli satu mangkuk nasi. Itulah mengapa pengendalian kuantitas uang di sebuah negeri menjadi faktor krusial. Negara tidak perlu mencetak uang yang berlebihan hingga menurunkan hujan uang, karena kebijakan itu pasti tidak akan mengubah perekonomian, bahkan ketika langit memberikan itu secara percuma.

Hujan uang bukanlah sebuah solusi bagi dunia ini. Bukan kuantitas keuangan yang perlu ditingkatkan, melainkan kualitas keuangan yang perlu menjadi perhatian serius. Kualitas keuangan dapat tercermin dari peningkatan inklusi keuangan

atau kemudahan akses keuangan bagi masyarakat luas, tidak terkecuali bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia.

Menurut Bank Dunia (*World Bank*), peningkatan inklusi keuangan sebesar 1% dalam sebuah negara akan memberikan dampak pertumbuhan ekonomi sebesar 0,03% di negara tersebut. Hal ini memberikan perspektif bahwa inklusi keuangan adalah salah satu cara tepat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Peningkatan inklusi keuangan dapat dilakukan melalui berbagai cara, yaitu pemanfaatan digitalisasi, edukasi terhadap keuangan, penyediaan pembiayaan keuangan publik, pemetaan informasi publik, hingga peningkatan akses layanan jasa keuangan. Berbagai cara tersebut diupayakan agar inklusi keuangan di Indonesia semakin tinggi dan memenuhi target tingkat inklusi sebesar 90% di tahun 2024. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tingkat inklusi keuangan Indonesia berada di angka 76,19% tepat setahun sebelum pandemi atau tahun 2019. Dibandingkan dengan negara-negara Amerika Utara dan Eropa yang melewati angka 90%, tentu angka ini masih tergolong kecil.

### UMKM dan Inklusi Keuangan

Perekonomian Indonesia sangat bertumpu kepada UMKM. Di tengah pandemi yang menerpa, UMKM menghadapi ujian yang paling nyata dalam mempertahankan roda perekonomian negeri ini. Ketika krisis ekonomi 1998 terjadi, UMKM ternyata berperan sebagai aktor protagonis, menjadi pilar utama penyangga ekonomi waktu itu. Sehingga ketika ujian kembali menguji negeri ini, UMKM tetap menjadi garda terdepan dalam menetralkan gelombang resesi ekonomi akibat pandemi.

Menggerakkan UMKM serentak dalam meningkatkan inklusi keuangan, tentu menjadi hal yang cukup penting bagi perekonomian negeri ini. Terlebih, pandemi yang berlangsung saat ini semakin mempercepat transformasi digital bagi para pelaku ekonomi. Masyarakat dituntut untuk beradaptasi dalam penggunaan teknologi karena pembatasan secara fisik. Sehingga digitalisasi dalam setiap transaksi menjadi hal yang penting akhir-akhir ini, dan bukan hal yang dapat ditawar lagi.

Berdasarkan catatan Kementerian Komunikasi dan Informatika, jumlah UMKM yang terdigitalisasi sepanjang pandemi mencapai 16,4 juta atau tumbuh dua kali lipat dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi. Dalam perspektif data lain yaitu berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, pada bulan Maret 2021 jumlah UMKM mencapai 64,2 juta. Artinya masih banyak UMKM yang belum menikmati teknologi digital hingga saat ini. Masih banyak ruang kosong yang dapat diisi untuk mencapai target inklusi, sehingga peran pemerintah sebagai regulator maupun pendamping untuk meningkatkan digitalisasi UMKM sangat dibutuhkan.

### DJPb dan Perannya dalam Meningkatkan Digitalisasi UMKM

DJPb) sebagai bagian dari Kementerian Keuangan mempunyai peran strategis dalam menjalankan program-program pemerintah seperti perumusan kebijakan, penyaluran, hingga monitoring dan evaluasi terhadap UMKM. Program DJPb yaitu pembiayaan Ultra Mikro (UMi) melalui BLU Pusat Investasi Pemerintah, turut berperan dalam mengembangkan ekosistem digitalisasi keuangan untuk mencapai target inklusi keuangan yang makin menantang.

Sebagai informasi, sejak UMi diluncurkan pada tahun 2017, program ini mampu membiayai 5,4 juta pelaku usaha ultra mikro dengan total penyaluran sebesar Rp18,2 triliun hingga Februari tahun 2022. Program tersebut selain menyalurkan dana kepada pelaku usaha ultra mikro, juga disertai dengan pendampingan dan bantuan agar usaha tersebut siap menghadapi era digitalisasi.

Digitalisasi merupakan salah satu strategi untuk membawa unit usaha ini lebih dekat kepada peningkatan inklusi keuangan. Digitalisasi memberikan kemudahan terhadap akses keuangan sehingga target peningkatan inklusi hingga 90% pada tahun 2024 menjadi target yang realistis, sekaligus menyusul pergerakan modern negara-negara maju.

### Peningkatan Inklusi Keuangan sebagai Sebuah Solusi

Saat ini kita sering melihat gambar kode QR di toko kelontong, kantin, hingga pasar rakyat. Gambar tersebut tertempel di kaca, meja, ataupun etalase lapak para pedagang. Untuk membayar, kita tidak perlu merogoh saku dan ribut dengan pedagang terkait uang kembalian yang “endingnya” adalah permen juga. Tinggal buka *smartphone*, melakukan *scan* kode QR, maka kita dapat membeli apa pun sesuai dengan isi dompet digital yang kita punya.

Ini adalah bukti bahwa masyarakat Indonesia mulai terdigitalisasi. Ini adalah fakta bahwa masyarakat kita perlahan mampu beradaptasi dengan pandemi. Tentu kita tidak dapat berdiri tanpa dukungan pemerintah untuk dapat membentuk ekosistem ini. Masih banyak peluang dan momentum yang harus dimaksimalkan untuk meningkatkan peran vital UMKM di negeri ini. Masih banyak, jutaan UMKM yang menunggu perubahan untuk lebih dekat kepada era inklusi keuangan.

Pemerintah juga perlu beradaptasi agar mampu memberikan regulasi dan kebijakan yang ramah akan digitalisasi dan tetap menjaga birokrasi. Sehingga bukan “hujung uang” yang dibutuhkan oleh negeri untuk kembali sejahtera, melainkan semangat akselerasi kegiatan ekonomi melalui inklusi keuangan. Bukan kuantitas beredarnya jumlah uang, tetapi kualitas dalam kemudahan akses keuangan yang perlu ditingkatkan.

Maka dari itu, kisah fiktif di bagian awal tulisan ini perlu diperbaiki. Tinggal pasang kode QR di etalase gerobak bakso dan mendapatkan penyaluran kredit ringan dari program UMi, Bakso Budi dapat kembali laris dengan digitalisasi dan kemudahan akses keuangan. Logo dan gerobak Bakso Budi pun bisa dibuat kekinian untuk menarik perhatian masyarakat milenial. Kemudian dengan bantuan media sosial dan *online marketplace*, Bakso Budi dapat diperkenalkan hingga seluruh pelosok negeri fantasi.

Permohonan Budi perlu diluruskan agar relevan dengan kondisi saat ini, sehingga tidak hanya sebagai cerita fiktif tiada guna, tapi kisah logis sarat makna.

“Langit, bisakah kau tingkatkan digitalisasi dan kemudahan akses keuangan negeri ini? Aku ingin kaya dengan bekerja.”



## Scale up or Diversify? (Strategi Opsi Portfolio UMKM setelah Pandemi)

Oleh: *Betrice Mega Maria Pakpahan dan Ariefka Adi Darmawan Kargi, pegawai KPPN Pekanbaru*

**Pemenang Kedua Lomba Menulis Hari Bakti Perbendaharaan 2022**

**M**elihat peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian Indonesia saat ini, berbagai argumen berkembang dan sering menjadi bahan perdebatan di media massa maupun media sosial khususnya terkait durabilitas UMKM dalam menghadapi pandemi Covid-19. Beberapa argumen mengatakan sebagian besar UMKM sangat rentan dan sangat keras terdampak oleh pandemi. Hantaman tersebut juga perlu diperhatikan secara spesifik dengan melihat potensi dan strategi *recovery* yang dibutuhkan UMKM setelah pandemi. Durabilitas UMKM kondisi saat ini juga oleh berbagai pengamat tidak sama dengan kondisi pada tahun 1997. Oleh karena itu, pemilihan strategi opsi portfolio UMKM harus spesifik dan implementatif. Tulisan ini akan membahas Strategi Opsi Portfolio UMKM dalam meningkatkan kekuatan kapitalisasi UMKM dan posisi pemerintah dalam memastikan peran maksimal UMKM setelah pandemi.

OCBCNISP (2021) menggambarkan bahwa UMKM dapat melakukan sebelas langkah strategis dalam melakukan *scale up*, yaitu *review* perkembangan bisnis selama ini, analisis keunggulan dan kelemahan produk, ketahui letak masalah bisnis, buat solusi pemecahan masalah, analisis kompetitor saat ini, perbaiki strategi *marketing*, riset target pasar baru, perbarui kemasan dan iklan produk, lakukan kerja sama dengan bisnis lain, siapkan kondisi tidak terduga, serta eksperimen produk pada pasar. Namun demikian, strategi ini juga masih kurang memberikan secara spesifik UMKM dengan model seperti apa yang menjadi target solusinya. Apakah semua UMKM dapat mengaplikasikan dan dapat mendapatkan keuntungan yang ideal untuk meningkatkan kapitalisasi, tingkat pendapatan, serta jumlah karyawan UMKM?

Dilihat bahwa peningkatan kapitalisasi dan pendapatan tidak selalu memiliki korelasi dengan peningkatan jumlah karyawan, maka tulisan ini difokuskan pada strategi portofolio UMKM

berdasarkan strategi peningkatan kapitalisasi dan tingkat pendapatan UMKM. Selanjutnya, strategi portfolio baik itu melalui *scale up* atau *diversify* akan dilihat berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta bagaimana karakter pelaku industri berdasarkan tingkat dalam tingkat skala: usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah ([smartlegal.id](http://smartlegal.id), 2019)<sup>1</sup>. Selain itu, tulisan ini hanya difokuskan untuk sektor riil.

**Usaha mikro.** Beberapa karakteristik usaha mikro yaitu memiliki modal di bawah Rp50 juta, dengan omzet di bawah Rp300 juta, serta jumlah karyawan maksimal 10 orang. Dalam konteks industri sektor riil, usaha mikro biasanya memiliki komoditas yang tidak konsisten, tidak ada pencatatan keuangan, cenderung dimiliki oleh pelaku dengan literasi keuangan yang tidak memadai, usaha nonformal dan tidak memiliki akses keuangan pada sektor perbankan maupun nonperbankan, seperti pedagang kaki lima dan pedagang di pasar tradisional.

Dengan karakter usaha dan pelaku tersebut, maka dari perspektif industri, usaha ini sebaiknya tidak dikembangkan lebih besar, mengingat risiko apabila upaya untuk mendorong usaha mikro tersebut dikembangkan, tetapi pelaku industrinya tidak memahami risiko industri itu sendiri. Industri pada tingkat usaha mikro juga tidak ideal untuk dikembangkan karena secara prinsip usaha mikro sifatnya hanya untuk memenuhi kebutuhan lokal dan tidak disiapkan untuk proses bisnis dan administrasi yang cukup kompleks. Oleh karena itu, strategi portofolio untuk industri dalam kelompok usaha mikro sebaiknya dibuat sederhana mungkin, dengan kapitalisasi yang terkontrol.

Bagaimana dengan keputusan/kebijakan pemerintah untuk memberikan pinjaman Ultra Mikro (UMi) dengan bunga rendah yang selama ini diberikan dengan sangat terbatas antara Rp2-20 juta? Pemberian pinjaman ini sebaiknya hanya dibatasi sampai dengan pada tingkat ini dan pada periode tertentu. Salah satu

tujuannya adalah untuk menghindari bahwa para pemilik usaha tidak siap menghadapi potensi kelumpuhan usaha, khususnya peningkatan permintaan atas produk yang ditawarkan cenderung tidak lebih baik.

Jadi dapat diambil suatu strategi, apabila suatu usaha mikro dihadapkan pada kondisi untuk meningkatkan potensi *scale up* kapitalisasi atau *diversify* produk, maka pilihan *diversify* jauh lebih aman untuk menjamin kelangsungan usaha. Sebagai contoh, pedagang kaki lima yang biasanya target produknya adalah masyarakat dalam radius 1-2 kilometer dari lokasi. Kondisi pilihan strategi portofolio bisa berbeda, apabila produk dari usaha ultra mikro bisa dijual secara daring melalui berbagai *marketplace* yang tidak membutuhkan syarat administrasi dengan tingkat kompleksitas yang banyak.

Selain bantuan permodalan sebagaimana disebutkan di atas, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika masa pandemi dan setelah pandemi berakhir. Pertama, apakah industri dalam kelompok ini akan tetap dibutuhkan? Kedua, apakah usaha mikro tersebut pasarnya telah berubah dan tidak dibutuhkan? Ketiga, apakah anak milenial saat ini masih menginginkan market ini? Dari yang bisa dilihat dari berbagai ulasan, kelompok masyarakat ekonomi kecil tetap akan sangat membutuhkan usaha mikro. Namun demikian, jika pertumbuhan ekonomi Indonesia makin besar dan PDB Indonesia makin tinggi dengan rasio gini yang makin rendah, maka apabila ke depannya industri cenderung mengarah ke usaha formal, sebaiknya usaha mikro pertumbuhannya tidak menjadi subjek utama dalam kebijakan ekonomi Indonesia.

**Usaha Kecil.** Karakteristik usaha kecil mencakup modal yang mencukupi (Rp50 s.d 500 juta), dengan omzet Rp300juta s.d. Rp2,5 miliar. Karakteristik pelaku usaha kecil pada umumnya memiliki produk sudah tetap, pengetahuan administrasi dan laporan keuangan sudah baik walaupun sederhana, tetapi belum memiliki manajemen usaha dengan baik. Contoh usaha ini adalah pedagang grosir/agen, *travel agent*, usaha *laundry*, dan kuliner *homemade*. Kelompok industri ini sudah memiliki pasar yang lebih kompetitif, dengan produk lebih beragam daripada usaha mikro.

Pada kelompok usaha kecil, apakah strategi portofolio dengan *scale up* dan atau *diversify* perlu dilakukan secara hati-hati, sesuai dengan karakter produknya. Contoh, pedagang grosir yang tinggal di ruko dan berjualan kebutuhan pokok, maka skenario gabungan antara *scale up* dan *diversify* secara moderat merupakan salah satu pilihan yang paling tepat. Jika pedagang grosir melakukan *scale up* kapitalisasi secara besar-besaran dan produk jualannya di-*diversify* seperti toko modern, maka potensial risiko yang dihadapi adalah adanya kompetisi langsung dengan *retailer* yang memiliki *supply chain* yang lebih baik, seperti Alfamart atau Indomaret. Oleh karena itu, usaha kecil seperti pedagang grosir sebaiknya dikembangkan secara terbatas dan produknya di-*diversify* secara terbatas juga.

Berbeda dengan usaha kecil seperti usaha konveksi dengan produk yang memiliki potensi ekspor, seperti usaha konveksi yang selama ini ada di Bali. Usaha ini memiliki karakternya unik, di mana nilai produk bukan hanya semata-mata dihitung dari biaya produksi tetapi dari nilai seni dalam desain maupun produk akhir. Karena itu, sebaiknya terhadap usaha-usaha ini dilakukan *scale up* modal sehingga kemampuan ekspornya dapat digenjut, dengan produk akhir lebih diarahkan ke bentuk yang eksklusif, bukan makin beragam atau *diversify*. Untuk model usaha kecil seperti konveksi dengan orientasi ekspor, maka peran pemerintah adalah membuat kebijakan kemudahan ekspor

dengan administrasi yang lebih sederhana.

Bagaimana dengan bantuan permodalan untuk kedua contoh usaha kecil di atas? Pemerintah sebaiknya lebih konservatif dalam memberikan kebijakan fasilitas pinjaman. Untuk pedagang grosir dengan produk yang lebih beragam sebaiknya pemerintah memberikan fasilitas pinjaman standar bunga komersial, dengan rentang pinjaman yang lebih panjang, agar usaha kecil dapat tetap didampingi sampai usaha tersebut secara fundamental dapat lebih kuat. Untuk usaha kecil dengan tujuan ekspor, pemerintah lebih baik mengambil kebijakan untuk mengurangi rantai birokrasi dan mengurangi pajak ekspor dengan tetap memberi fasilitas permodalan yang lebih besar.

Dalam masa dan setelah pandemi, kelompok pada tingkat usaha kecil sebaiknya diproteksi dan dibantu secara masif baik dari sisi permodalan maupun pemasaran, mengingat saat ini negara-negara besar mengurangi produk-produk impor. Namun demikian, pemerintah juga perlu berhati-hati dengan kebijakan seperti ini. Ada kemungkinan tidak perlu “memaksakan” eksistensi usaha mikro tertentu setelah pandemi, khususnya usaha kecil yang telah digantikan atau pasarnya telah diambil oleh industri baru, seperti industri percetakan yang saat ini sudah memasuki masa jenuh.

**Usaha Menengah.** Usaha menengah dengan modal Rp0,5-10 miliar dan omzet mencapai Rp2,5-50 miliar, pada umumnya dengan karakteristik usaha yang telah memiliki kemampuan administrasi, memahami aturan, memiliki akses ke perbankan dan nonperbankan, serta SDM yang terlibat sudah memiliki kualifikasi yang standar. Model usaha menengah juga sudah mengadopsi model afiliasi para pemodal atau pemilik industri. Oleh karena itu, usaha pada kelompok menengah sebenarnya sudah sangat kompetitif karena pemain industri pada kelompok ini sudah terpetakan dengan jelas, di mana kelompok usaha ini bisa dikatakan merupakan kelompok usaha formal. Contoh usaha seperti ini adalah kelompok usaha konstruksi, konsultan, dan beberapa usaha yang telah memiliki cabang dengan jumlah terbatas.

Bentuk usaha lain dalam kelompok ini adalah *fashion product*, dengan berbagai barang tanpa label yang cukup dikenal. Peran pemerintah di level ini adalah melibatkan pelaku industri ikut pameran dengan fasilitas dari pemerintah, dan biaya pameran ditanggung pemerintah. Dibutuhkan *platform* yang menjadi tempat agar para pelaku industri bisa mendapatkan pasar yang lebih luas. Presiden telah melakukan hal ini untuk membantu label/*brand* lokal mulai dikenal di pasar domestik maupun internasional.

Bantuan permodalan untuk kelompok ini sebaiknya dibiarkan oleh pemerintah dengan mengikuti pasar, dan kebijakan hanya dikontrol untuk keringanan perpajakan saja seperti saat ini. Khusus untuk kelompok usaha menengah, yang paling penting adalah kesempatan untuk ekspansi, dengan simplifikasi administrasi usaha yang lebih mudah diakses. Portofolio yang lebih ideal untuk kelompok ini adalah mendorong lebih kuat akses keuangan untuk mendorong *scale up* kapitalisasi usaha, tetapi mengurangi diversifikasi portofolio untuk memastikan bahwa produk dari usaha menengah masih dapat diterima pasar.

Posisi *scale up* atau *diversify* tidak perlu segera didorong oleh pemerintah, kecuali memang usaha dimaksud sangat relevan dengan perkembangan zaman. Usaha konstruksi mungkin masih relevan pada masa yang akan datang, tetapi pemerintah perlu memastikan bahwa konstruksi mengadopsi teknologi yang lebih baik. Oleh karena itu, sebenarnya pemerintah perlu mendorong

1 <https://smartlegal.id/smarticle/2019/02/13/klasifikasi-ukm-dan-umkm-di-indonesia/>

research untuk membantu *competitive advantage* bagi para pelaku usaha menengah. Untuk permodalan, sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa afiliasi berbagai pemodal sangat sering dilakukan untuk kelompok ini, maka dorongan bantuan/subsidi modal pemerintah sebaiknya bersifat *on project base*. Jadi peran pemerintah dalam pengembangan usaha menengah sebaiknya fokus pada *research*, dan perbankan menjadi *financial advisor* untuk *scale up* dan atau *diversify* usaha menengah.

**Usaha Kreatif.** Usaha kreatif bisa saja dikelompokkan dalam kelompok UMKM sebagaimana pada kriteria UU Nomor 20 Tahun 2008. Permasalahannya, industri kreatif kadangkala pendapatannya sangat besar tetapi pekerjaannya sedikit, atau sebaliknya. Oleh karena itu, industri kreatif saat ini perlu ditangani lebih serius dengan perencanaan yang lebih baik dan bersifat jangka panjang. Permasalahan industri kreatif Indonesia (Tribunnews, 2019) mencakup banyak hal, antara lain masalah SDM yang berkualitas, pengetahuan kewirausahaan, literasi digital, dan akses permodalan. Selain masalah ini, masalah lain yang dihadapi (marketingcraft) adalah rendahnya apresiasi terhadap hasil karya dalam negeri dan kecenderungan masyarakat yang *"bule minded"*, sehingga produk dan jasa yang mengandung unsur luar negeri menjadi hal mewah dan membanggakan.

Selain yang disebut di atas, terdapat pula beberapa usaha kreatif yang langsung berkompetisi dengan pesaing internasional, seperti *content creator* dan *game maker*. Indonesia saat ini tidak memiliki platform yang kuat atau program jangka panjang yang mumpuni. Berbeda dengan Korea, negara ini memiliki cara, program, dan pembibitan yang jelas sejak lama. Oleh karena itu, untuk industri usaha kreatif, *scale up* atau *diversify* portofolio juga tepat selama ada program jangka panjang.

Pemerintah perlu terlibat di industri ini, tanpa hanya mengandalkan sektor swasta sendiri berkembang pada usaha kreatif ini. Program pemerintah juga jangan hanya didorong untuk melakukan *benchmarking* ke negara lain, karena karakteristik kreativitas itu sendiri bisa saja cukup berbeda antarnegara. Masa pandemi adalah masa yang tepat bagi Indonesia untuk dapat mengembangkan usaha kreatif, dan diharapkan lebih berkembang lagi pada saat setelah pandemi berakhir.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa portofolio UMKM dapat dilakukan *scale up* atau *diversify* sangat tergantung jenis bisnisnya. Perlu disadari, dinamika industri setelah masa pandemi juga bisa sangat berubah. Pemahaman semua pelaku industri pada semua level perlu dilakukan secara detail, termasuk keunggulan-keunggulan Indonesia saat ini. Peran UMKM masih besar dalam struktur ekonomi Indonesia ke depan. Namun, penanganan dan keputusan untuk mendorong suatu industri untuk dilakukan *scale up*, *diversify*, atau bahkan dihentikan perlu dilakukan secara cepat, tepat, dan fokus pada hasil. Melakukan *upgrade* sesuai dengan kebutuhan zaman adalah hal yang sangat krusial dilakukan, dan relevansinya dengan perkembangan zaman khususnya industri pada negara lain sangat vital.

## Sinergi DJPb dan BUMDes untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Pembiayaan UMi

Oleh: Sigid Mulyadi, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat  
Pemenang Ketiga Lomba Menulis Hari Bakti Perbendaharaan 2022

Soal kredit pinjaman usaha, orang pasti sudah familiar dan sering mendengar istilah KUR alias Kredit Usaha Rakyat. Selain karena KUR dibutuhkan oleh pelaku usaha, adanya pemberitaan media dan sosialisasi oleh pemma, pihak penyalur atau perbankan juga gencar menawarkan produk KUR lewat spanduk, *banner*, dan umbul-umbul KUR.

Tentu, yang bisa mendapatkan pinjaman KUR adalah pelaku usaha yang punya akses ke perbankan. Bisa karena memang rumahnya dekat dengan bank, punya rekening di bank, dan punya agunan pinjaman. Sangat beruntung mereka yang bisa memperoleh pinjaman KUR dengan bunga rendah hanya 6%, karena ada subsidi bunga dari pemerintah. Bahkan, baru-baru ini pemerintah memberikan insentif tambahan subsidi suku bunga KUR sebesar 3% yang rencananya diberlakukan hingga Juni 2022 (diperpanjang sampai Desember 2022-red). Artinya, nasabah KUR hanya membayar bunga 3%. Siapa yang tidak tergiur?

Lantas, bagaimana dengan nasib pelaku usaha yang tidak punya akses ke perbankan karena rumahnya jauh dari bank, tidak punya rekening bank, dan tidak punya barang yang bisa diagunkan? Artinya, mereka adalah para pelaku usaha yang sangat-sangat kecil alias ultra mikro. Masak mau dibiarkan saja, tidak dibantu? Tentu, pemerintah tidak tinggal diam. Pemerintah sudah memberikan solusi untuk permodalan mereka. Negara hadir untuk mereka.

Adalah Pembiayaan Ultra Mikro alias UMi, yang telah disalurkan pemerintah sejak tahun 2017. Untuk menangani program ini, Pemerintah telah membentuk satu lembaga Badan Layanan Umum (BLU), bernama Pusat Investasi Pemerintah (PIP).

Pembiayaan UMi merupakan program pemerintah yang menyediakan fasilitas pembiayaan bagi usaha ultra mikro yang belum dapat mengakses program pembiayaan dari perbankan. Artinya, mereka yang sudah mendapatkan KUR tidak bisa memperoleh kredit UMi.

Kredit UMi disalurkan dengan prinsip *empowering* dan *enhancement* melalui lembaga keuangan bukan bank (LKBB), seperti PT Pegadaian, PT Permodalan Nasional Madani (PNM), dan koperasi-koperasi atau lembaga keuangan mikro (LKM). Pemerintah tidak hanya menyediakan kredit produktif bagi usaha mikro, tetapi juga program pendampingan. Inilah yang membedakan dengan KUR dan menjadi kelebihan pembiayaan UMi dibandingkan kredit lainnya. Debitur UMi tidak dibiarkan begitu saja mengelola usahanya, tetapi diberikan pendampingan, pembinaan, dan diarahkan untuk bisa naik kelas dan dapat mengakses pembiayaan perbankan. Karena namanya juga ultra mikro, maka plafon kredit UMi pada awalnya paling tinggi Rp10 juta dan tahun 2021 dinaikkan menjadi Rp20 juta.

Berdasarkan data PIP, sejak tahun 2017 nilai penyaluran UMi tumbuh positif. Sebagai misal di Jawa Tengah. Meskipun jumlah debitur menunjukkan tren penurunan sejak tahun 2018 hingga 2020, tetapi nilai nominal penyaluran meningkat. Pandemi tahun 2020 telah memberikan dampak bagi penurunan jumlah debitur ini. Kemudian di tahun 2021, dengan situasi wabah yang mulai mereda, jumlah debitur UMi meningkat dari tahun sebelumnya diiringi dengan kenaikan angka nominal penyaluran. Artinya, makin banyak masyarakat yang bisa menikmati pembiayaan UMi ini.

Karena hadir di kalangan masyarakat bawah, maka program pembiayaan UMi ini memiliki potensi dan bisa diandalkan untuk turut mendukung program pemerintah dalam pengentasan dari kemiskinan.



Seperti kita ketahui, saat ini kemiskinan masih menjadi persoalan utama negara kita. Bahkan muncul apa yang disebut sebagai kemiskinan ekstrem.

Mari kita lihat data kemiskinan itu, sebagai contoh di Jawa Tengah.

Sebenarnya, persentase penduduk miskin di Jawa Tengah pada kurun Maret 2016 – September 2019 terus mengalami penurunan. Adanya

pandemi covid19- pada awal tahun 2020 berpengaruh terhadap angka kemiskinan yang terlihat dari kenaikan tingkat kemiskinan pada periode Maret 2020 disusul September 2020. Pada Maret 2021 angka kemiskinan kembali turun. Program bantuan sosial, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sangat membantu penduduk pada masa pandemi, terutama penduduk pada lapisan bawah sehingga dapat menurunkan tingkat kemiskinan.

Sebagai dampak pandemi, ternyata telah terjadi kemiskinan ekstrem di beberapa daerah di Jawa Tengah. Sebanyak 19 kabupaten menjadi prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem. Pada tahun 2021 lima kabupaten ditetapkan sebagai percontohan penanganan kemiskinan ekstrem di Jateng, yaitu Kabupaten Banyumas dengan tingkat kemiskinan ekstrem %6,83; Banjarnegara %7,23; Kebumen %7,68; Pemalang %9,52; dan Brebes %10,34, yang tersebar di 20 kecamatan.

Data-data di atas hanya contoh tentang apa yang terjadi dan

menjadi tantangan saat ini: kemiskinan. Lantas, apa yang bisa dilakukan Pemerintah melalui Program UMi?

Barangkali mengawinkan program UMi dan Dana Desa menjadi bagian dari salah satu solusi untuk menangani kemiskinan, terutama di pedesaan. Pengelolaan dana desa telah memungkinkan desa-desa mendirikan BUMDes. Selain untuk mendukung kemandirian desa dalam memperoleh pendapatan desa, BUMDes diharapkan menjadi bagian dari pemberdayaan masyarakat dan penggalan potensi di desa.

Unit usaha BUMDes dapat beraneka ragam sesuai dengan kondisi dan potensi di desa tersebut, termasuk unit usaha simpan pinjam. Program UMi bisa masuk ke sana, memperkuat permodalan BUMDes melalui kerja sama dengan PIP. Artinya, PIP menunjuk dan menetapkan BUMDes sebagai penyalur pembiayaan UMi, tanpa lembaga perantara, sehingga dapat menurunkan *cost* maupun tingkat bunga pinjaman UMi.

Diharapkan PIP memberikan kredit dengan bunga rendah kepada BUMDes, untuk mendorong kewirausahaan penduduk, sehingga penduduk memiliki penghasilan tetap. Adanya penghasilan tetap, maka akan menurunkan tingkat kemiskinan di desa.

Sebagai tahap awal, PIP bisa mengawali dengan *pilot project* pada beberapa BUMDes yang sudah bagus dan berkembang. Pemberdayaan BUMDes melalui program UMi ini, diharapkan kelak dapat menjadikan BUMDes sebagai mesin pertumbuhan ekonomi desa.

Kerja sama antara PIP dan BUMDes tidak saja terbatas pada penyaluran dana, tetapi lebih penting lagi adalah bagaimana memberikan pendampingan dan pembinaan kepada warga desa yang menjadi debitur UMi. Fasilitasi tempat usaha juga menjadi satu hal penting untuk diperhatikan jika benar-benar ingin membantu debitur mengembangkan usahanya. Terkait tempat usaha ini, pada umumnya setiap desa memiliki tanah-tanah kas desa dengan lokasi yang strategis. Tanah-tanah ini bisa dimanfaatkan sebagai lokasi untuk semacam Rumah UMi, yaitu tempat para debitur UMi menjalankan usahanya. PIP dan BUMDes dapat bekerja sama untuk mewujudkan Rumah UMi di desa sebagai sentra usaha para debitur UMi.

Tentu, tantangan yang dihadapi PIP dalam kerja sama dengan BUMDes adalah keterbatasan jangkauan PIP yang hanya memiliki kantor di Jakarta. Oleh karena itu, mengingat PIP ini adalah BLU di bawah DJPb yang memiliki kantor vertikal di daerah, yaitu Kanwil DJPb dan KPPN, maka PIP bisa bersinergi dengan Kanwil DJPb dan KPPN tersebut. Kanwil DJPb dapat ditugasi untuk melakukan fasilitasi pada tahap awal proses kerja sama dan selanjutnya melakukan *monitoring* dan evaluasi kepada BUMDes atas pelaksanaan penyaluran kredit UMi.

“Sebagai Kemenkeu Satu, kita terus mencari kemanfaatan baru. Dua yang ada di depan mata kita, pertama adalah Regional Chief Economist (RCE) dan satu lagi kita rumuskan adalah penguatan sektor UMKM yang dilakukan oleh Kemenkeu Satu,» ungkap Wamenkeu Suahasil Nazara dalam acara Rapat Koordinasi Gabungan Kemenkeu di Singaraja, Bali, Kamis (1/13), seperti diberitakan pada situs <https://djp.kemenkeu.go.id/>.

Barangkali, gagasan pemberdayaan BUMDes dalam penyaluran pembiayaan UMi dengan pelibatan unit DJPb, bisa menjadi salah satu pengejawantahan kemanfaatan baru Kemenkeu untuk penguatan sektor UMKM.

\*\*\*

Kata Mereka

Kata Mereka

# Kata Mereka

*Teks: Wahyu Hadi Cahyono dan Normalita Safitri  
(Direktorat SMI)*

Alhamdulillah saya sudah mendapatkan tambahan modal melalui KUR Bank Kalsel Syariah. Selain bunganya ringan, prosesnya mudah, dan pencairan dananya juga sangat cepat. Sangat membantu sekali dalam pemulihan usaha pascapandemi panjang.

*Dessyana Yudiarny, CV. Casheila,  
Debitur Bank Kalsel Syariah*

Dengan 9 kantor cabang yang dimiliki, KSU Krama Bali dapat lebih dekat lagi dengan masyarakat. Salah satunya adalah dengan memberikan kemudahan akses pembiayaan UMi bagi masyarakat sekitar untuk mendukung usaha yang sedang dijalankan.

Tantangan terbesar KSU Krama Bali saat ini adalah dampak pandemi Covid-19 yang langsung menghantam sektor pariwisata di Pulau Bali. Banyak usaha anggota terdampak dan perlu penanganan lebih, terutama keringanan membayar angsuran. Beberapa strategi dilakukan KSU Krama Bali untuk tetap mendukung penyaluran Pembiayaan UMi, salah satunya dengan membeli produk mereka.

*KSU Krama Bali, Penyalur UMi, Bali*



Banyak sekali manfaat yang saya rasakan sejak menerima Pembiayaan UMi. Tidak hanya modal usaha saya bertambah, tetapi juga saya didampingi mengembangkan usaha, seperti membantu pemasaran, memberikan pelatihan pengelolaan keuangan, dan mengajarkan saya untuk mendapatkan legalitas usaha.

Semenjak menerima Pembiayaan UMi, saya sering diikutkan dalam kegiatan pameran yang akhirnya membuat produk tenun saya lebih dikenal masyarakat. Saya berharap, suatu saat usaha saya bisa berkembang dan menjadi CV atau bahkan PT. Saya bersyukur sekali dengan adanya pendampingan bagi para debitur Pembiayaan UMi. Semoga pendampingan ini tetap ada.

*M. Agus Sulisty, Pengrajin Tenun Ikat  
Troso, Jepara*



Semenjak jadi Debitur UMi, saya difasilitasi banyak pendampingan terkait pengembangan usaha, pengenalan digitalisasi termasuk pemasaran online dan pemakaian e-money. Selain pendampingan, saya juga sering dilibatkan dalam pameran-pameran, sehingga mendapatkan banyak pengalaman dan kesempatan untuk mengenalkan produk dagangan saya.

Ke depannya, saya ingin menambah karyawan karena permintaan produk makin hari makin banyak. Saya juga ingin membentuk kelompok pelatihan untuk ibu-ibu rumah tangga lain yang tidak bisa kerja jauh dari rumah, agar bisa mendapat tambahan penghasilan. Semoga Pembiayaan UMi lebih mudah dan murah. Dengan begitu saya bisa mengajak teman-teman untuk mengajukan Pembiayaan UMi.

*Umi Rohana, Pengrajin Kain Perca, Batu*



Pada tahun 2016 banyak ikan laut maupun kura-kura mati di wilayah kami (Bali). Setelah dilakukan penelitian, ternyata habitat ikan laut dan kura-kura telah terkontaminasi oleh sampah, terutama sampah plastik. Kami berinisiatif untuk mengolah sampah plastik untuk dijadikan sebagai kerajinan tangan. Kami mengajukan KUR melalui KSP Guna Prima Dana sehingga dapat membeli mesin pengolah sampah plastik. Dengan berhasil mengolah sampah plastik ini diharapkan kami bisa turut menjaga lingkungan serta menghasilkan souvenir khas Bali yang memiliki nilai tinggi.

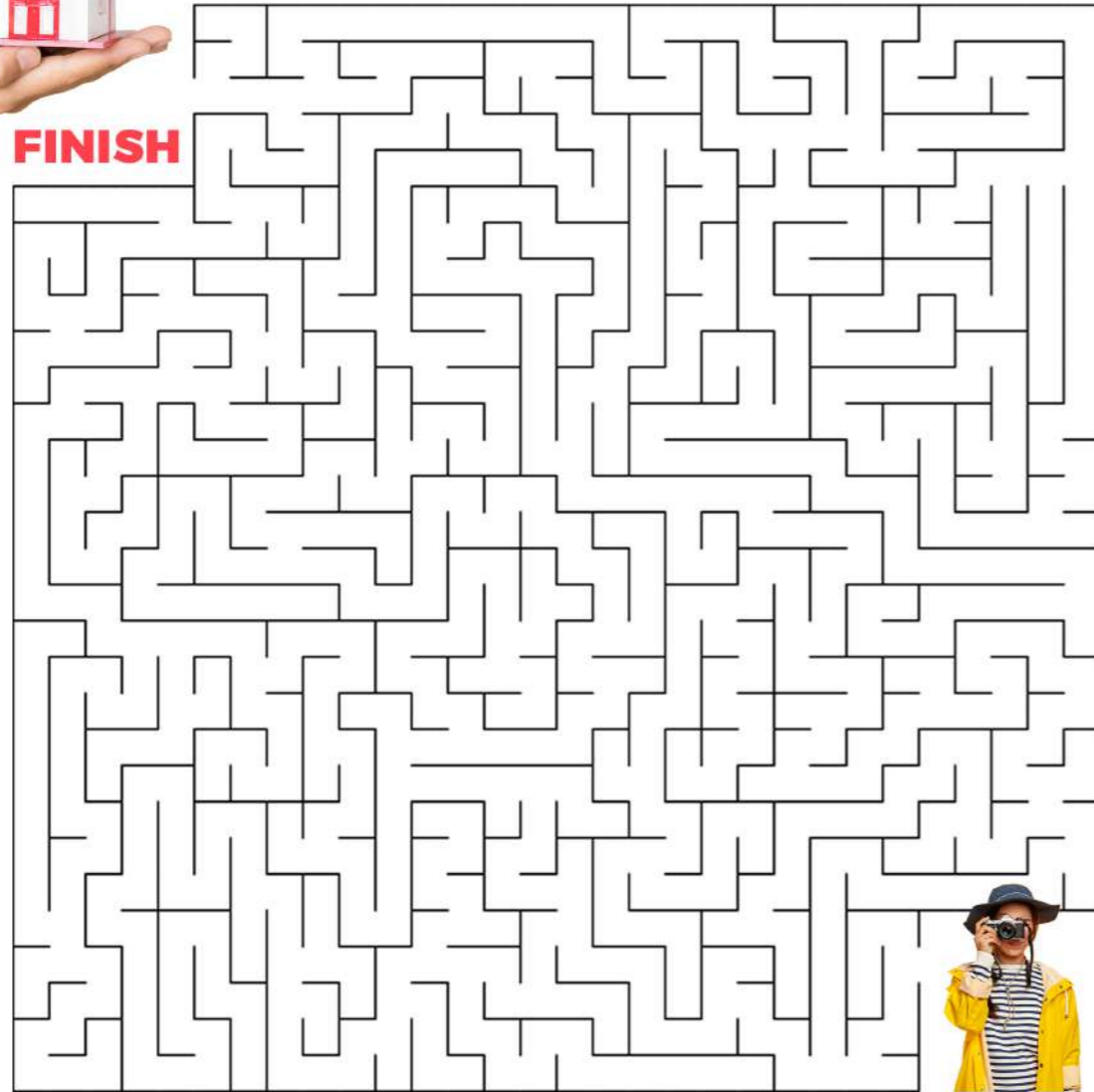
*I Gusti Nyoman Gelantik, Debitur Koperasi  
Simpan Pinjam Guna Prima Dana*

saatnya kuis!

# Temukan Jalan ke Rumah UMi



**FINISH**



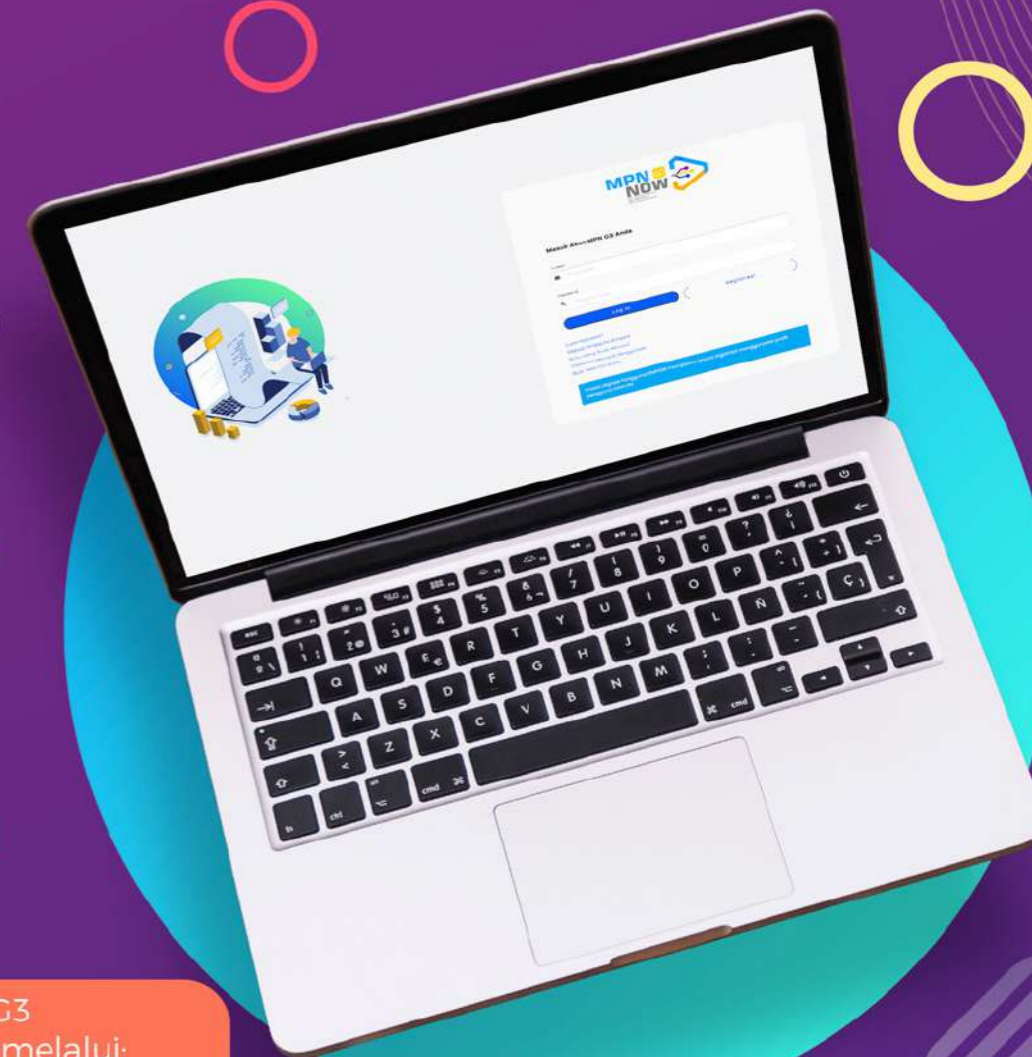
**START**

Capture dan kirimkan jawaban kalian ke email [redaksi.treasury@gmail.com](mailto:redaksi.treasury@gmail.com) dengan subjek KUIS MTI 2 2022. Tiga pemenang terpilih akan diumumkan di Majalah Treasury Indonesia edisi selanjutnya

**Pemenang Kuis MTI Tahun 2022:**  
 1. Nugraheni Vikri Puspitaningtyas, KPPN Buntok  
 2. Nafriza Nurul Rahman, KPPN Singaraja  
 3. Mailinda Pratiwi, KPPN Barabai

# Semakin Mudah, Semakin Cepat!

Dengan Modul Penerimaan Negara (MPN) G3 semakin mudah membayar setoran pajak, setoran bea cukai, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maupun transaksi penerimaan negara lainnya 24 jam termasuk melalui pembayaran nontunai



Kemudahan MPN G3 dapat diakses juga melalui: [mpn.kemenkeu.go.id](http://mpn.kemenkeu.go.id)



*New DJPb in Town*

**PELITA**

## Erli: Bukan Siapa-Siapa Menjadi Keluarga

*Sebuah Kisah Perjalanan Inovasi Caping Kang Projo Kanwil DJPb Provinsi D.I. Yogyakarta*

**E**rli Murti Rahayu Yuniawati adalah pegawai Kanwil DJPb Provinsi D.I. Yogyakarta sekaligus seorang pencinta batik dan filantrop. Ia hadir sebagai salah satu figur di balik kesuksesan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Batik di Kapanewon Lendah, Kulon Progo, Yogyakarta.

Tahun 2020, pandemi Covid-19 merebak dan sektor UMKM pun terkena dampaknya, termasuk UMKM yang memproduksi batik. Kanwil DJPb Provinsi Yogyakarta mendapatkan amanah untuk meneruskan pendampingan kepada KUBE Batik yang awalnya merupakan binaan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo. Erli dan timnya ditugaskan untuk melakukan pembinaan di bawah naungan program inovasi "Caos Pendampingan kagem Ngembangaken Potensi Ekonomi Rakyat wonten ing Kulon Progo Ngayogyakarta (Caping Kang Projo)".

Secara harfiah maupun kiasan, jalan Erli begitu panjang dalam mengemban tugas. Jarak tak kurang dari 45 kilometer ia tempuh hampir setiap akhir pekan. Setiba di tempat tujuan, ia pun tak bisa langsung menjalankan tugas. Di mata warga calon binaannya, Erli saat itu bagaikan orang asing yang tiba-tiba datang. Sementara, banyak orang sedang berada dalam fase paranoid, dihadapkan pada pilihan mati karena pandemi atau mati kelaparan. Kedatangan Erli dan tim hampir-hampir tidak digubris, bahkan mereka pernah menunggu sampai berjam-jam di depan toko batik.

"Miris sebetulnya melihat toko yang kami datangi saat itu. Kondisinya tidak terurus. Ibu-ibu sebagai buruh pembatik di Lendah banyak terkena pemutusan kerja dan menganggur," tutur Erli. Atas arahan dari pimpinan, tim Kanwil DJPb Provinsi DIY melakukan fasilitasi dengan mendatangkan narasumber dari Balai Besar Kerajinan dan Batik Yogyakarta untuk meningkatkan kemampuan membatik para anggota KUBE tersebut.

Kedatangan "guru" dari Balai Besar Kerajinan dan Batik Yogyakarta memberi angin segar bagi KUBE Batik di Lendah. Hal inilah yang kemudian menumbuhkan rasa percaya dari anggota KUBE pada maksud baik Erli dan tim. Pelatihan yang diberikan menjadi titik balik bagi anggota KUBE untuk menata kembali usaha mereka dan meningkatkan produktivitas. Semangat ini menjadikan mereka termotivasi kembali.

Jika semula para anggota KUBE Kapanewon Lendah hanya menguasai teknik pewarnaan hitam dan cokelat, saat ini keterampilan mereka bertambah dengan ragam teknik pewarnaan alami hingga sintetis. Demikian pula dengan keberagaman motif. Awalnya, hanya motif tertentu yang dibuat seperti galar, gringsing, pacet lintah, dan babon angram. Sesudah pelatihan,

KUBE tersebut mampu memproduksi motif yang lebih beragam seperti motif kontemporer, kombinasi motif, kombinasi batik tulis dan cap, juga batik untuk segmen milenial. Jenis produknya pun bertambah, misalnya merambah batik untuk pajangan lukisan. Aspek pengolahan limbah dan permodalan pun menjadi perhatian.

Dengan dukungan pembinaan yang dilakukannya oleh Kanwil DJPb Provinsi DIY, KUBE Batik Kapanewon Lendah mengalami kemajuan yang drastis. Penjualan bulanan yang sebelumnya hanya Rp300.000 atau tidak laku sama sekali, saat ini bahkan bisa mencapai rata-rata Rp6.000.000 setiap bulannya. Tak tanggung-tanggung, peningkatannya hingga 2000 persen.

Dengan keberhasilan ini, Erli tidak serta-merta mengambil keuntungan dari anggota KUBE. Ia juga tak hendak buru-buru berhenti menjalani perannya. Kedekatan rasa yang telah tumbuh sebagai bagian dari keluarga KUBE tersebut menjadikan Erli sebagai salah satu pelanggan dan pemasar produk-produknya. Berbagai cara Erli lakukan untuk memperkenalkan produk KUBE ini ke kalangan yang lebih luas. Di ruangan Kanwil DJPb Provinsi DIY, atas perhatian dari Kepala Kanwil juga dipasang etalase "Pojoj UMKM" untuk memamerkan hasil KUBE Batik ini.

Erni, Ketua KUBE Batik Kapanewon Lendah menuturkan bahwa bantuan dari Erli dan Kanwil DJPb Provinsi DIY begitu besar bagi keberlanjutan usaha batik yang ia jalankan bersama warga lainnya.

"Mbak Erli memotivasi dan mendorong anggota KUBE untuk terus berkarya dan percaya diri di tengah pandemi. Melalui Mbak Erli dan Kanwil DJPb Provinsi DIY, KUBE Batik dapat memperoleh ilmu membatik yang lebih luas," sebut Erni. Baginya, perhatian Erli dan tim menjadikan KUBE Batik yang diketuainya dapat bangkit dan mandiri. Sebelumnya, anggota KUBE tidak memiliki pengetahuan yang utuh terkait bagaimana membatik, bagaimana mewarna, dan bagaimana memproduksi batik yang baik, sampai akhirnya difasilitasi dengan guru untuk mengajari mereka.

Erli bahkan memiliki visi yang lebih luas mengapa ia begitu telaten mendampingi KUBE ini. Para pelaku usaha hingga buruh pembatik banyak yang berasal dari kalangan ibu-ibu. Seorang ibu bukan sekadar bekerja untuk mencari nafkah, tetapi juga menjadi cerminan harapan bagi keluarganya. "Pelan-pelan kita maju bersama. Untuk kehidupan yang lebih baik, untuk anak-anak," pesan Erli.

*Teks: Eko Bintoro Jati dan Jiilaan Ronaa Aanisah (Direktorat SMI)*

## Wangi Bisnis Kopi dengan Dukungan Pembiayaan UMi



**H**arum kopi yang tak biasa menguar di ruangan kedai berdesain minimalis. Wangi khas kopi ditingkahi oleh aroma buah nangka. Apakah ini racikan kopi kekinian yang memadukan biji kopi dengan nangka?

"Ini kopi nangka, nama aslinya dari jenis liberika. Asalnya dari Liberia, Afrika. Dibawa ke sini

oleh orang Belanda, Agustinus Dezentje pada tahun 1771. Pohonnya besar, daunnya pun seperti daun nangka. Dalam kopi liberika terkandung dua aroma buah, pisang dan nangka. Tinggal kita mau mengeluarkan yang mana ketika menyangrai. Jadi bukan dari campuran buah nangka," terang Eko Budi Suroso, pemilik kedai. Kopi nangka merupakan salah satu menu khas di kedainya.

Kedai kopi yang dinamai Omah Kopi Ngemplak (Om Koplak) ini terletak di Dusun Ngemplak, Desa Banyuanyar, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Letaknya yang cukup jauh dari pusat keramaian, sekitar 12 kilometer dari pusat kota Boyolali, membuat niat Eko mengembangkan kopi khas daerahnya ini sempat dipandang sebelah mata oleh para tetangga. Mereka meragukan akan ada pelanggan yang mau datang.

"Yang penting, kita harus yakin dan berani dulu," tegas Eko. Bukan hal mudah mewujudkan keinginannya itu. Menurutnya, yang paling sulit adalah mengubah pola pikir para petani yang masih melakukan pekerjaannya apa adanya. Padahal dengan perlakuan yang tepat, biji kopi yang dihasilkan bisa bernilai jauh lebih tinggi. Eko mengawali dengan meracik kopi sesuai standar yang telah ia tetapkan, lalu mempersilakan para petani mencicipi sendiri agar mengetahui bedanya.

"Awalnya saya memilih 2-3 orang dulu dari kelompok petani binaan untuk menjadi contoh. Selama tiga tahun, saya berfokus membina mereka. Setelah hasilnya terlihat, 30-40 orang lainnya otomatis mengikuti. Mereka sudah menyaksikan sendiri bahwa perbedaan harga jual kopi yang berkualitas di pasaran itu jauh, dari hanya Rp19.000/kg menjadi Rp30.000 lebih/kg," kenang Eko. Harga tersebut sebanding dengan usaha yang dilakukan, mulai dari penanaman, perawatan, panen, hingga pemilahan.

Omah Kopi mulai dibuka pada tahun 2018 di bagian depan rumah Eko. Kala itu ia masih menggunakan peralatan manual. Terbukti, jarak dan kondisi jalan tak menghalangi

para peminat kopi untuk berkunjung. Bahkan, banyak yang datang dari kota lain untuk belajar, termasuk dari berbagai perguruan tinggi. Empat bulan yang lalu, Eko memindahkan Omah Kopi ke sebuah lahan yang dulunya adalah kandang sapi. Kini, rumahnya lebih difungsikan sebagai tempat produksi dan sortasi.

Selain olahan kopi, Eko juga menyajikan makanan ringan seperti singkong goreng yang bahan bakunya juga ia beli dari petani sekitar. Susu yang tersedia di kedainya pun ia ambil dari peternak setempat, bukan susu kemasan pabrik. Lelaki kelahiran 16 Januari ini memang peduli pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Bahkan untuk *reseller* kopinya, ia menetapkan pembatasan berdasarkan wilayah. Eko tidak mau menjual sendiri produk kopinya secara daring, agar bukan hanya dirinya yang menikmati keuntungan. Warga pun akhirnya memahami, bahwa apa yang Eko lakukan adalah untuk kepentingan para petani juga.

Eko pun melakukan banyak inovasi. Ia berkreasi membuat kopi "wine" dari buah kopi yang difermentasi, juga mengolah kulit buah kopi dan bunganya menjadi sajian minuman. Tak hanya itu, ia bereksperimen membuat camilan dari daun tanaman kopi.

Uniknya, pada mulanya Eko justru takut minum kopi.

"Saya punya (penyakit) asam lambung. Namun, saya lalu belajar bahwa kopi sebetulnya menyehatkan, asal diminum tanpa gula. Saya yang bukan pencinta kopi kemudian belajar lebih lanjut." Berawal dari bisnis susu segar khas Boyolali yang terhenti, lalu bisnis mebel yang sempat membuatnya bangkrut, Eko memantapkan diri belajar soal kopi. Sekitar tahun 2014 ia mencari ilmu langsung ke para petani dan pengusaha, misalnya ke daerah Wonosobo dan Temanggung, di samping mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh pemerintah.

Dari pemerintah pula Eko mendapatkan berbagai bantuan, mulai alat hingga permodalan. Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) lewat penyalur Koperasi Mitra Dhuafa (Komida) menjadi pilihannya.

"Setiap hari Selasa, kami (debitur) berkumpul untuk mengangsur. Saya lebih suka yang sistemnya mingguan seperti ini, sesuai pemasukan kami," katanya.

Kopi olahan Eko bahkan sudah diekspor ke Jerman. Sayangnya, belum semua bisa ia penuhi. "Permintaannya (dalam hitungan) ton, tetapi kami baru bisa memenuhi lima kuintal karena keterbatasan modal."

Karenanya, Eko berharap pembiayaan UMi bisa mendukung dari sisi permodalan dengan plafon yang lebih besar lagi agar ia bisa menyerap makin banyak hasil panen para petani. Dalam setahun, petani kopi di daerahnya dapat menghasilkan 10 sampai 12 ton biji kopi, tetapi nantinya tentu perlu dipilih lagi yang benar-benar berkualitas. Bank mungkin dapat menyediakan fasilitas pinjaman, tetapi ia merasa sudah cocok dengan sistem yang dijalankan oleh Komida. Mekanisme pendampingan dan kompaknya para anggota yang saling bantu, di mata Eko adalah suatu nilai lebih dari pembiayaan UMi.



# Implementasi Program

## Eco-Office



Sebagaimana Surat Edaran Menkeu No. SE-6/MK.1/2019 tentang Penerapan Kantor Ramah Lingkungan (Program Eco-Office) di Lingkungan Kementerian Keuangan yang meliputi:

- Pengurangan sampah plastik dan kertas;
- Penghematan energi listrik;
- Penghematan penggunaan air bersih;
- Kenyamanan ruang kerja;
- Pemilahan Sampah



\*) Kenyamanan Ruang Kerja merupakan salah satu Program Eco-Office

## The Need for UMKM to Adapt to the Generational Change in Population

by: Ivanderaihan Subagiyono, OJT Direktorat SMI

The unprecedented global demographic and generational change in the population belies important economic implications. The size, growth, and age structure influence the economy in multiple ways.

With the coming of bonus demography in Indonesia by 2045 resulting from the rise in the productive workforce relative to the dependent population, national production is expected to increase by a substantial amount. The rising productive population and the change in generation should lead to a continuation of GDP growth in the near future.

The generational change in the population from Gen X, Millennials (Gen Y), to Gen Z has affected the market in significant ways. One such change is in the preference of consumption in both substance or media. Gen Z has a much higher rate of consumption of digital content and media compared to previous generations, with their lives more integrated with information technology than ever before. Ordering items and food online, spending money on digital assets, and using free time to browse the internet has become a necessary activity. Thus, the challenge to adapt with the changing market has never been more crucial for small businesses in Indonesia.

### Impacts of generational change to UMKM businesses in Indonesia

Historically, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), also known as MSMEs, are a significant driver of the economy in Indonesia. UMKM businesses annually contribute 97 of workforce employment and 61 percent of Indonesia's GDP<sup>1</sup>. Enveloping such a large fraction of the national economy further proves the importance of UMKM in Indonesia. By focusing in domestic trade utilizing the national currency, the majority UMKM in Indonesia were able to hold out the 1998 monetary crisis. The simple and resilient nature of UMKM helped to support Indonesia's subsequent economic recovery.

With UMKM contributing a substantial portion of national economy, it is of the government's upmost interest to continue further support to UMKM development. This is in conjunction with the rush to quickly recover from the effects of the COVID-19 pandemic in Indonesia, namely causing 30 million UMKM to shut down since 2020, resulting in 7 million people to be unemployed and left without a stable income.

The mass lay off from the pandemic has also inspired many people to start small businesses,

<sup>1</sup> Bank Indonesia, 2022

from online stores to coffee shops. Essential support in the form of basic skills such as management, accounting, and marketing is both valuable and necessary for the sustainability of these UMKM.

At the start of the Millennial and Gen Z generational change in Indonesia, a phenomenon of start-ups and unicorns rose to exponential scales within just a couple of years. These businesses thrive by optimal utilization of market trends and social media, effectively becoming digital based start-ups. The sudden arrival of these unicorns in the market also increases the potential outreach of current and future UMKM. For example, via online utility apps such as Gojek and Grab, the people can order food and other needs quickly and easily, with just a touch of a button.





KPPN MALANG

# Apresiasi Mitra Kerja, Bangkitkan UMKM Bangsa

**K**ota Malang diuntungkan oleh keindahan alam daerah sekitarnya seperti Batu dengan agrowisatanya, pemandian Selecta, Songgoriti atau situs-situs purbakala peninggalan Kerajaan Singosari. Jarak tempuh yang tidak jauh dari kota membuat para pelancong menjadikan kota ini sebagai tempat singgah dan sekaligus tempat belanja.

Dukungan terhadap UMKM yang tumbuh di wilayah tersebut menjadi kian penting mengingat UMKM merupakan roda penggerak perekonomian nasional di masa pemulihan dari pandemi ini. Kreativitas dalam memberikan motivasi untuk bangkitnya UMKM terus dilakukan dengan beragam kiat dan inovasi, baik secara langsung maupun tidak langsung.

KPPN Malang sebagai garda terdepan penyaluran dana APBN di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan telah memberikan apresiasi kepada lingkup satuan kerja (satker)

melalui penghargaan Pelayanan Prima Satker Utama (PRISMA) sejak 2014. Apresiasi tersebut diberikan terhadap satker yang memiliki kinerja baik yang terbagi menjadi beberapa kategori penghargaan dan diharapkan dapat memotivasi satker lainnya untuk meningkatkan kinerjanya.

Dalam kaitan dengan menjaga keberlangsungan usaha para pelaku UMKM, pada akhir 2021 KPPN Malang menambahkan kategori bagi para penerima penghargaan PRISMA yaitu kategori satker dengan frekuensi transaksi Digipay terbanyak. Pemberian penghargaan dengan kategori tersebut diberikan dengan latar belakang bahwa Digipay merupakan salah satu upaya konkret pemberdayaan UMKM dengan mengintegrasikan satker pengguna APBN dengan para pelaku UMKM melalui perbankan dalam satu ekosistem.

Secara tidak langsung penerapan Digipay dapat bermanfaat bagi para UMKM karena terbukanya peluang rekanan di

banyak satker. Oleh karenanya, penambahan kategori penghargaan ini dimaksudkan agar satker semakin banyak yang berbelanja melalui digipay dan UMKM sehingga pemberdayaan UMKM dilakukan lebih fokus dan terarah.

Pada Triwulan I 2022, satker yang memperoleh penghargaan PRISMA dengan kategori frekuensi transaksi Digipay untuk lingkup Kemenkeu ialah satker KPPN Malang, KPP Pratama Batu, dan KPP Madya Malang. Sedangkan untuk kategori transaksi Digipay di luar Kemenkeu diberikan penghargaan kepada Pengadilan Negeri Pasuruan.

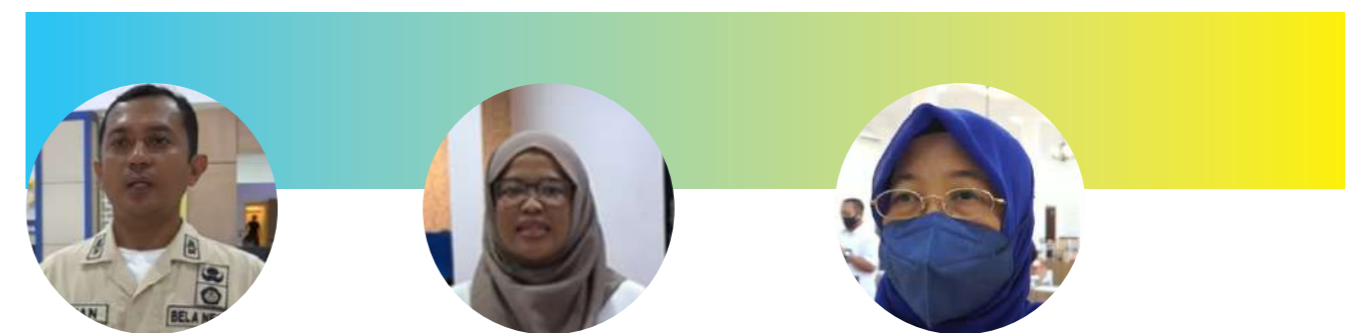
“Kami memberikan apresiasi berupa piagam penghargaan kepada Satker mitra kerja terkait UMKM dalam implementasi Digipay Marketplace. Melalui Marketplace diharapkan dapat sebagai media untuk mengembangkannya UMKM,” tutur Kepala KPPN Malang, Rintok Juhirman. Di tahun 2022 ini, KPPN Malang dengan jumlah 29 pegawainya melayani 166 satker dengan total pagu DIPA sebesar Rp5 triliun. Saat ini, KPPN Malang juga tengah mengawal rehabilitasi dan utilisasi Gedung Cagar Budaya KPPN Malang yang sedang dalam tahap rehabilitasi untuk selanjutnya pemanfaatannya akan digunakan sebagai wahana pembelajaran dan riset dibidang perbendaharaan dan keuangan negara.

Beberapa inovasi unggulan yang diinisiasi oleh KPPN Malang di antaranya ialah Ca’Ngalam (Catatan Data Penyaluran TKDD dan Dana BOS se Malang Raya) yang berisi sajian informasi data penyaluran DAK Fisik, BLT, Dana Desa serta Dana BOS sampai dengan tingkat persentase salur per desa di wilayah KPPN Malang, lalu ada pula inovasi layanan edukasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan pembinaan teknis bagi satker yang dikenal sebagai “Ngebes” atau Ngobrol Enak Bareng Satker.

KPPN Malang pun secara resmi telah mengimplementasikan fresh office (fleksibel, responsif, smast and healthy) yang merupakan Quickwin DJPb 2021 dengan mengusung konsep aman, nyaman, dan sehat bagi para pemangku kepentingan.

Sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah dalam menyediakan serta memberikan layanan publik, menjadi kewajiban bagi jajaran KPPN Malang untuk turut mempromosikan serta menyukseskan program pemerintah dalam rangka memberdayakan UMKM di masa pandemi seperti saat ini.

*\*Testimoni Satker*



Sebagai pengguna layanan KPPN Malang saya sangat merasakan dampak implementasi fresh office KPPN Malang. Desain ruang layanan yang baik dari konsep ruang dan fasilitas modern yang didukung dengan optimalisasi penggunaan IT adalah wujud nyata dari konsep layanan DJPb yang smart.

**M. Sokariyawan, Bendahara Pengeluaran KOREM 083 Baladhika Jaya**

KPPN Malang tetap menjaga layanan tetaplah tuntas walaupun di masa pandemi. Selain itu, KPPN Malang juga menerapkan adaptasi kebiasaan baru untuk memastikan kenyamanan para Satker ketika berkunjung. Harapannya produktivitas pegawai maupun stakeholders dapat terus ditingkatkan.

**Theresia, KPU Kabupaten Malang**

Reward yang kami dapat ini juga merupakan pemicu bagi kami untuk bekerja lebih baik lagi. Pemberian penghargaan PRISMA seperti ini akan sangat membantu dan menambah motivasi bagi para satuan kerja lainnya juga.

**Sri Suindah, KPP Madya Malang**



KPPN MAKASSAR I

# Luncurkan Program Rumah UMi, Dukung Pemulihan Ekonomi

Ultra Mikro (UMi) merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan sosial untuk kemandirian usaha yang menyasar usaha mikro di lapisan terbawah yang belum bisa difasilitasi perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Namun, program ini ternyata belum banyak diketahui oleh masyarakat, sehingga bahkan masih banyak yang terjerat lintah darat.

Oleh karenanya pada 2021 KPPN Makassar I berinisiasi untuk menghadirkan program rumah UMi sebagai inovasi untuk memberikan informasi tentang pembiayaan UMi sekaligus sebagai etalase atau tempat promosi produk UMi, sebagaimana inovasi aplikatif dari Peraturan Menteri Keuangan nomor 93/PMK.05/2020 tentang Pembiayaan UMi.

Kota Makassar sendiri merupakan kota yang terletak dekat dengan pantai yang membentang sepanjang koridor barat

dan utara dan juga dikenal sebagai “Waterfront City” yang didalamnya mengalir beberapa sungai (Sungai Tallo, Sungai Jeneberang, dan Sungai Pampang) yang kesemuanya bermuara ke dalam kota. Secara administrasi Kota Makassar dibagi menjadi 15 kecamatan dengan 153 kelurahan. Di antara 15 kecamatan tersebut, ada tujuh kecamatan yang berbatasan dengan pantai yaitu Kecamatan Tamalate, Kecamatan Mariso, Kecamatan Wajo, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Tallo, Kecamatan Tamalanrea, dan Kecamatan Biringkanaya.

KPPN Makassar I hadir untuk menjadi mitra bagi 151 satuan kerja (satker) di wilayah Makassar, Maros, dan Gowa. Bersama dengan 29 pegawainya, KPPN Makassar I mengelola APBN dengan jumlah pagu K/L di tahun anggaran 2022 ini sebesar Rp10 triliun.

Banyaknya jumlah satker tersebut menjadikan inisiasi untuk membangun Rumah UMi menjadi kian efektif. Di antara manfaat dari pendirian tersebut ialah sebagai pojok informasi. Dengan hadirnya “Rumah UMi” maka akan lebih banyak masyarakat yang mengetahui keberadaan program UMi sehingga bisa lebih banyak juga yang bisa mengakses program ini, apalagi banyak satker yang berlalu-lalang di KPPN Makassar I.

Para debitur UMi dapat memajang dan mempromosikan dagangannya di Rumah UMi tersebut. Selain itu, outlet yang tersedia juga bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh para pelaku UMi yang dipercaya untuk dijadikan tempat usaha.

Namun demikian, pandemi covid-19 telah mengubah banyak hal, termasuk sistem pelayanan KPPN. Semula banyak satker yang datang ke KPPN untuk mengajukan SPM, SKPP, Rekon dan sebagainya namun dengan pandemi covid-19 semua

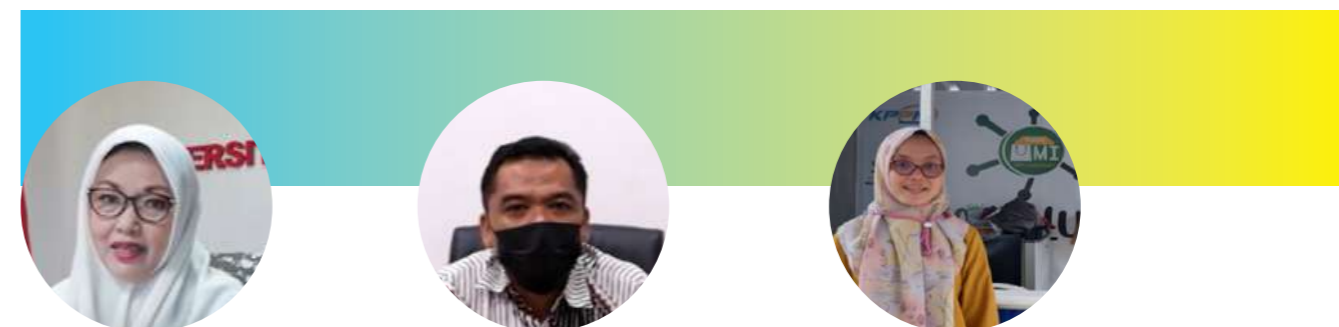
berubah melalui mekanisme online. Menurunnya jumlah pengunjung KPPN secara drastis tentunya juga menurunkan pangsa pasar dari Rumah UMi.

Menyikapi hal tersebut, KPPN Makassar I kembali melakukan beberapa upaya agar usaha UMKM tidak menurun drastis seperti ketika ada kegiatan kantor, maka sebagian konsumsi dipesan dari pelaku UMKM. Pegawai dianjurkan untuk makan siang atau minum kopi di sana, atau bahkan mengajak pegawai tetangga kantor untuk turut berbelanja atau makan di sana. Selain itu, tidak dikenakan biaya sewa atau PNPB kepada para UMKM di Rumah UMi.

“Rumah UMi merupakan bentuk konsersn DJPb dalam upaya mendukung perkembangan unit usaha mikro dalam rangka pemulihan ekonomi. Kita mengetahui bahwa yang paling terdampak dengan kontraksi fiskal akibat pandemi adalah unit usaha mikro dan menengah akibat turunnya daya beli masyarakat. Upaya KPPN Makassar I dalam memberdayakan UMKM khususnya unit usaha mikro ini merupakan bagian dari program *community engagement*. Kami berharap hal ini dapat berdampak positif meskipun masih banyak tantangan yang dihadapi seperti lokasi, keterbatasan konsumen, dan sebagainya,” ungkap Kepala KPPN Makassar I, Toding Luther.

Hadirnya pembiayaan UMi diharapkan mampu menjadi jembatan bagi usaha mikro melalui lembaga *linkage* (koperasi dan LKM). Ketika semakin banyak masyarakat dari lapisan bawah yang mengetahui keberadaan Rumah UMi, maka akan lebih banyak juga yang bisa mengakses untuk dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para pelaku UMi.

\*Testimoni Satker



Saya memberikan apresiasi yang tinggi atas pelayanan yang diberikan KPPN Makassar I. Proses pencairan APBN selalu lancar, tidak ada hambatan, berkat arahan dan bimbingan KPPN Makassar I yang selalu proaktif menginformasikan setiap tahapan pelaksanaan anggaran.

**Prof.Dr.Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A., Rektor Univ, Hasanuddin**

KPPN Makassar I sebagai mitra kerja Bank Mandiri secara nyata membantu kami sehingga manfaat dari APBN yang kami kelola dapat dicapai lebih optimal. KPPN Makassar I senantiasa memberikan layanan terbaik, sinergi, dan koordinasi sehingga terhadap permasalahan yang timbul dapat teratasi.

**Nur Hidayatullah, Pimpinan Bank Mandiri Cabang Makassar**

Saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah khususnya KPPN Makassar I dengan adanya program Rumah UMi karena sangat membantu saya menambah hasil penjualan sehingga dapat dipergunakan untuk membiayai kuliah saya dan sekolah adik saya.

**Anti, Pelaku UMKM**

CATATAN PERJALANAN

# Berbagi Motivasi, Berkarya Optimal bagi Negeri

Sebagai pimpinan dari sebuah institusi besar, Dirjen Perbendaharaan Hadiyanto tak jemu memberikan arahan maupun motivasi kepada segenap jajarannya. Bahkan di tengah bulan Ramadan, Hadiyanto menyempatkan untuk berkunjung ke Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya (21/4).

Tiba di Bandara Tjilik Riwut Palangkaraya, Hadiyanto beserta rombongan tim kantor pusat kemudian menuju Kanwil DJPb Kalteng dan disambut dengan penuh semangat melalui yel-yel dari jajaran setempat. "Bahalap Tutu!" menjadi salah satu kata yang diteriakkan dan memiliki makna "Sangat bagus sekali!" sebagai komitmen Kanwil DJPb Kalteng terus berupaya memberi pelayanan terbaik.

Untaian kalimat sarat makna sebagai kearifan budaya setempat dituturkan oleh Kakanwil DJPb Kalteng, Hari Utomo, dalam menyambut Hadiyanto. *Adil ka'talino, bacuramin ka'saruga, basingat ka'jubata*, bahwa prinsip hidup adalah adil kepada sesama manusia, bercermin ke surga, dan nafas hidup itu berasal dari Tuhan. Lalu jajaran pun berteriak, arus arus arus! Artinya setuju.

Semangat yang menggelora pada sore itu seakan tidak memperlihatkan kondisi yang sedang berpuasa. Terlebih, Hadiyanto pun turut menyuntikkan motivasi kepada jajaran di sana dalam arahannya dengan mengenakan peci lawung dan sorban manik khas Kalimantan Tengah.

Salah seorang petugas dokumentasi dalam acara tersebut, Rifki, mengaku sangat beruntung akhirnya dapat bertemu langsung dengan Dirjen Perbendaharaan. "Saya PPNPN dari KPPN Palangkaraya, sangat beruntung sekali ditugaskan untuk mendokumentasikan acara ini karena bisa langsung bertemu beliau yang penuh semangat," ungkapnya. Dalam waktu yang amat singkat, Hadiyanto akhirnya juga menyempatkan untuk berkunjung ke KPPN Palangkaraya.

Sebelumnya Hadiyanto melangsungkan kunjungan kerja di KPPN Tasikmalaya (24/3). Suasana cair sangat terasa saat kedatangannya, karena banyak memberikan motivasi dalam mengatasi problem kerja dan mengingat kembali masa muda saat masih menuntut ilmu di wilayah Priangan Timur.

Kebetulan saat itu di KPPN Tasikmalaya terdapat 5 mahasiswa Politeknik STAN yang sedang melaksanakan magang dan dilibatkan dalam kegiatan penyambutan kedatangan rombongan Dirjen Perbendaharaan. Ternyata, Hadiyanto memberi banyak perhatian terhadap generasi penerus di Kementerian Keuangan dengan memberikan motivasi diselingi dengan candaan jenaka.

Dalam kunjungan kerjanya di Kanwil DJPb Provinsi Nusa Tenggara Barat (3/6) dan Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara (6/6), Dirjen Perbendaharaan mengapresiasi segenap prestasi



dan kinerja dari para jajarannya. Tak sekedar memberi arahan, Hadiyanto pun secara tidak langsung memberikan contoh bagaimana tetap berkinerja optimal dalam segala situasi. Tak segan, Hadiyanto membuka tabnya untuk bekerja dan berdiskusi dengan jajarannya meski berada di tepi pantai di Mataram.

Jajaran Insan Perbendaharaan begitu menikmati setiap kunjungan kerja dari Dirjen Perbendaharaan. Setiap arahan yang diberikan, mampu mengisi spirit dan motivasi untuk kembali berkarya membangun negeri.



# Gagasan Ekonom Milenial Melihat Masa Depan

Judul Buku: Indonesia 2045, Gagasan Ekonom Milenial Melihat Masa Depan  
 Penulis: Sri Mulyani, dkk.  
 Penerbit: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia)  
 Tahun Terbit: 2021  
 Tebal Halaman: 260 halaman  
 ISBN: 978-602-481-625-4

Penulis: Novryan Noor Hanifan

Sesuai dengan judulnya, buku *Indonesia 2045: Gagasan Ekonom Milenial Melihat Masa Depan* ini merupakan buku yang berisikan gagasan para ekonom muda Indonesia alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang mewakili generasi milenial dalam melihat Indonesia pada 100 tahun pasca kemerdekaan mengenai prospek, upaya, peluang dan tantangan menuju visi Indonesia 2045, yakni "Indonesia berdaulat, maju, adil, dan Makmur" dalam perspektif pemanfaatan perkembangan inovasi dan teknologi.

Kontribusi pemikiran dari 15 tokoh ekonom seperti Sri Mulyani, M. Chatib Basri dan para praktisi muda tersebut hadir untuk menjawab tantangan perkembangan jaman, utamanya pasca masa pandemi Covid-19. Sebuah masa di mana akselerasi digital terjadi secara cepat dan masif, atau yang lebih dikenal dengan era kenormalan baru (*new normal*). Digitalisasi itu sendiri terjadi di hampir seluruh sektor-sektor utama dalam kehidupan manusia, seperti sektor perbankan-keuangan, industri manufaktur, perkotaan-transportasi, agrikultur-ketahanan pangan, perdagangan grosir-retail, pekerjaan-pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan, rekreasi-pariwisata, serta institusi-kelembagaan, yang secara lengkap dibahas pada masing-masing subtopik di dalam buku ini.

Melalui buku ini, diharapkan akan terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi, minimal untuk menciptakan lapangan kerja, menurunnya tingkat pengangguran, meningkatnya optimisme yang ditunjukkan dengan lebih tingginya laju inflasi aktual dibandingkan laju inflasi harapan, serta naiknya pertumbuhan

ekonomi di atas laju pertumbuhan ekonomi alami. Kemudian bagaimana cara Indonesia mencapai pola pertumbuhan ekonomi produktif? Di masa sekarang salah satu aspek pentingnya adalah dengan pemanfaatan teknologi digital, di mana dalam salah satu subtopik buku ini dibahas mengenai bagaimana penggunaan *smartphone* secara massal mendorong terjadinya perubahan praktik perbankan yang membentuk masyarakat ke arah *cashless society*. Kemunculan adanya *fintech*, *e-money*, dan berbagai inovasi finansial lainnya pun menjadi tantangan tersendiri yang akan meredefinisikan jasa keuangan di masa depan.

Berbagai topik yang diangkat dalam buku ini tentu tidak akan mampu sepenuhnya memprediksi secara akurat nasib Indonesia dan masyarakatnya di masa depan. Namun, buku ini merupakan sebuah usaha yang diharapkan mampu berperan sebagai wadah para ekonom milenial untuk menyampaikan pandangannya ke masyarakat luas, serta memberikan nilai tambah kepada para pembacanya, dengan memberikan wawasan yang lebih mendalam akan kondisi Indonesia hari ini dan esok hari.

# Soal Bersumpah



Oleh : Pringadi Abdi Surya, tayang pada [artreasury.id](http://artreasury.id) (Maret 2022)

Tak bisa kubayangkan ada yang bersumpah  
Padahal saat itu semuanya masih nusa yang terpisah  
Orang-orang membawa rempah  
Tanpa membaca Tan Malaka  
Kata REPUBLIK masih sebuah kata  
Bahasa yang asing dalam sebuah halaman  
Tersimpan untuk mata yang menemukan

Ide besar itu berjalan  
Dibawa kapal-kapal dagang nusantara

Darah kental moyang kita  
Adalah pelaut. Di hadapan ombak  
Semua bisa menjadi maut. Karena itu  
Tak pernah ada takut. Melawan penjajah,  
Hanya butuh serempak. Kompak.  
Dari kisah Hang Tuah membawa kapak  
Sampai Arupalaka mengusung tombak.

Hingga berlabuh, bertukar cerita  
Di mana-mana pernah ada darah yang tertumpah  
Dan tanah yang basah itu  
Adalah tanah air yang sama  
Yang menumbuhkan harapan kemerdekaan

Dan dari cerita-cerita itu  
Di bawah langit biru yang sama  
Di bawah matahari yang hampir selalu

bersinar sepanjang tahun  
Tak ada yang tak sepakat  
Tahun-tahun penderitaan  
Menjadi kelas nomor sekian  
Mengenyahkan berbagai perbedaan  
Tak perlu lagi melihat warna kulit  
Agama dan dari keluarga mana  
Semua manusia dapat merasa sakit

Hari itu, ada yang bersumpah  
Tanah yang basah itu bernama tanah air  
Tahun-tahun penderitaan itu menyatukan  
beda menjadi bangsa

Dan tangan mereka saling menggenggam erat  
Dalam kalimat-kalimat persatuan  
Yang dijunjung tinggi dari bibir-bibir keikhlasan

Hari ini, kita merenung  
Langit yang tampak mendung  
Hujan akan turun sebentar lagi

Tak ada yang tahu akan sederas apa  
Tak ada yang tahu badai akan tiba

Tapi kita semua tahu  
Segalanya akan berlalu  
Dan langit kembali biru



## Balada Tresa

Oleh: Amela Erliana Crhistine, pegawai Dit. SMI (Bagian Kedua)

Tresa baru saja selesai merekam hasil survei siang tadi. Matanya menatap layar komputer dengan setengah melamun. Bayangan pria penjual gorengan tadi kembali melintas di kepalanya. Pria itu telah memperlihatkan sisi masyarakat yang selama ini tak pernah Tresa perhatikan.

Semester lalu, Tresa tidak ikut turun survei ke lapangan. Dia hanya sedikit terlibat dalam penyusunan laporan, itu pun membantu rekan kerjanya yang cuti karena sakit. Mulanya, Tresa pikir data-data yang disajikan dalam laporan hanyalah sebatas angka-angka di atas kertas. Nama-nama yang tercantum sebagai responden hanyalah sebatas data yang harus diolah. Namun kini, pendapatnya berubah. Nama-nama itu, angka-angka itu, menggambarkan seorang manusia yang tengah berjuang demi keluarganya. Bukan sekadar data yang dikirimkan ke kantor pusat untuk memenuhi target kinerja.

“Hei, jangan ngelamun! Nanti kesambet, lho.”

Dion menepuk bahu Tresa dengan cukup keras, membuat Tresa berjengit kaget. Tanpa Tresa sadari, bibirnya mengumpat pelan. Untung saja, kantor sudah sepi. Hanya para bujang lokal yang tidak memiliki kegiatan seperti Tresa dan Dion yang masih bertahan di kantor. Pulang tepat waktu hanya membuat mereka bingung hendak melakukan apa di rumah dinas.

“Tumben beli gorengan,” kata Dion sambil mencomot sepotong tahu isi dari meja Tresa.

“Kebetulan tadi respondenku tukang gorengan.” Tresa menjawab sembari lanjut merekam hasil wawancara tadi ke aplikasi, berusaha mengabaikan Dion yang masih terus mengamatinya.

Walaupun satu angkatan, Tresa dan Dion awalnya tidak saling mengenal. Lingkaran pertemanan mereka tidak saling bersinggungan, sampai akhirnya SK mutasi mempersatukan mereka di satu kantor. Kini, keduanya bagai saudara yang tidak terpisahkan. Nasib sebagai anak rantau membuat keduanya menjadi akrab.

“Nginput apa, sih?” Dion bertanya dengan raut penasaran.

“Hasil survei tadi.”

Gerakan tangan Tresa kembali terhenti saat sedang mengetik data omzet penjualan. Keuntungan usaha pria tadi setiap bulan bahkan tidak sampai separuh pendapatannya. Kalaupun ditambah dengan pendapatan istri si pedagang gorengan yang bekerja sebagai buruh cuci, jumlahnya tetap tidak dapat menyamai penghasilan Tresa. Mendadak Tresa merasa bahwa selama ini dirinya sangat kurang bersyukur.

Tresa kemudian melirik ke arah Dion. Jemarinya mengetuk-ketuk pinggiran keyboard.

“Menurut kamu ... kita bisa bantu mereka apa, ya?” tanya Tresa seraya mengusap dagu.

Dion batal menggigit potongan bakwan yang baru diambilnya.

“Mereka siapa maksud kamu, Tres?”

“Para pedagang kecil itu. Pandemi sudah bikin usaha mereka lesu.” Tresa menunjuk ke layar komputernya. “Lihat, nih, omzet bapak ini turun cukup banyak.”

Pandangan Dion beralih-alih antara Tresa dan layar komputer. “Terus hubungannya sama kita ... apa?”

Tresa mengesah pasrah. Tugasnya memang hanyalah mengumpulkan data untuk evaluasi program pembiayaan usaha yang didanai dari APBN, salah satunya dengan melakukan survei. Tidak ada kaitan langsung dengan para pelaku usaha yang dia temui.

“Nggak ada hubungannya, sih. Tapi ... masak kita nggak ngelakuin apa-apa buat bantu mereka?” gumam Tresa pelan. Setelah melihat kondisi tukang gorengan tadi, hati Tresa tergerak untuk melakukan sesuatu. Hanya saja, dia belum terpikirkan caranya.

Sejenak kedua pemuda itu terdiam dan sibuk dengan pikiran masing-masing. Hanya terdengar suara kunyahan Dion yang tengah menyantap gorengan ketiga.

“Oh, aku tahu, Tres,” seru Dion sembari menjentikkan jari. Wajahnya berseri-seri penuh semangat. “Kamu bisa bantu promosiin produk-produk mereka.”

“Maksud kamu?” Tresa mengernyitkan kening.

“Kamu, kan, admin medsos kantor. Coba kamu minta izin ke Kepala Kantor, boleh nggak untuk hari tertentu ada konten untuk promosiin produk UMKM. Followers medsos kita, kan, lumayan banyak,” terang Dion panjang lebar. “Nanti aku bantuin, deh, fotoin produk-produk mereka.”

Usulan Dion berhasil memicu rangkaian ide baru di benak Tresa. Dia rasa tidak ada salahnya untuk mencoba. Beberapa media sosial instansi lain juga sempat melakukan hal yang serupa.

“Kita juga bisa minta bantuan teman-teman yang lain,” sambung Dion. “Mungkin sesekali juga bisa dibikin dalam bentuk vlog atau liputan gitu. Terus, kalau kantor kita ada event, mungkin bisa juga sekalian bikin bazar kecil-kecilan gitu.”

“Kira-kira ... kepala kantor bakal ngizinin nggak, ya?” tanya Tresa ragu-ragu.

Dion menjentikkan bahu sembari mengusap tangannya dengan tisu. “Asal kamu jelasin baik-baik, kayaknya beliau bakal support, deh,” ujarnya berusaha meyakinkan Tresa.

Tresa merenungkan baik-baik saran Dion. Rasanya usulan itu tidak terlalu sulit untuk diwujudkan. Memang hal itu hanyalah sebuah langkah kecil, tetapi siapa tahu dapat membawa dampak baik bagi para pengusaha kecil yang ingin Tresa bantu. Bukankah hal-hal besar selalu bermula dari hal-hal kecil seperti ini?

new DJPB  
in Team

# Lensa

Rubrik lensa hadir dengan menampilkan karya-karya foto dari fotografer DJPb terutama yang tergabung dalam wadah Treasury Photographer Club (TPC).

Tema : UMKM



Meniup Harapan

**Fotografer:**  
Taufiqurrokhman,  
Setditjen  
Perbendaharaan



Pembuat Gula Aren

**Fotografer:**  
Muhammad Syafei,  
KPPN Palopo



Filet Ikan Juwana

**Fotografer:**  
Ginangjar Rah Widodo,  
KPPN Tanjung Selor



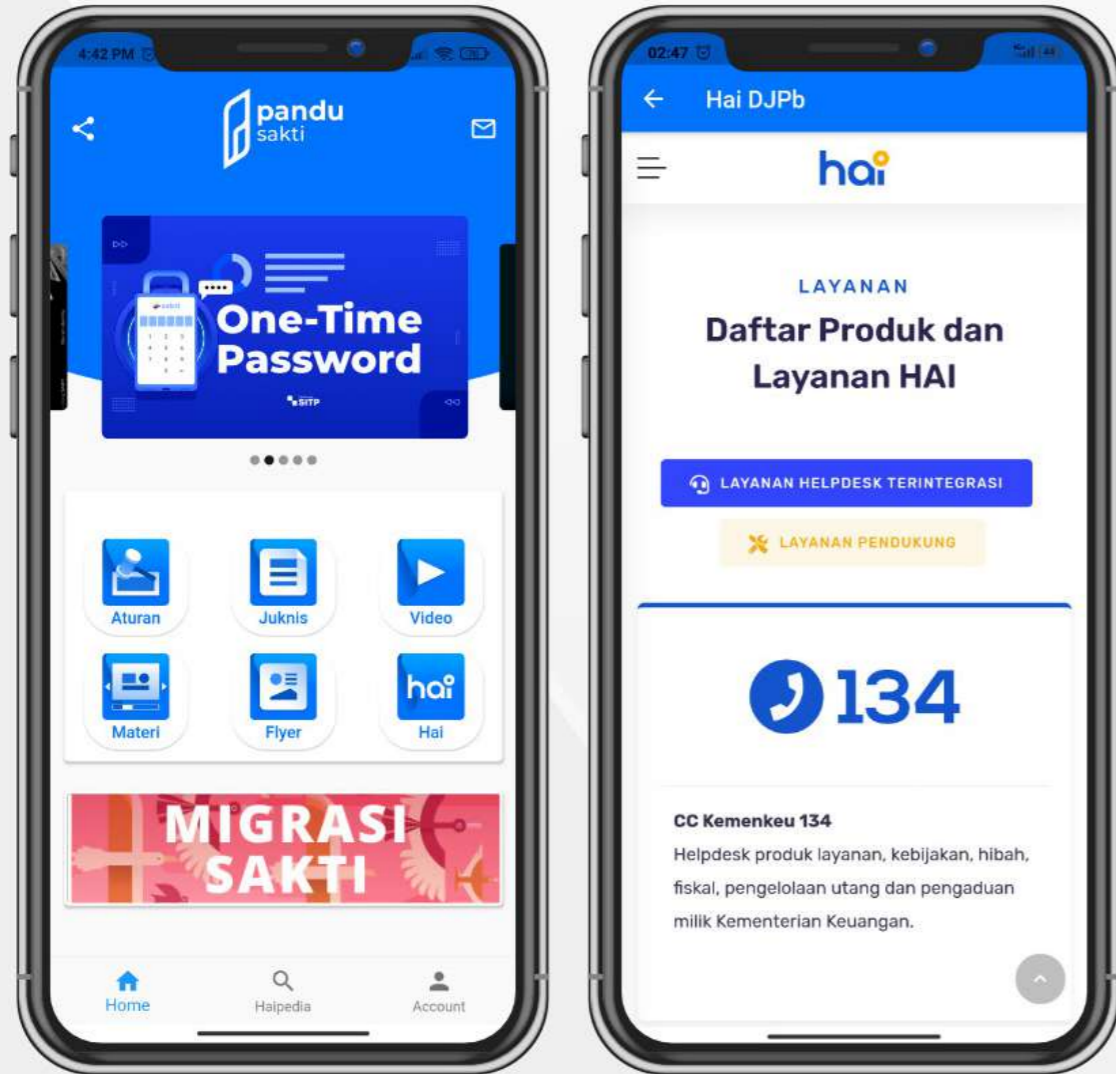
Oleh: Dendi Andrian, KPPN Watampone

<https://artreasury.id/ternyata-pemerintah-sayang-sama-kita/>



DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) 2022 PEMERINTAH MENGALOKASIKAN DANA RP 431,5 TRILIUN LUNTUK ANGGARAN PERLINDUNGAN SOSIAL DANA TERSEBUT DIANTARANYA DIGUNAKAN LUNTUK SUBSIDI LISTRIK LUNTUK 37,9 JUTA JIWA, DAN SUBSIDI LPG TABUNG 3KG SEBANYAK 8 JUTA METRIK TON KEMUDIAN LUNTUK PROGRAM KARTU PRAKERJA PENYALURAN SUBSIDI BUNGA KUR, JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN (JKP) SERTA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DESA LUNTUK 8 JUTA KELUARGA DI PEDESAAN.

WAH TERNYATA PEMERINTAH MASIH SAYANG KITA YA



**PanduSAKTI,**  
Kitab sakti untuk Jawara sejati!  
Meningkatkan kesaktian dari  
satu genggam!



## Treasury Music Community, Rangkul Para Pelaku dan Peminat Musik di DJPb

Oleh: Febby Johanes Wenji, Direktorat Sistem Perbendaharaan; dan Melina Br. Hutabarat, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

**T**reasury Music Community (TMC) merupakan sebuah wadah komunitas bagi seluruh kegiatan bermusik di Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Komunitas ini didirikan untuk memberikan saluran kreativitas bagi seluruh *music creators* dan *music enthusiasts*. Dengan kemajuan teknologi yang ada sekarang, komunitas ini diharapkan dapat menjangkau seluruh pelaku dan penikmat musik DJPb dari Sabang sampai Merauke.

Untuk lingkup Kantor Pusat DJPb, TMC memanfaatkan Aula Benjamin Parwoto pada Gedung Prijadi Praptosuhardjo I sebagai *basecamp*. Selibhnya, untuk menjangkau para pelaku dan peminat musik di seluruh unit vertikal DJPb, TMC memanfaatkan akun Instagram @tmc.djpb dan website [artreasury.id](http://artreasury.id) sebagai wadah untuk menyalurkan kreativitas.

Sebagai sebuah komunitas yang terstruktur dan terorganisasi, TMC memang baru seumur jagung. Sempat mengalami vakum karena terbatasnya ketersediaan personel dan belum mendapat dukungan secara formal, pada tahun 2022 atas arahan dan dukungan penuh dari Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, komunitas musik DJPb kembali aktif. Tahun sebelumnya, beliau pula yang secara langsung menginisiasi pembentukan pengurus harian dan memberikan nama *Treasury Music Community*. Komunitas ini lalu diresmikan secara formal dan bernaung pada Badan Pembinaan Olahraga dan Seni (BAPORSENI) DJPb. Ini merupakan sebuah formalisasi atas sepak terjang para pelaku dan penikmat musik di DJPb yang sebenarnya telah memiliki prestasi dan diakui kehadirannya sejak satu dekade yang lalu.

Keanggotaan TMC saat ini diperluas hingga dapat mencakup para pegawai dan pejabat pada unit-unit vertikal. Logo TMC didesain dan diusulkan oleh salah satu anggota TMC, Wahyu Hadi Cahyono, kemudian ditetapkan bersama para pengurus dan anggota TMC untuk menjadi logo secara *official*. Lengkung kuning pada logo melambangkan rumah bagi komunitas yang mengayomi seluruh anggotanya, *headstock* gitar melambangkan entitas komunitas musik, *headphone* adalah simbol komitmen untuk menyajikan *performance* terbaik untuk dilihat, didengar, dan dinikmati, serta terakhir adalah pemilihan warna dasar logo sesuai warna dasar logo DJPb yang merupakan asal dari TMC.

Musik di DJPb memang selalu identik dengan *Treasury Band* atau dikenal secara umum dengan nama T-Band. Pada awalnya *Treasury Band* dibentuk untuk memenuhi kebutuhan *performance* musik pada berbagai perhelatan akbar yang diselenggarakan oleh DJPb. *Band* ini hadir sejak tahun 2012, diproduksi oleh Heru Pudyo Nugroho,

Kepala Bagian Umum Kantor Pusat DJPb saat itu. Di bawah arahan Tata Suntara, Sekretaris Ditjen Perbendaharaan waktu itu, *Treasury Band* berhasil menghibur di berbagai panggung dan berkolaborasi dengan musisi-musisi dari Kementerian Negara/Lembaga lainnya seperti Subbagian Musik YANMA POLRI.

Walaupun sangat identik dengan nama *Treasury Band*, tetapi sebenarnya komunitas musik DJPb juga diwarnai oleh para penggiat musik lainnya yang memiliki ciri khas masing-masing. TMC memiliki *Treasury Symphony Choir* (TSC - Paduan Suara DJPb) yang juga dibentuk pada tahun 2012. TSC dibentuk untuk menyuguhkan penampilan dalam format *choir* pada *event* yang lebih formal. TSC berhasil meraih Juara Harapan III Perlombaan Paduan Suara yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) pada tahun 2015 yang diikuti grup-grup Paduan Suara utusan Eselon I Lingkup Kementerian Keuangan dan Universitas Negeri juga swasta. Selain itu, komunitas musik DJPb juga diramaikan grup-grup musik hebat seperti eSPe Kustik (Direktorat SP) dan The Bandits (Direktorat SITP), dengan latar belakang *genre* musik yang beragam. eSPe Kustik dengan *genre* akustiknya selalu berhasil menghibur yang mendengarkannya pada acara-acara semi formal. Begitu juga dengan The Bandits yang berkecimpung pada *genre jazz, bossa nova dan swing*, selalu membuat para penikmatnya terpukau.

Dengan format yang ada sekarang, diharapkan TMC diharapkan tak hanya menjadi wadah kreativitas bermusik bagi seluruh insan perbendaharaan, tetapi juga dapat menjadi wadah bagi para penikmat musik yang diperlukan kontribusinya sebagai *support system*. Para penikmat yang tidak tertarik untuk bermain musik dapat berkontribusi dalam kreasi konten untuk media sosial TMC atau terlibat dalam penyelenggaraan acara-acara yang diusung oleh TMC. Format tersebut diharapkan dapat menjadi miniatur dari ekosistem industri musik yang dapat dijadikan wahana untuk memperluas wawasan dan pengetahuan, juga menimba pengalaman.

TMC memiliki program kegiatan yang membutuhkan keikutsertaan tidak hanya dari para pelaku musik, tetapi juga para penikmat musik. Program-program yang direncanakan antara lain *open stage* secara rutin di Kantin Tresuri DJPb, kolaborasi nasional untuk memperingati *event* besar, peningkatan kapasitas baik dalam bermusik maupun sebagai sistem pendukung konten musik, dan banyak lagi. So, bagi Bapak, Ibu, teman-teman yang tertarik untuk ikutan atau bahkan ingin menyumbangkan ide-idenya, *let's join us*.

Catatan Ringan

# SINERGI UMKM

**T**reasury atau perbendaharaan negara, selain menjamin kelancaran pelaksanaan APBN, juga memiliki tugas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Tentu tugas tersebut dilakukan melalui berbagai instrumen pengelolaan keuangan dan perbendaharaan negara. Termasuk dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Pelaksanaan tugas pemberdayaan UMKM untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat melalui instrumen pengelolaan keuangan dan perbendaharaan negara kemudian melahirkan berbagai program seperti subsidi bunga KUR, program UMi, super UMi, Digipay, hingga sinergi UMKM serta banyak program-program lainnya.

Dalam pemberdayaan UMKM, instrumen pengelolaan keuangan negara secara konvensional dan parsial dilakukan melalui penyediaan alokasi anggaran baik dalam bentuk belanja maupun pembiayaan serta fasilitas fiskal. Kemudian instrumen perbendaharaan menyediakan mekanisme penyaluran dana dan sistem pembayaran. Isunya kemudian adalah apakah instrumen fiskal dan treasury mampu membangun sinergi ekosistem pemberdayaan UMKM yang terhubung dengan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan.

Siklus ekosistem pemberdayaan UMKM secara sederhana dapat digambarkan: UMKM mampu memproduksi barang/jasa; memasarkan barang/jasa, meningkatkan penjualan dan laba; memiliki akses terhadap modal usaha; mengembangkan usaha, dan; memiliki sustainabilitas produksi, market dan pendapatan usaha. Dari siklus tersebut, maka instrumen pemberdayaan UMKM pemerintah harus dapat menyentuh pada setiap segmen dan terhubung dengan segmen lainnya.

Untuk mendorong UMKM mampu memproduksi barang/jasa yang berkualitas dan sesuai permintaan pasar, instrumen pemerintah dilakukan dengan program pelatihan, pendampingan, dan bantuan alat produksi. Untuk memperluas pemasaran produk, instrumen pemerintah melalui bantuan promosi, penyediaan marketplace, ataupun fasilitasi ekspor. Untuk peningkatan penjualan dan laba, instrumen pemerintah melalui standarisasi produk, *quality assurance*, pendampingan manajemen finansial. Untuk perluasan akses terhadap modal usaha, instrumen pemerintah melalui subsidi bunga, kredit murah, pendampingan oleh perbankan/sector keuangan. Untuk sustainabilitas usaha, instrumen yang diperlukan adalah pembinaan pengembangan UMKM yang berkelanjutan, mengelola market UMKM yang stabil, dan membangun protokol perlindungan/penyelamatan UMKM.

Dari seluruh instrumen pemerintah untuk mengintervensi ekosistem UMKM tersebut, diperlukan sinergi. Sinergi UMKM dalam mendorong efektivitas program pemberdayaan UMKM dapat dimulai dengan kegiatan-kegiatan kecil seperti membangun Digipay untuk memfasilitasi UMKM menyediakan barang/jasa dari belanja pemerintah; membangun rumah UMi untuk membantu UMKM memperkenalkan produk-produknya; pengembangan SIKP untuk meningkatkan validitas data UMKM; monev KUR untuk analisis perbaikan kebijakan KUR ke depan; konsultasi ekspor untuk membuka akses penjualan UMKM ke luar negeri; dan, berbagai kegiatan lainnya.

Kegiatan-kegiatan kecil untuk sinergi pemberdayaan UMKM itulah yang sedang dilakukan Kementerian Keuangan dengan seluruh jajarannya, termasuk kantor-kantor vertikal di daerah yaitu Kanwil DJPb dan KPPN. Jadi sekarang, Kanwil dan KPPN diwarnai dengan program pemberdayaan UMKM mulai dari tugas fungsi, kegiatan, hingga lay out kantor, dan optimalisasi aset. Semuanya adalah wujud peran treasury dalam sinergi UMKM. **● Didyk Choiroel**



Untuk kamu yang suka berekspresi.

Menjadi insan yang percaya diri,  
Tanpa ragu mencoba  
pengalaman baru.

Untuk kamu yang selalu tertantang.

Mencipta sebuah kreasi,  
dan tak henti berinovasi.

Yang tak lelah belajar, untuk  
tumbuh dan terus berkembang  
menjadi insan yang lebih berarti.

Mari kita bersama tumbuh  
kembang tiada henti.

Wujudkan kreasi, menjadi inspirasi!

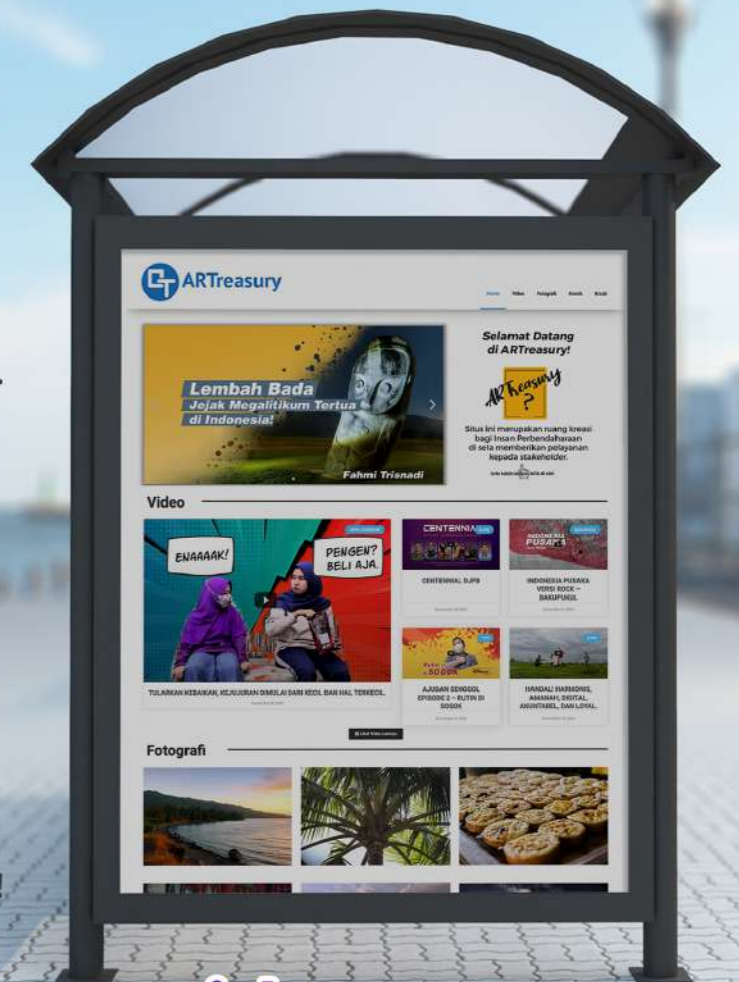
<https://artreasury.id>

Situs ARTreasury merupakan ruang kreasi bagi Insan Perbendaharaan di sela memberikan pelayanan kepada stakeholder.



- ☑ Karya kreatif berupa video, foto/gambar/ sketsa/komik/ karikatur, artikel/kisah/cerita fiksi,
- ☑ tema karya kreatif bebas, menarik serta mengandung informasi yang bermanfaat, tidak harus berkaitan dengan tugas dan fungsi Ditjen Perbendaharaan,
- ☑ konten karya kreatif harus mempertimbangkan norma yang berlaku di masyarakat serta tidak melanggar Kode Etik ASN,
- ☑ dikirimkan ke email [artreasury21@gmail.com](mailto:artreasury21@gmail.com),
- ☑ Hak cipta atas karya yang dikirimkan akan tetap menjadi pemilik karya/kontributor.

Untuk file karya yang melebihi batas email (50mb) dapat diunggah di google drive atau penyedia layanan serupa, kemudian dikirimkan tautannya ke email sebagaimana dimaksud.





**Pemerintah senantiasa serius memberdayakan  
UMKM, yang diharapkan selain dapat mempercepat  
pemulihan ekonomi, juga dapat menjaga dan  
meningkatkan daya beli masyarakat, yang saat ini  
juga sedang mengalami guncangan dikarenakan  
dampak risiko global dan gejolak geopolitik.**

Direktur Jenderal Perbendaharaan, Hadiyanto

